

Modul Guru

Membina Damai

Kolaborasi untuk Toleransi

Creative Youth for Tolerance (CREATE)



Modul Guru Membina Damai: Kolaborasi untuk Toleransi

© Creative Youth for Tolerance

Seluruh teks © 2021 Modul Guru Membina Damai: Kolaborasi untuk Toleransi berlisensi di bawah Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Penulis

Mohamad Miqdad
Muhamad Hisbullah Amrie
Nisrina Nadhifah Rahman
Theresia Kinanti Dewi

Penyunting

Dody Wibowo
Mutiara Kurniasari

Desain dan Tata Letak

Studio Cipsi

Diterbitkan oleh

Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial
(an affiliated organization of Hivos)
18 Office Park, Lantai 15, Unit B
Jalan TB Simatupang No. 18
Jakarta Selatan 12520, Indonesia

Telp: +622127876233. Fax: +622127876242

Website: <https://hsi.foundation/>

Twitter: @hsi_foundation

Facebook: Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial

03

This document is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this document are the sole responsibility of Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

Publikasi ini dapat dibuat dengan dukungan dari rakyat Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID). Isi publikasi ini merupakan tanggung jawab dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos) dan tidak mencerminkan pandangan dari USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

Daftar Isi

Bab 00.

Perkenalkan!

- Perkenalkan! 06
- Mengapa CREATE Diadakan? 07
- Apa yang Diusahakan CREATE? 07
- Mengapa Harus Guru? 08
- Apa yang Perlu Disiapkan Sebelum Memulai Pelatihan? 09
- Apakah Forum ini Sesuai Ekspektasi Saya? 12
- Apa Saja yang Akan Ditemui dalam Modul Ini? 13
- Apakah Saya Cocok Ikut Pelatihan Ini? 14

Asesmen Awal 16

04

Bab 01.

Peran Guru dalam Toleransi dan Bina Damai

1. Toleransi, Perdamaian, dan Bina Damai 23
 2. Pendidikan Bina Damai dan Pendidikan Perdamaian 28
 3. Peran Guru dalam Bina Damai 32
 4. Ragam Cara Mengintegrasikan Toleransi dan Bina Damai dalam Pengajaran 34
 5. Bekerjasama dengan Orang Muda untuk Toleransi dan Bina Damai 39
 6. Jurnal dan Gagasan 42
-

Bab 02.

Konflik dan Kekerasan

1. Menenal Konsep Konflik 47
2. Menenal Kekerasan 56
3. Lembar Kerja Jurnal dan Gagasan 69

Bab 03.

Intoleransi di Indonesia

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Identifikasi Kasus Intoleransi | 74 |
| 2. Memahami Identitas | 77 |
| 3. Radikalisme dan Intoleransi | 80 |
| 4. Ketahanan Masyarakat dan Keluarga | 87 |

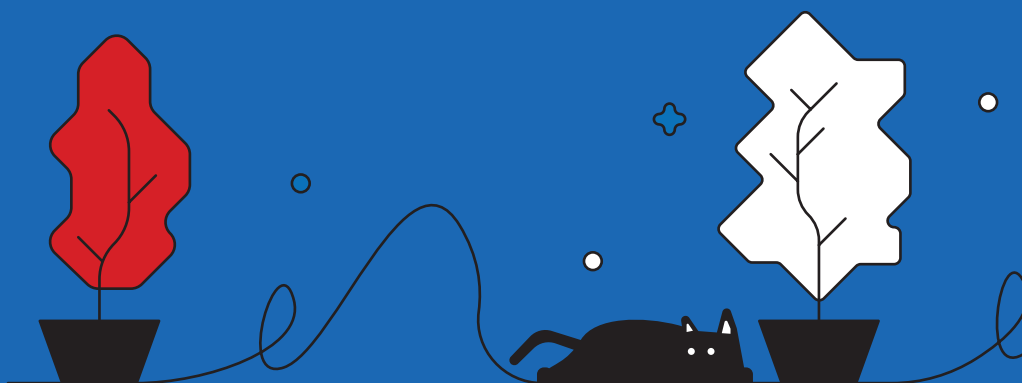
Bab 04.

Ke(tidak)setaraan Pendidikan di Indonesia

| | |
|--|-----|
| 1. Memahami Bias dan Privilese | 101 |
| 2. Ketidaksetaraan di Sekitar Kita | 108 |
| 3. Ketidaksetaraan Pendidikan di Indonesia | 120 |
| 4. Lembar Kerja Jurnal dan Gagasan | 125 |

05

| | |
|------------------|-----|
| Asesmen Akhir | 128 |
| Daftar Referensi | 132 |



Bab 00.



Perkenalkan!

Halo dan salam toleransi kepada seluruh peserta guru! Selamat bergabung dalam pelatihan dan lokakarya guru yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam perdamaian di Indonesia. Perkenalkan kami adalah program CREATE atau Creative Youth for Tolerance (Kreasi Anak Muda untuk Toleransi), sebuah program yang dilaksanakan oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial bersama Perkumpulan Pamflet Generasi yang telah masuk di tahun kedua implementasi. Program ini didukung penuh oleh USAID (United States Agency for International Development) yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang toleran di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Mengapa CREATE Diadakan?

Beberapa tahun terakhir telah terlihat kekhawatiran yang berkembang tentang meningkatnya intoleransi dan promosi praktik dan keyakinan agama eksklusif di Indonesia. Masalah ini terutama menonjol dalam sistem pendidikan. Sebuah survei yang dilakukan baru-baru ini kepada lebih dari 2.000 guru Muslim di sekolah negeri dan swasta yang dilakukan oleh Pusat Studi Islam dan Masyarakat di Universitas Islam Negeri Jakarta (2018) mengungkapkan bahwa banyak yang berpandangan intoleran, dan sepertiganya bahkan mengatakan mereka bersedia untuk pergi berperang dan memperjuangkan negara Islam. Penelitian lain juga menunjukkan adanya masalah khusus serupa dalam kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam, yang dikoordinasikan di bawah OSIS (Dewan Siswa) dan dipimpin oleh kelompok muda dengan pengawasan yang terbatas dari sekolah. Survei Wahid Institute terhadap instruktur rohis (2017) mengungkapkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap pelaku dan aksi terorisme, dan 60% instruktur atau pembina Rohis yang disurvei mengatakan mereka bersedia melakukan perjalanan ke daerah konflik untuk berjihad.

Selain permasalahan di atas, kelompok perempuan dinilai lebih rentan terhadap tindakan intoleransi, dan lebih jauh lagi, ekstremisme kekerasan. Penelitian yang dilakukan Monash University bersama UNWOMEN pada tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berpandangan mendukung kekerasan terhadap perempuan berkorelasi positif dengan pandangannya untuk mendukung ekstremisme kekerasan. Kelompok perempuan pun juga menghadapi diskriminasi atau perlakuan tidak setara yang lebih buruk dibanding kelompok laki-laki, sehingga akses mereka terhadap pemenuhan hak sering menghadapi tantangan. Penelitian yang sama pun menyebutkan bahwa perempuan memiliki efikasi diri yang lebih rendah daripada kelompok laki-laki untuk menanggapi ekstremisme kekerasan.

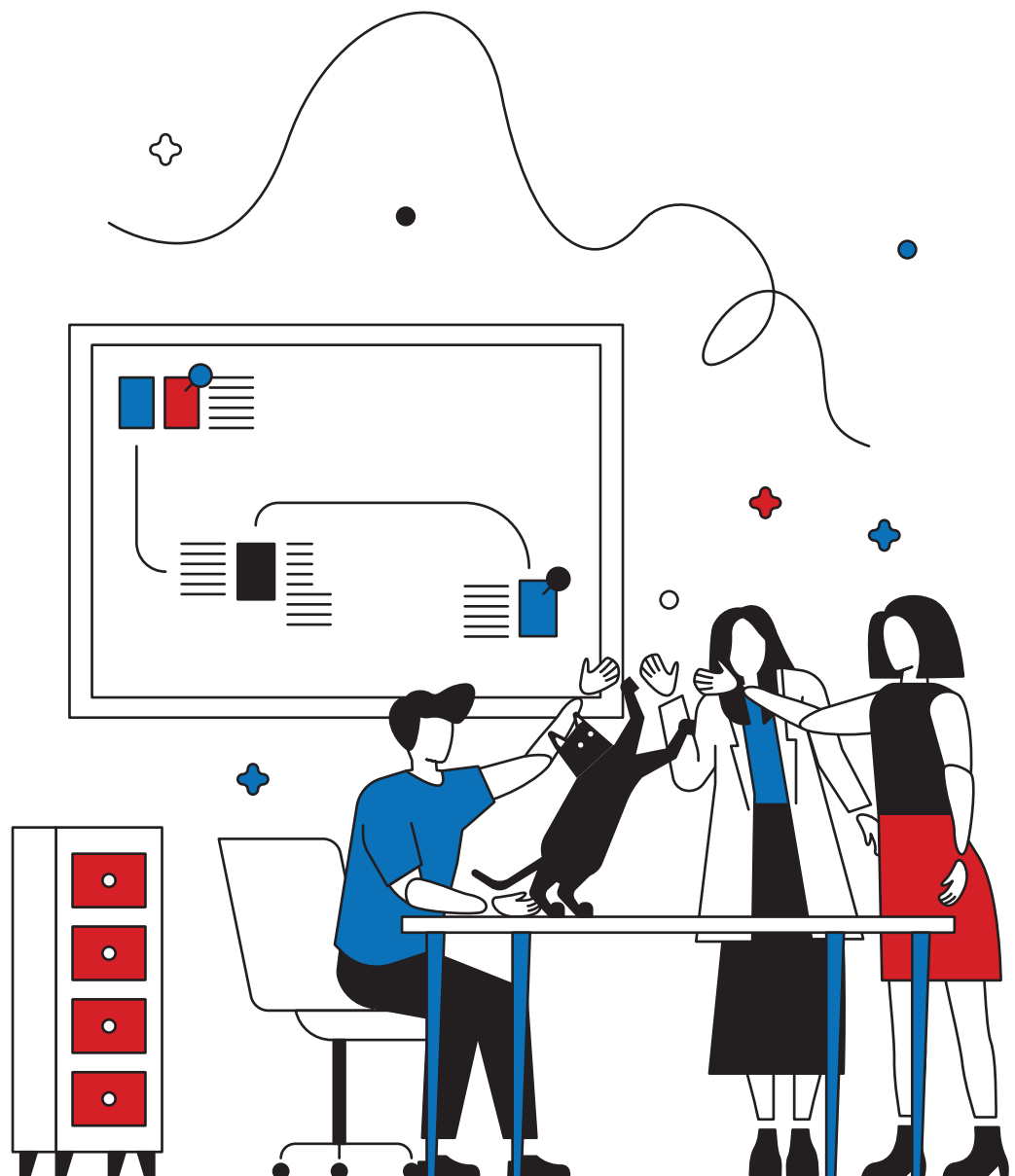
Apa yang Diusahakan CREATE?

Menanggapi situasi di atas, CREATE telah dilaksanakan oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Perkumpulan Pamflet Generasi, Yayasan Ganara Mariberbagi Seni, dan Yayasan Cahaya Guru mulai tahun 2019, memperkuat kapasitas siswa, fasilitator seni, dan guru untuk mendukung praktik toleransi di lingkungan pendidikan menengah. Program ini juga mempromosikan nilai kesetaraan untuk meningkatkan peran aktif kelompok perempuan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang damai dan toleran. Setelah satu tahun pelaksanaan proyek, CREATE mengupayakan kelanjutan proyek dalam memperkuat toleransi dan pluralisme di kalangan siswa dan meningkatkan peran orang tua dan komite sekolah dalam mendukung dan meningkatkan praktik toleransi di sekolah-sekolah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Mengapa Harus Guru?

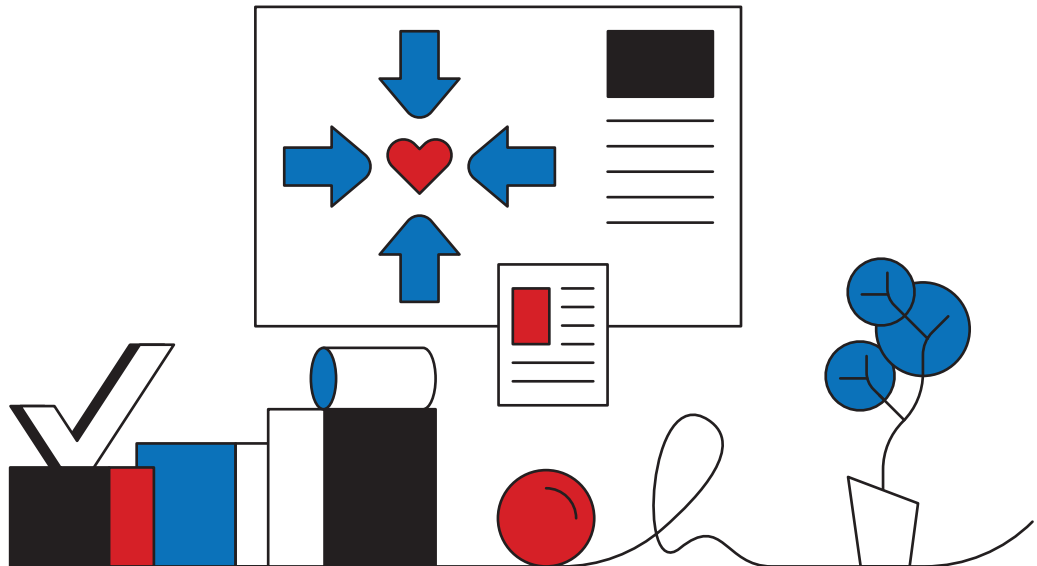
Kami percaya guru memiliki peran penting untuk menciptakan perdamaian di lingkungan pendidikan. Selain menjadi pihak yang memberikan pendidikan kepada siswa melalui proses belajar-mengajar, guru juga dapat memfasilitasi perubahan untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian. Dalam berbagai konteks, guru menjadi pihak pertama yang bersentuhan langsung dengan siswa sekolah dalam proses pembelajaran dan penanaman nilai luhur untuk menciptakan toleransi baik antar siswa maupun dalam lingkungan sekolah secara lebih luas.

Guru memiliki peran istimewa dalam menuangkan apa yang tertulis dalam kurikulum ke dalam bahan ajar, menciptakan pembelajaran yang nyaman, serta memastikan siswa dapat memahami apa yang telah diajarkan. Tak heran jika guru mendapatkan tempat yang utama dari siswa sehingga guru dipercaya oleh siswa untuk dapat belajar lebih dalam, baik mengenai pelajaran yang diajarnya maupun pendidikan nilai yang akan berguna bagi siswa di komunitas sekolah maupun masyarakat luas.



Apa yang Perlu Disiapkan Sebelum Memulai Pelatihan?

Perlu diketahui bahwa dalam sebuah ruang pertemuan, khususnya dalam pertemuan yang akan mempertemukan banyak orang dari wilayah yang berbeda dan peserta tidak mengenal satu sama lain, akan ada banyak sekali latar belakang identitas yang akhirnya bertemu dan akan berdiskusi. Untuk menengahi hal ini, sangat penting bagi kita menciptakan Ruang Aman agar semua orang yang hadir dalam pertemuan merasa aman dan nyaman dalam mengutarakan pendapat, tidak tertekan, bebas dari diskriminasi, dan tidak merasa dipojokkan. Menurut kamus Merriam-Webster, Ruang Aman adalah sebuah tempat yang dimaksudkan untuk terbebas dari bias, konflik, kritik, atau aksi ancaman yang berpotensi memojokkan kelompok tertentu. Ruang ini dapat berbentuk fisik maupun non-fisik. Terkadang, definisi ruang aman bagi setiap orang pun berbeda satu sama lain. Untuk itu, memetakan kebutuhan setiap peserta dalam sebuah pertemuan merupakan langkah pertama yang dapat kita lakukan agar tercipta ruang yang aman untuk semua!



Ruang Aman adalah sebuah tempat yang dimaksudkan untuk terbebas dari bias, konflik, kritik, atau aksi ancaman yang berpotensi memojokkan kelompok tertentu.



**Petakan
kebutuhan
dan kendala
Anda dalam
kotak di
bawah ini!**

Kebutuhan Anda terhadap Ruang Aman

Contoh: bahasa isyarat

Kendala Anda terhadap Ruang Aman

Contoh: internet tidak stabil

Setelah memetakan kebutuhan serta kendala masing-masing, untuk dapat menciptakan Ruang Aman, setiap orang yang hadir dalam pertemuan harus memiliki sensitivitas yang tinggi agar tercipta lingkungan yang setara dan tidak diskriminatif atau menyudutkan kelompok tertentu. Hal tersebut dapat tertuang dalam perjanjian atau aturan pertemuan yang disepakati oleh setiap peserta yang hadir. Beberapa poin penting yang harus ada dalam perjanjian tersebut mencakup:

1. Fasilitator melakukan pengecekan data dan informasi peserta dengan seksama sebelum pertemuan benar-benar dimulai agar jelas bahwa peserta yang hadir adalah mereka yang benar-benar diundang
2. Fasilitator dan peserta sama-sama menanyakan terlebih dahulu panggilan yang tepat kepada setiap orang, apakah lebih nyaman dipanggil dengan sapaan tertentu, langsung disapa dengan nama, atau menggunakan sapaan netral gender seperti “Kak”
3. Fasilitator dan peserta sama-sama menjaga privasi satu sama lain dengan tidak mengumbar informasi yang peserta tahu akan orang lain yang hadir dalam pertemuan, bahkan sekadar informasi terkait alamat tempat tinggal
4. Fasilitator dan peserta sama-sama memberikan kesempatan kepada peserta yang terlihat takut untuk berpendapat karena identitasnya
5. Fasilitator dan peserta sama-sama memastikan adanya kesempatan mengutarakan pendapat yang setara dan merata
6. Fasilitator dan peserta sama-sama menghormati penampilan setiap orang, tidak membuat gestur tubuh yang memojokkan atau bergunjing dengan peserta lain
7. Fasilitator dan peserta sama-sama memastikan bahwa setiap dokumentasi yang dibuat sudah mendapatkan izin dari setiap orang. Dan apabila terdapat orang yang tidak berkenan untuk didokumentasikan (contoh: tidak ingin difoto), maka orang tersebut berhak untuk tidak ikut foto
8. Fasilitator dan peserta sama-sama memastikan adanya bantuan yang dapat diberikan apabila ada orang yang memerlukan bantuan selama proses jalannya pertemuan
9. Forum dapat memberlakukan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran perjanjian yang sudah disetujui oleh semua orang. Sanksi dapat mencakup: teguran, permintaan meninggalkan forum apabila sudah ditegur dua kali, pelarangan mengikuti forum lanjutan, hingga pelaporan ke pihak berwajib apabila pelanggaran sudah dilakukan dan mengganggu peserta lain (mengancam, menghina, dan lain sebagainya)



Petakan harapan dan kekhawatiran Anda dalam kotak di bawah ini!

Apakah Forum ini Sesuai Ekspektasi Saya?

Untuk mengetahui hal tersebut, ada baiknya forum dimulai dengan memetakan harapan dan kekhawatiran semua peserta yang hadir. Peserta dapat memetakan harapan serta kekhawatiran mereka dalam tabel di bawah ini:

| Harapan dalam Forum |
|---|
| Contoh: membangun network, mendapatkan pengetahuan baru |

| Kekhawatiran dalam Forum |
|--------------------------------------|
| Contoh: forum daring membuat ngantuk |

Setelah semua harapan dan kekhawatiran terpetakan, fasilitator bersama peserta dapat mendiskusikan apa saja strategi yang bisa dilakukan untuk memenuhi ekspektasi atau harapan para peserta, dan melakukan strategi dalam proses pertemuan agar kekhawatiran peserta dapat diminimalisasi. Misal: apabila terdapat kekhawatiran peserta menjadi mengantuk selama proses pertemuan, maka fasilitator dapat memberlakukan waktu yang cukup untuk melakukan permainan atau aktivitas ice breaking.

Apa Saja yang Akan Ditemui dalam Modul Ini?

Modul ini dibuat secara khusus untuk para guru yang kami nilai memiliki potensi dalam usaha menciptakan lingkungan pendidikan yang toleran dan damai. Ada baiknya seluruh materi pelatihan yang didapat diendapkan oleh peserta yang diundang terlebih dahulu saja, sebelum menyebarkannya ke guru yang lain. CREATE ingin memastikan proses pembelajaran menyeluruh didapatkan oleh para guru yang menjadi peserta terlebih dahulu sebelum guru siap berkomitmen mengusahakan perdamaian dan kesetaraan di sekolah masing-masing. Maka, agar proses peningkatan kapasitas ini berlangsung dengan komprehensif, guru diharapkan untuk fokus pada proses pembelajaran terlebih dahulu sebelum membagikan bahan pelatihan kepada guru yang lain. Seluruh materi modul tentu akan diberikan kepada peserta guru setelah proses pelatihan telah selesai.

Dalam modul pembelajaran ini, terdapat berbagai hal yang akan ditemui oleh para peserta mencakup:

- 1. Penjelasan Konsep**

Peserta akan disediakan penjelasan konsep yang berhubungan dengan toleransi serta kesetaraan untuk mendukung pemahaman menyeluruh terhadap materi yang dipelajari

- 2. Data**

Setiap bab dalam modul ini akan dipenuhi dengan data terpercaya untuk mendukung peningkatan pemahaman peserta terhadap sebuah isu

- 3. Studi Kasus**

Peserta diharapkan dapat berdiskusi dengan peserta lain terkait berbagai kasus yang disediakan, membandingkannya dengan konsep yang sudah dipelajari

- 4. Permainan**

Untuk mempermudah proses transfer ilmu, permainan yang substantif akan membantu peserta memahami konsep yang cukup rumit untuk dipahami

- 5. Referensi Alat Pembelajaran**

Peserta akan menemui referensi alat pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses transfer ilmu lanjutan oleh peserta guru kepada siswa maupun guru yang lain

- 6. Aktivitas Jurnal**

Pengalaman guru sangat kami hargai dalam proses pembelajaran ini. Untuk itu, pengalaman, perasaan, serta pendapat guru akan suatu kejadian sangat penting dicatat.

- 7. Catatan Ide dan Gagasan**

Kami sadar bahwa modul ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, ide, masukan, serta informasi tambahan dari guru sangat berarti untuk menyempurnakan modul ini!

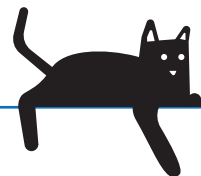


**Tulis
pengalaman
Anda dalam
perdamaian
di kolom
berikut ini!**

Apakah Saya Cocok Ikut Pelatihan Ini?

Usaha menciptakan perdamaian tidak memandang siapa yang lebih cocok dibanding yang lainnya. Persoalan ini adalah persoalan bersama yang perlu sama-sama kita kawal. Persoalan toleransi bukan berarti tugas Guru Pendidikan Agama atau Kewarganegaraan saja, melainkan seluruh elemen guru bisa terlibat di dalamnya. Pengalaman guru sangat berarti untuk menjadi pembelajaran berharga bagi peserta guru yang lainnya. Untuk itu, sebelum kita memulai materi pelatihan, ada baiknya kita petakan, adakah dari kita yang pernah melakukan tindakan atau aksi tertentu untuk menjaga toleransi dan perdamaian di sekolah atau lingkungan?

Contoh: saya pernah
mengunjungi
komunitas
Sunda Wiwitan untuk
bersilaturahmi







Asesmen Awal

Nama :

Gender :

Usia :

Provinsi :

Tempat tinggal :

Sebelum memulai pembelajaran yang menyeluruh, peserta diharapkan mengisi lembar asesmen dengan lengkap. Mohon isi semua pertanyaan yang diberikan. Silakan beri tanda silang (X) pada kolom pilihan yang mencerminkan persetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap setiap pernyataan yang diberikan

| No | Pernyataan | STS | TS | B | S | SS |
|----|---|-----|----|---|---|----|
| 1a | Saya tidak memiliki masalah bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja yang memeluk agama lain atau penghayat kepercayaan. | | | | | |
| 1b | Jika saya memiliki rekan kerja yang memeluk agama lain atau penghayat kepercayaan, saya menghargai haknya untuk berpendapat dan merasa pendapatnya penting untuk didengarkan. | | | | | |
| 1c | Saya merasa senang dan perlu memiliki rekan kerja yang memeluk agama lain atau penghayat kepercayaan karena saya bisa mempelajari banyak hal darinya. | | | | | |
| 2a | Saya tidak memiliki masalah bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja yang keturunan Tionghoa atau Papua. | | | | | |
| 2b | Jika saya memiliki rekan kerja keturunan Tionghoa atau Papua, saya menghargai haknya untuk berpendapat dan merasa pendapatnya penting untuk didengarkan. | | | | | |
| 2c | Saya merasa senang dan perlu memiliki rekan kerja keturunan Tionghoa dan Papua karena saya bisa mempelajari banyak hal darinya. | | | | | |
| 3a | Saya tidak memiliki masalah untuk bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja perempuan. | | | | | |
| 3b | Saya menghargai hak rekan kerja perempuan saya untuk berpendapat dan merasa pendapatnya penting untuk didengarkan. | | | | | |

STS: Sangat Tidak Setuju,

TS: Tidak Setuju,

B: Biasa Saja,

S: Setuju,

SS: Sangat Setuju

| No | Pernyataan | STS | TS | B | S | SS |
|----|--|-----|----|---|---|----|
| 3c | Saya merasa senang dan perlu memiliki rekan kerja perempuan karena saya bisa mempelajari banyak hal darinya. | | | | | |
| 4a | Saya tidak memiliki masalah untuk bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja yang menyandang disabilitas. | | | | | |
| 4b | Jika saya memiliki rekan kerja dengan disabilitas, saya menghargai haknya untuk berpendapat dan merasa pendapatnya penting untuk didengarkan. | | | | | |
| 4c | Saya merasa senang dan perlu memiliki rekan kerja dengan disabilitas karena saya bisa mempelajari banyak hal darinya. | | | | | |
| 5a | Saya tidak memiliki masalah jika ada rekan kerja saya yang memeluk agama lain atau penghayat kepercayaan dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah, termasuk Kepala Sekolah. | | | | | |
| 5b | Jika Kepala Sekolah di tempat saya bekerja memeluk agama lain atau penghayat kepercayaan, saya akan tetap menghargai kepemimpinannya karena saya yakin baik tidaknya kepemimpinan seseorang tidak ada hubungannya dengan latar belakang agamanya. | | | | | |
| 5c | Saya mendukung rekan kerja yang beragama lain atau penghayat kepercayaan untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah demi keberagaman. | | | | | |
| 6a | Saya tidak memiliki masalah jika ada rekan kerja saya yang keturunan Tionghoa atau Papua dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah, termasuk Kepala Sekolah. | | | | | |
| 6b | Jika Kepala Sekolah di tempat saya bekerja adalah keturunan Tionghoa atau Papua, saya akan tetap menghargai kepemimpinannya karena saya yakin baik tidaknya kepemimpinan seseorang tidak ada hubungannya dengan identitas suku, ras, atau etnisnya | | | | | |
| 6c | Saya mendukung rekan kerja yang keturunan Tionghoa atau Papua untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah demi keberagaman. | | | | | |

STS: Sangat Tidak Setuju,

TS: Tidak Setuju,

B: Biasa Saja,

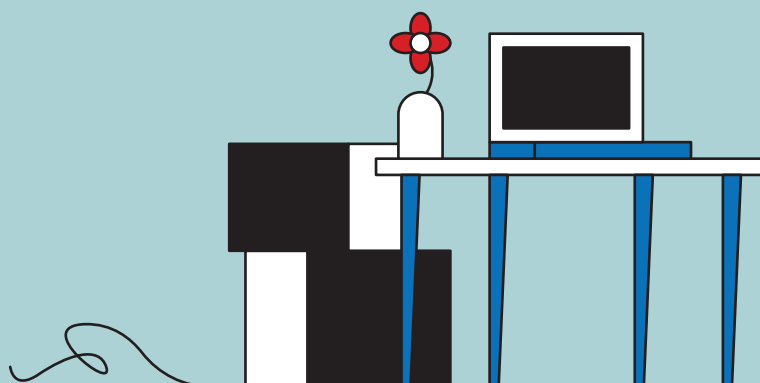
S: Setuju,

SS: Sangat Setuju

| No | Pernyataan | STS | TS | B | S | SS |
|----|---|-----|----|---|---|----|
| 7a | Saya tidak memiliki masalah jika ada rekan kerja perempuan saya yang dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah, termasuk Kepala Sekolah | | | | | |
| 7b | Jika Kepala Sekolah di tempat saya bekerja adalah seorang perempuan, saya akan tetap menghargai kepemimpinannya karena saya yakin baik-tidaknya kepemimpinan seseorang tidak ada hubungannya dengan identitas gendernya | | | | | |
| 7c | Saya mendukung rekan kerja perempuan saya untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah demi keberagaman | | | | | |
| 8a | Saya tidak memiliki masalah jika ada rekan kerja dengan disabilitas yang dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah, termasuk Kepala Sekolah | | | | | |
| 8b | Jika Kepala Sekolah di tempat saya bekerja adalah seorang penyandang disabilitas, saya akan tetap menghargai kepemimpinannya karena saya yakin baik tidaknya kepemimpinan seseorang tidak ada hubungannya dengan kondisi tubuhnya | | | | | |
| 8c | Saya mendukung rekan kerja dengan disabilitas untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah demi keberagaman | | | | | |
| 9a | Saya mendukung teman perempuan saya untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi | | | | | |
| 9b | Saya percaya perempuan lebih cocok mengerjakan pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki | | | | | |
| 9c | Saya percaya laki-laki merupakan tulang punggung keluarga sehingga lumrah memiliki hak lebih besar dibanding perempuan dalam pekerjaan | | | | | |
| 9d | Saya akan memilih kandidat pemimpin laki-laki dibanding perempuan saat ada pemilihan karena laki-laki memiliki kemampuan lebih baik dalam memimpin | | | | | |

| No | Pernyataan | STS | TS | B | S | SS |
|-----|---|-----|----|---|---|----|
| 9e | Saya percaya perempuan harus memiliki hak dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki | | | | | |
| 9f | Saya memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan inklusivitas di lingkungan sekitar saya, khususnya di tempat kerja | | | | | |
| 10a | Saya memiliki komitmen untuk mendukung terbentuknya suasana sekolah yang toleran dan pluralis | | | | | |
| 10b | Saya memiliki komitmen untuk mendengarkan dengan baik dan menggunakan empati dalam menyelesaikan konflik yang saya temui, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah | | | | | |

STS: Sangat Tidak Setuju,
 TS: Tidak Setuju,
 B: Biasa Saja,
 S: Setuju,
 SS: Sangat Setuju



Bab 01.

Peran Guru dalam Toleransi dan Bina Damai

20



| | |
|----------------------|---|
| Bab | Peran Guru dalam Toleransi dan Bina Damai |
| Durasi | 215 menit atau 3 jam 40 menit |
| Metode | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi • Membongkar definisi • Curah pemikiran (brainstorming) • Memetakan potensi diri dan apa yang ingin ditingkatkan • Menggambar peta sekolah, kondisi toleransi, dan skenario idealnya • Menuliskan pengalaman • Diskusi • Kuis Awal dan Kuis Akhir • Journaling |
| Tujuan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman guru tentang perannya dalam toleransi dan bina damai • Meningkatkan pemahaman guru tentang ragam cara mengintegrasikan toleransi dan bina damai dalam pengajaran • Meningkatkan pemahaman guru tentang pentingnya bekerjasama dan berkolaborasi dengan orang muda (siswa) dalam meningkatkan toleransi dan bina damai |
| Indikator | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta guru memiliki peningkatan pemahaman tentang perannya dalam toleransi dan bina damai • Peserta guru memiliki peningkatan pemahaman tentang ragam cara mengintegrasikan toleransi dan bina damai dalam pengajaran • Peserta guru terdorong untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan orang muda (siswa) untuk meningkatkan toleransi dan bina damai |
| Pokok Bahasan | <ul style="list-style-type: none"> • Pre-Test (10 menit) • Toleransi, Perdamaian dan Bina Damai (40 menit) • Pendidikan Bina Damai dan Pendidikan Perdamaian (40 menit) • Peran Guru dalam Bina Damai (25 menit) • Ragam Cara Mengintegrasikan Toleransi dan Bina Damai dalam Pengajaran (60 menit) • Bekerjasama dengan Orang Muda untuk Toleransi dan Bina Damai (30 menit) • Post-Test (10 menit) |
| Verifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil kuis awal dan kuis akhir • Hasil lembar journaling • Daftar hadir • Umpan balik |
| Persiapan | <ul style="list-style-type: none"> • Materi Presentasi • Kertas Post-It atau Metaplan atau platform daring seperti Mural dan Jamboard • Lembar Kertas Polos dan Pulpen • Lembar Kuis Awal dan Kuis Akhir • Lembar Journaling |



Kuis Awal

Sebelum memulai pembelajaran mengenai Peran Guru dalam Toleransi dan Bina Damai, Anda diharapkan mengisi kuis terlebih dahulu!

Nama :

Gender :

Usia :

Provinsi :

Tempat tinggal :

| No | Pernyataan | Benar | Salah |
|----|--|-------|-------|
| 1 | Mengelola keberagaman dalam proses belajar mengajar adalah salah satu tanggung jawab guru di luar mengajar itu sendiri | | |
| 2 | Siswa yang memiliki pendapat yang berbeda dengan guru adalah siswa yang tidak sopan | | |
| 3 | Bentuk tokenisme orang muda adalah saat guru mengajak siswa dalam satu kegiatan namun tidak diberikan kesempatan mengemukakan pendapat | | |
| 4 | Guru tidak memiliki andil dalam menjaga perdamaian dan iklim toleransi di lingkungan sekolah | | |
| 5 | Pengembangan kapasitas dan profesionalisme guru dalam perdamaian penting dilakukan untuk menjaga iklim perdamaian di sekolah | | |

Silakan beri tanda silang (X) pada kolom "Benar" atau "Salah" terhadap setiap pernyataan sesuai dengan apa yang Anda ketahui.



Sub Sesi 01

Toleransi, Perdamaian dan Bina Damai

Waktu

45 Menit

- Membongkar Definisi 10 menit
- Presentasi dan Diskusi Toleransi,
- Perdamaian, dan Bina Damai 30 menit

Metode

Membongkar Definisi, Presentasi, Diskusi

Aktivitas: Membongkar Definisi

Dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai semboyan yang kerap dilontarkan pemangku kepentingan hingga artikel pemberitaan, anda pasti sudah sering mendengar tentang "Toleransi", "Perdamaian", dan "Peacebuilding" alias Bina Damai. Istilah-istilah di atas, tentunya tidak hanya harus dipahami, namun perlu juga untuk 'dibongkar' definisinya.

Pada sesi ini, peserta akan dibagi ke dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan istilah tertentu yang harus 'dibongkar' definisinya, yakni:

- Kelompok Toleransi
- Kelompok Perdamaian
- Kelompok Bina Damai

Setiap kelompok (dapat berisi 3-7 orang) dipersilakan untuk mendiskusikan definisi dari masing-masing istilah dengan cara menuliskannya pada *post-it* atau *metaplan* atau pada dokumen *online*. Setiap peserta diminta menuliskan apa saja yang terlintas di benaknya tentang istilah-istilah di atas, kemudian perwakilan kelompok dapat mengkompilasi di medium yang lebih besar, yakni kertas *flipchart* atau dokumen *online*. Setelah terkompilasi, peserta dalam kelompok dapat secara singkat mendiskusikan apa yang masing-masing orang definisikan sebagai istilah tertentu, entah itu Toleransi, Perdamaian, atau Bina Damai.

Fasilitator akan membantu menggarisbawahi atau mengelompokan catatan kolektif, terutama bila ada kesamaan atau kesinambungan antara satu dengan yang lain. Kemudian fasilitator akan melanjutkan sesi pleno dengan presentasi.

Dengan pemahaman di atas, maka dapat dikatakan bahwa toleransi bukanlah mekanisme ideal untuk mengelola relasi antar pihak di dalam masyarakat yang demokratis dan beragam karena masih berbasis pada ketidaksukaan dan keyakinan bahwa dirinya atau kelompoknya masih paling benar (monis, bukan pluralis). Alih-alih ideal, toleransi hanyalah respons minimal yang dapat kita ambil ketika dihadapkan pada perbedaan dan konflik yang menyertainya. Karena itu pula, toleransi memiliki batasan intrinsik yang terletak pada keinginan seseorang untuk mentolerir sesuatu atau tidak. Jika seseorang merasa jengah dan lelah mentolerir sesuatu yang ia tidak sukai, bukan tidak mungkin dia akan memilih untuk melakukan tindak kekerasan terhadap hal tersebut.



Catatan untuk Fasilitator

Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi lebih jauh mengenai topik toleransi, dapat pula berangkat dari hasil “membongkar definisi” yang telah dilakukan di awal sesi.

Perdamaian

Konsep kekerasan (akan dibahas lebih jauh di bab modul selanjutnya) yang luas membutuhkan konsep perdamaian yang luas juga. Galtung mendefinisikan perdamaian yang hanya diartikan sebatas ketiadaan kekerasan langsung, baik secara fisik, psikis, maupun verbal, sebagai perdamaian negatif. Permasalahannya, perdamaian negatif saja tidak cukup. Kenyataannya, ada banyak orang yang tidak mampu meraih potensi maksimumnya karena mengalami kekerasan yang bersifat sistemik dan/atau kultural. Misalnya, riset oleh Rizky, Suryadarma, dan Suryahadi (2019) menunjukkan bahwa anak Indonesia yang lahir di keluarga miskin sulit menjadi sejahtera dan mengalami mobilitas vertikal ketika mereka dewasa karena sudah terhalang aksesnya terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Kekerasan struktural dan kultural, menurut Galtung, adalah sumber dari problem-problem ketidakadilan sosial yang menyebabkan kita hidup dalam dunia yang penuh kesenjangan. Maka itu, perdamaian yang lebih berkelanjutan semestinya juga ditandai dengan hadirnya struktur dan kultur yang nirkekerasan dan damai yang menjadi prasyarat bagi adanya keadilan sosial.

Perdamaian yang hadir karena keberadaan keadilan sosial inilah yang disebut sebagai perdamaian positif. Perlu diingat bahwa penggunaan kata “negatif” dan “positif” tidak merujuk pada mana perdamaian yang “baik” atau “buruk,” melainkan menandakan pemahaman akan perdamaian yang sekadar ditandai dengan “ketiadaan” sesuatu (the negation of direct violence) atau perdamaian yang juga berupaya memperjuangkan “kehadiran” sesuatu (the posits of structure and culture of peace). Seperti dua sisi koin, mengedepankan atau mengutamakan salah satu jenis perdamaian tidak akan memberi jawaban utuh atas apa makna perdamaian yang sesungguhnya. Kontribusi nyata untuk perdamaian hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kedua kategorisasi di atas. Kesadaran akan kategorisasi itu mendorong kita untuk menyadari bahwa ketiadaan

kekerasan langsung, tidak lantas menghadirkan perdamaian. Ketiadaan tindak intoleran di sekolah, misalnya, tidak serta merta membuat sekolah tersebut damai. Karena, siapa tahu, masih ada kekerasan-kekerasan lain yang berada di ranah struktur maupun kultur.



Catatan untuk Fasilitator

Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi lebih jauh mengenai topik perdamaian, dapat pula berangkat dari hasil “membongkar definisi” yang telah dilakukan di awal sesi.

Bina Damai

Binadamai atau *peacebuilding*, menurut Johan Galtung (1976), adalah semua upaya yang dilakukan guna mengubah struktur dan kultur yang penuh dengan kekerasan menjadi struktur dan kultur yang damai. Apabila struktur yang damai ditandai dengan kehadiran kesetaraan (*equality*), keadilan (*equity*), dan ketersalingan (*reciprocity*), kultur yang damai ditandai dengan keberadaan budaya damai serta relasi antar pihak yang didasarkan pada nirkekerasan, rasa empati, dialog, dan kreativitas (dalam memecahkan persoalan bersama). Selain mengupayakan transformasi struktural dan kultural, bina damai juga berorientasi pada perluasan “*peace reservoir*” yang dimiliki sebuah masyarakat. Sama seperti antibodi yang akan segera bergerak membasmi kuman yang membahayakan bagi tubuh, “*peace reservoir*” berperan sebagai referensi kolektif yang dapat dirujuk oleh masyarakat ketika dihadapkan pada konflik atau gejala-gejala kekerasan tertentu—secara spesifik, keberadaan “*peace reservoir*” memungkinkan kita menghadapi dan mengelola konflik secara damai sebelum ia berubah menjadi kekerasan.

Gambar 2.
Siklus Bina Damai

Schirch dan Sewak (2005) mengidentifikasi bahwa upaya-upaya bina damai dapat mencakup salah satu, beberapa, atau keempat komponen berikut:

Mendorong Cara Berkonflik Nirkekerasan

Monitoring dan
Advokasi Langsung
Pertahanan berbasis
Sipil

Menghentikan Kekerasan Langsung

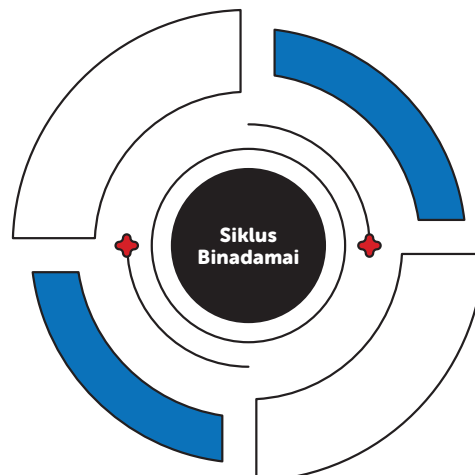
Sistem Hukum
Bantuan Kemanusiaan
Intervensi Pasukan
Perdamaian Perjanjian
Gencatan Senjata
Zona Damai Program
Peringatan Dini

Meningkatkan Kapasitas

Pelatihan dan
Pendidikan
Pembangunan
Konversi Militer Riset
dan Evaluasi

Mengubah Relasi

Trauma Healing
Transformasi Konflik
(seperti Dialog,
Negosiasi, Mediasi)
Keadilan Restoratif
Keadilan Transisional
Governance dan
Pembuatan Kebijakan



Upaya-upaya menghentikan kekerasan langsung. Di level makro, hal ini dilakukan, misalnya, dengan memperkuat sistem hukum, mendorong gencatan senjata, mengirim pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Di level mikro, di sekolah dan dalam konteks Program CREATE, misalnya, hal ini dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang menindak tegas tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, termasuk perilaku intoleran, membuat mekanisme pelaporan tindak intoleran, dsb.

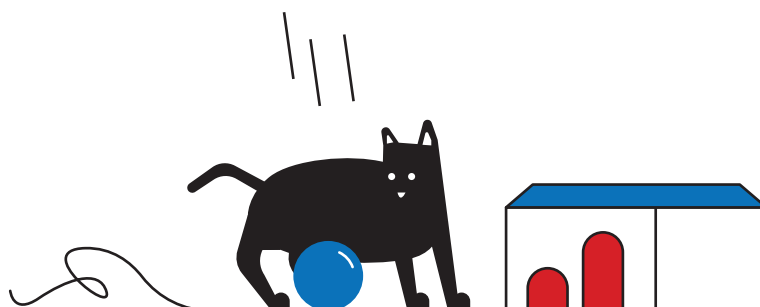
Upaya-upaya meningkatkan kapasitas untuk membangun struktur dan kultur yang damai, baik melalui pelatihan, penelitian, maupun pendidikan perdamaian yang juga dapat dilakukan di sekolah-sekolah maupun institusi pendidikan tinggi. Upaya-upaya mengubah relasi pihak-pihak yang berkonflik secara transformatif guna memastikan kedua belah pihak melihat satu sama lain sebagai manusia yang setara, melalui trauma healing, dialog, keadilan restoratif dan/atau transisional, dsb. Sekolah dapat terlibat dalam upaya-upaya ini, misalnya, dengan berpartisipasi dalam membuka ruang-ruang dialog antar kelompok yang berkonflik. Upaya-upaya mendorong cara berkonflik yang nirkekerasan.

Sekolah dapat terlibat dalam upaya ini dengan mengajarkan dan membiasakan siswanya menghadapi serta mengelola konflik secara nirkekerasan, berpartisipasi dalam aksi nirkekerasan di lingkungan sekitar, dsb.



Catatan untuk Fasilitator

Fasilitator mengajak peserta untuk berdiskusi lebih jauh mengenai topik bina damai, dapat pula berangkat dari hasil “membongkar definisi” yang telah dilakukan di awal sesi.





Sub Sesi 02

Pendidikan Bina Damai dan Pendidikan Perdamaian

Waktu

45 Menit

- Curah Pemikiran 10 menit
- Presentasi dan Diskusi Pendidikan Bina Damai dan Pendidikan Perdamaian 30 menit

Metode

Curah Pemikiran (Brainstorming), Presentasi dan Diskusi

Aktivitas:

Curah Pemikiran (Brainstorming)

Fasilitator dapat menyediakan post-it atau metaplan atau dokumen online agar setiap peserta dapat menuliskan salah satu pengalaman mengajar mereka yang paling mereka ingat, yang menurut mereka telah mereka lakukan untuk berkontribusi bagi pendidikan bina damai dan pendidikan perdamaian.

contoh

Pelajaran yang saya ajarkan
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Saya telah melakukan
Menyelipkan pembahasan contoh kasus konkret saat jam pelajaran. Yakni, soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang akhirnya mengabulkan permohonan uji materi terkait ketentuan pengosongan kolom agama di KTP dan KK dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh beberapa penganut kepercayaan. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, penganut atau penghayat kepercayaan bisa mencantumkan kepercayaannya pada kolom agama di KTP dan KK.

Pendidikan Bina Damai dan Pendidikan Perdamaian

Berdasarkan temuan Baseline Study CREATE tahun 2021 di tiga provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, sejumlah responden yang terdiri dari siswa, orang tua dan guru masih memiliki pemahaman bahwa toleransi adalah tindakan timbal balik dan tidak mempertimbangkan adanya relasi kuasa (relasi kuasa akan dibahas dalam sesi pelatihan berikutnya). Hal ini perlu dipertanyakan dan didiskusikan secara mendalam, terutama saat kita mengaitkan antara pendidikan dengan toleransi dan bina damai, serta bagaimana pendidik yakni guru memiliki peran signifikan di dalamnya.

Mengajarkan prinsip resiprokal atau timbal balik atau saling ketika mengajarkan toleransi dan bina damai bukanlah satu-satunya hal yang bisa dilakukan pendidik dalam membuat pendidikan memiliki kontribusi positif terhadap toleransi dan bina damai. Toleransi, merujuk pada sesi awal bab ini, dan juga merujuk pada bab lain di modul ini, bukanlah hal sederhana seperti aksi-reaksi atau sekadar saling menghargai saja.

Pendidikan Bina Damai memberikan strategi untuk mengelola dampak positif dan negatif dari konflik di masyarakat, serta mengubah pemicu konflik secara berkelanjutan (Smith et al., 2011). Strategi-strategi ini tidak hanya dibutuhkan dalam konteks pasca-konflik, tetapi juga untuk membangun kembali sistem pendidikan dari sudut pandang ideologis (Phillips et al., 1998), caranya dengan melatih guru atau mengubah kurikulum pendidikan.

Pendidikan dapat menjadi alat untuk rekonsiliasi dengan mengatasi warisan konflik dan dengan menemani proses pengungkapan kebenaran, bekerja dengan korban atau kelompok yang selama ini mengalami ketidakadilan, dan menggali pemahaman tentang pengampunan dan perjanjian damai (Smith et al., 2011).

Pendidikan Perdamaian adalah strategi lain untuk bina damai. Studi ini mempertimbangkan definisi Fountain tentang pendidikan perdamaian, yaitu *“proses mempromosikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa perubahan perilaku yang akan memungkinkan anak-anak, remaja dan orang dewasa untuk mencegah konflik dan kekerasan, baik yang terbuka maupun struktural; menyelesaikan konflik secara damai; dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian, baik pada tingkat intrapersonal, interpersonal, antar kelompok, nasional atau internasional”*.

Pendidikan Perdamaian menurut UNICEF¹ (1999) termasuk di dalamnya adalah pendidikan hak asasi manusia, pendidikan untuk pembangunan, pelatihan gender, dan pendidikan kecakapan hidup, serta beragam inisiatif lain dalam pendidikan yang mempromosikan bina damai.

Pendidikan perdamaian bersifat komprehensif dan memberikan persiapan bagi siswa untuk pengelolaan keberagaman dan perdamaian menuju kehidupan yang lebih baik bagi semua. Berikut ini adalah beberapa contoh rekomendasi standar pendidikan perdamaian yang sudah atau dapat diterapkan oleh para guru.

¹ UNICEF (United Nations Children’s Fund) adalah sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibu di negara-negara berkembang. UNICEF didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1946, dan mulai bekerja di Indonesia sejak 1948 dengan mandat: memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal.

| Standar | Aspek | Bentuk/Bukti |
|--------------|---|--|
| Pengetahuan | Kesadaran Diri | Mengenali nilai-nilai pribadi, kecenderungan emosional dan kemampuan perdamaian |
| | Kesadaran Kontekstual | Pengetahuan tentang sejarah dan kebutuhan masyarakat saat ini |
| | Multikulturalisme | Jelaskan kesamaan dan perbedaan dengan pengalaman orang-orang dari latar belakang dan budaya yang berbeda |
| | Intersubjektivitas | Identifikasi bagaimana satu atau lebih ide tentang sesuatu dari seseorang tetaplah bermakna |
| | Hak Asasi Manusia | Mengajak siswa untuk melihat Undang-Undang Perlindungan Anak |
| | Sejarah Pencapaian Perdamaian | Menganalisis pencapaian individu (tokoh), organisasi (lembaga), atau masyarakat umum sekitar dalam mempromosikan perdamaian |
| | Sumber Konflik | Identifikasi kekerasan yang mengarah pada konflik |
| | Metode Penyelesaian Konflik Tanpa Kekerasan | Jelaskan metode nirkekerasan dalam menghadapi konflik |
| | Proses Demokratis | Identifikasi metode pengambilan keputusan yang terbuka, setara, partisipatif dan demokratis |
| Keterampilan | Ekspresi Konsep Diri | Mengungkapkan konsep diri yang seimbang; mengapresiasi dan memberikan kritik yang membangun |
| | Analisis Komunikasi | Identifikasi ragam teknik komunikasi; termasuk elemen representasi, bias, keseimbangan, dan keterampilan mendengarkan secara aktif |
| | Empati | menunjukkan pemahaman dan kepedulian atas penderitaan atau masalah yang dialami orang lain |
| | Inklusi | Melibatkan orang atau kelompok dengan karakteristik sosial, intelektual dan fisik yang beragam |
| | Kerjasama | Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang atau kelompok lain yang memiliki visi atau misi berbeda |
| | Analisis Sumber Kekerasan | Identifikasi diskriminasi, ketidakadilan, ketidaksetaraan, ketimpangan kekuasaan, dan lainnya dalam berbagai level baik intrapersonal, interpersonal, struktural dan lainnya |

| | | |
|-------|---------------------------|--|
| | Keberagaman Sudut Pandang | Belajar dan menjelaskan tiga atau lebih perspektif untuk menganalisis konflik |
| | Melegitimasi Orang Lain | Memvalidasi sudut pandang, narasi, pengalaman, aspirasi orang atau kelompok yang berbeda (berseberangan) |
| | Adaptasi | Mempraktikkan bina damai dengan mengkontekstualisasikannya dengan budaya setempat |
| Nilai | Penerimaan | menunjukkan penerimaan baik terhadap diri sendiri maupun keberagaman manusia |
| | Mutualitas | Mengidentifikasi kesamaan manusia dan perbedaan kebutuhan tiap manusia |
| | Penghargaan | Menunjukkan penghargaan terhadap orang lain, meski memiliki perbedaan pendapat |
| | Empati | Menunjukkan pemahaman dan kepedulian atas penderitaan atau masalah yang dialami orang lain |
| | Optimisme | Menunjukkan keyakinan bahwa perdamaian dapat tumbuh dari banyak cara, termasuk dengan belajar dari konflik |
| | Keterlibatan | Menyadari tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan perubahan bagi perdamaian |
| | Kerendahan Hati | Menunjukkan kesopanan dan tetap rendah hati akan pencapaian atau kemampuan yang dimiliki |
| | Kesabaran | Menunjukkan kemampuan untuk mengelola dengan telaten langkah-langkah dan proses menuju perdamaian |

31



Catatan untuk Fasilitator

Fasilitator dapat mengajak peserta untuk kembali ke tulisan-tulisan hasil curah pemikiran (brainstorming) di awal sesi, kemudian mencocokkan dan mengklasifikasinya berdasarkan rekomendasi standar pendidikan perdamaian yang telah dipresentasikan. Fasilitator dapat memimpin diskusi mengenai apa yang sudah guru lakukan dengan rekomendasi standar pendidikan perdamaian, dan menekankan bahwa disadari atau tidak disadari, sejatinya para guru telah melakukan sesuatu untuk bina damai, dan upaya tersebut harus dikembangkan serta dilanjutkan. Ajak pula guru untuk: mengingat apa yang telah mereka lakukan selama mengajar siswa, dampak atau perubahan yang terjadi pada siswa, dan catatan observasi lain yang relevan.



Sub Sesi 03

Peran Guru dalam Bina Damai

Waktu

30 Menit

- Presentasi Peran Guru dalam Bina Damai 10 menit
- Pemetaan Potensi Diri 20 menit

Metode

Presentasi, Pemetaan Potensi Diri & Yang Ingin Ditingkatkan

Peran Guru dalam Bina Damai

UNICEF Learning for Peace selama bertahun-tahun telah melakukan studi literatur mengenai peran guru dalam bina damai. Tentu saja guru mendukung keberhasilan sistem pendidikan apa pun, namun peran apa yang dimainkan guru dan bagaimana mereka memainkannya sangatlah bervariasi.

Sebagai agen transformatif, guru tidak hanya dapat menggunakan lembaga (sekolah) mereka untuk mengajar mata pelajaran, melainkan juga untuk memfasilitasi perubahan, untuk mempromosikan toleransi dan bina damai. Perlu diingat, guru bisa menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan. Pengalaman guru sebagai manusia dan pengalaman guru sebagai guru itu sendiri sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana guru menjalankan profesinya sehari-hari.

Bila selama ini sistem pendidikan mengatur perekrutan guru dengan menekankan sejumlah aspek terkait kualifikasi, perlu diperhatikan pula bahwa sistem perekrutan guru juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: komposisi gender serta pelibatan guru dari kelompok yang secara historis terpinggirkan atau guru yang merupakan korban atau bagian dari kelompok korban ketidakadilan. Harapannya, semakin beragam latar belakang guru mengajar para siswa, peran guru dalam bina damai dapat semakin maksimal tereksplorasi.

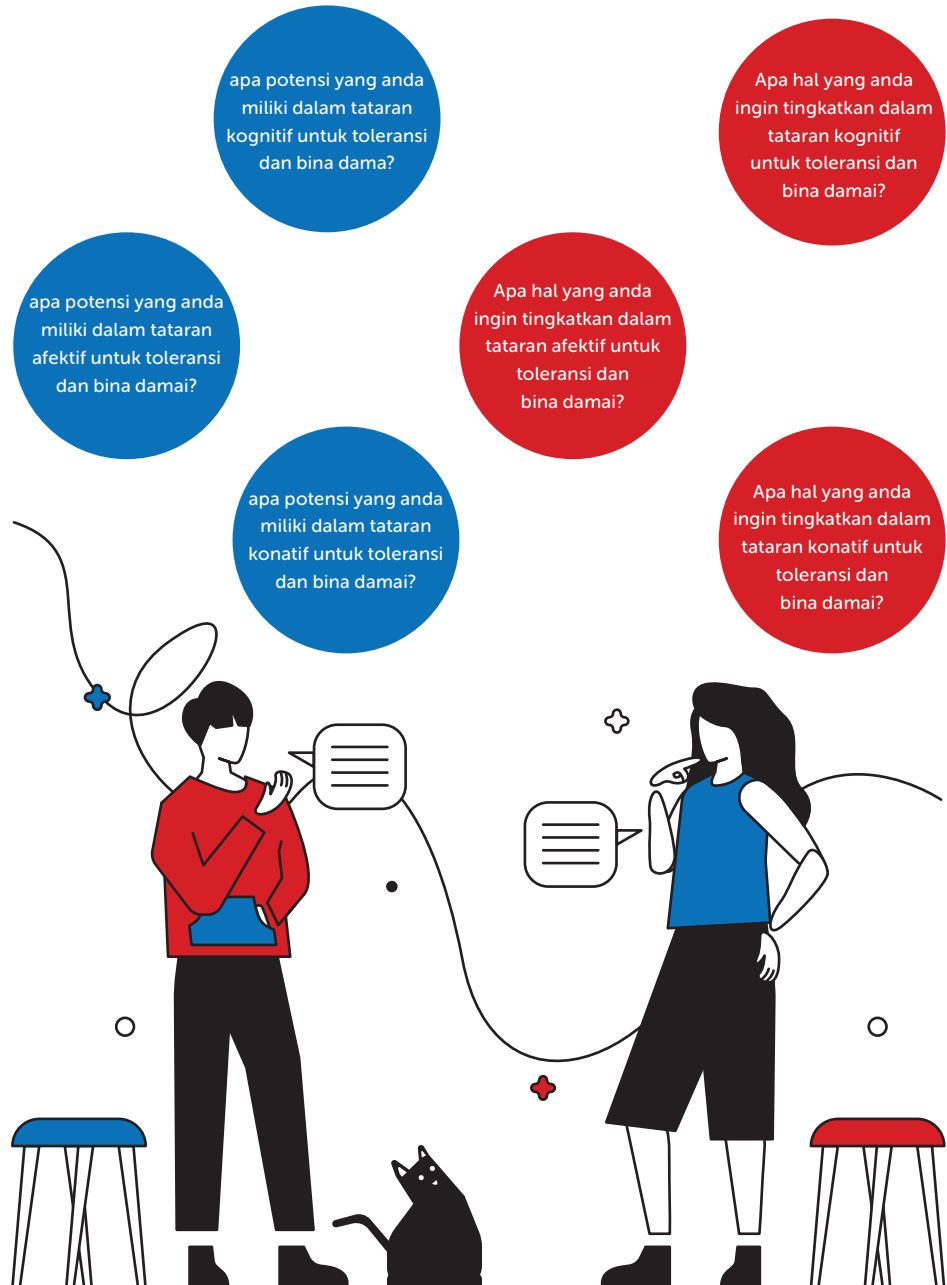
Guru adalah agen kunci dalam sistem pendidikan, guru diberi peran sebagai agen kohesi sosial di mana mau tidak mau mereka harus menangani warisan masa lalu sebuah konteks, misal: konflik ras, konflik agama, ketimpangan, dan lainnya. Untuk itu, pengembangan profesional guru sangatlah penting dalam mendukung guru untuk mempromosikan toleransi dan bina damai.

Guru memiliki peran istimewa dalam menuangkan apa yang tertulis dalam kurikulum dan buku teks ke dalam ruang belajar mengajar, menciptakan makna, dan memastikan siswa memahami apa yang diajarkan dan dapat mengaitkan pelajaran tersebut dengan kehidupannya. Cara guru mengajar sama pentingnya dengan apa yang mereka ajarkan dalam memfasilitasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memfasilitasi atau bahkan menjauhkan bina damai.

Tak kalah penting, guru merupakan bagian dari komunitas sekolah dan masyarakat luas di mana sekolah itu berada, sehingga peran guru dalam bina damai sangatlah berpengaruh kepada komunitas sekolah dan masyarakat luas.

Aktivitas:**Petakan Potensi Diri Anda dan Apa yang Ingin Anda Tingkatkan**

Fasilitator mengajak peserta untuk memetakan potensi diri masing-masing dan apa yang ingin ditingkatkan seperti contoh di bawah ini dan setelah selesai dapat diberikan kembali kepada fasilitator. Kesimpulan yang diharapkan dari sesi ini adalah bahwa sesungguhnya setiap guru memiliki potensi diri dan berkeinginan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki agar dapat lebih berkontribusi bagi toleransi dan bina damai.

**Keterangan:**

- Kognitif: pengetahuan, persepsi dan keyakinan.
- Afektif: emosi, perasaan.
- Konatif: kecenderungan bertindak, kemauan.



Sub Sesi 04

Ragam Cara Mengintegrasikan Toleransi dan Bina Damai dalam Pengajaran

Waktu

60 Menit

- Presentasi Ragam Cara Integrasi Toleransi dan Bina Damai 40 menit
- Menggambar Peta Sekolah 20 menit

Metode

Presentasi, Menggambar Peta Sekolah dan Kejadian yang Diingat



Catatan untuk Fasilitator

Dalam setiap bahasan ragam cara mengintegrasikan toleransi dan bina damai dalam pengajaran yang diterangkan dalam materi ini, fasilitator diharapkan mengajak guru untuk mengingat dan berbagi cerita terkait setiap cara yang sudah dilakukan oleh guru berdasarkan pengalaman mereka.

Dalam mengintegrasikan toleransi dan bina damai dalam pengajaran, guru dapat mengadaptasi beberapa cara berikut ini, antara lain:

1. **Gunakan perasaan saat mengajar**, sebarkan energi positif untuk membuat pelajaran yang diajarkan menjadi lebih hidup dan menarik.

Contoh: Bawakan materi ajar yang memancing rasa ingin tahu siswa. Membuat siswa heran, kagum, atau gembira -- ketika mengetahui fakta-fakta baru yang berkaitan dengan materi yang diajarkan.

2. **Menyajikan pelajaran dari perspektif kemanusiaan dan berorientasi pada bina damai.**

Contoh: Studi Kasus: Penghayat Kepercayaan

- Ajak siswa untuk mengidentifikasi adakah kelompok penghayat kepercayaan di daerah asalnya? Apa saja kelompok penghayat kepercayaan tersebut?
- Ajak siswa untuk menggali (bisa dibantu dengan memberikan kesempatan untuk siswa mencari di internet) seputar penghayat kepercayaan tersebut. Apa saja yang dialami oleh penghayat kepercayaan? Apakah mereka dapat mengemukakan eksistensinya secara terbuka tanpa rasa takut? Apakah mereka mendapatkan hak-hak dasarnya (misal: KTP, Jaminan Kesehatan, Vaksin COVID-19, dll)
- Ajak siswa untuk mencurahkan pendapat mereka tentang bagaimana hidup berdampingan dengan penghayat kepercayaan

3. **Dukung pengembangan diri siswa.**

Guru dapat memberikan visi, wawasan, panduan, latihan peningkatan kesadaran dan membantu memahami potensi siswa agar siswa dapat berkembang dan membentuk identitas dirinya. Contoh: angkat profil tokoh-tokoh perdamaian seperti Gus Dur, Malala atau Mahatma Gandhi, penggerak hak asasi manusia, figur yang berasal dari kelompok marjinal atau korban ketidakadilan, dan lainnya

yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa membangun karakter dirinya dan berkembang.

4. Bantu siswa untuk membangun visi hidupnya.

Harus diakui bahwa orang muda cenderung mengadopsi filosofi atau visi hidup dari lingkungan sekitarnya. Pada umumnya, mereka memiliki antusiasme dan berpikir secara abstrak (belum terstruktur) dan dapat menyerap nilai apa pun yang ada, tanpa seleksi terlebih dahulu. Di sinilah kesempatan bagi guru untuk memfasilitasi langkah siswa mengenali apa yang mereka butuhkan, dan apa yang dunia ini butuhkan, yakni, kehidupan yang damai dan adil bagi semua. Guru dapat memainkan peran yang tak hanya terbatas pada aspek otoritas, melainkan memberi



Tahukah Anda?

Berpikir terbuka mengajarkan kita untuk memilih yang baik, juga berhubungan dengan fitrah manusia, mengakui adanya kemampuan dan kehendak manusia dalam memilih dan bertindak, juga kapasitas manusia untuk memilih dan bertindak yang baik dan benar. Terbuka dan bebas dalam berpikir dan berbuat, sehingga mampu secara mandiri menentukan masa depan, jalan hidup, beradaptasi dengan pengaruh luar, memilih untuk mengambil atau meninggalkan sesuatu. Berpikiran terbuka juga membuat kita memiliki jiwa besar dan optimis dalam menghadapi tantangan atau kesulitan.

35

dorongan agar siswa terus memiliki rasa penasaran akan hidup ini. Guru pun dapat menekankan bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan manusia berpikiran terbuka dan bebas.

5. Membangkitkan kreativitas dan imajinasi siswa.

Pendekatan tradisional yang didominasi guru di kelas menekan semangat kreativitas dan kebebasan anak-anak. Ini mempromosikan pemikiran jalur tunggal yang sejalan dengan ide-ide guru. Di sisi lain, pembelajaran yang berpusat pada anak mendorong keterbukaan suasana untuk berpikir kreatif dan divergen. Penyelidikan terbuka, perspektif alternatif, dan penciptaan ide yang bebas didorong melalui berbagai kegiatan.

6. Jadikan belajar sebagai proses yang menyenangkan.

Proses belajar harus menjadi sesuatu yang diperlukan oleh siswa, bukan sekadar rutinitas belaka. Sehingga, proses belajar harus bahagia dan menyenangkan karena beberapa alasan. Pertama, agar proses belajar menghasilkan suasana dan semangat positif. Kedua, agar materi pelajaran mudah disimpan dalam memori.

Ketiga, agar pelajaran membantu perkembangan emosi pada anak. Berikut beberapa tips agar belajar dapat menjadi proses yang menyenangkan:

- Menyajikan pelajaran dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dengan penjelasan yang urut dan logis
- Kenalkan topik-topik yang menggugah dan menarik
- Jaga situasi belajar agar siswa tetap fokus
- Pancing proses belajar dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Bisa juga dengan penggunaan alat bantu audio visual
- Tingkatkan partisipasi siswa dalam belajar dengan melibatkan mereka dalam kegiatan belajar yang menarik dan menantang
- Berdayakan aktivitas seperti menyanyi, mendengarkan lagu, menonton video, dan menganalisa kontennya
- Berdayakan permainan peran atau simulasi
- Berikan latihan yang kreatif dan menarik sebagai pengganti latihan dan tugas yang konvensional yang cenderung monoton dan 'kering'

7. Membangun iklim yang bersahabat dan kooperatif dalam belajar.

Iklim sosial yang kondusif muncul di dalam suasana belajar yang memiliki interaksi yang tepat antara guru-murid dan murid-murid. Saling menghormati, sopan santun dan kebaikan, sangat berkontribusi pada pembentukan iklim yang bersahabat dan kooperatif dalam belajar. Hubungan kooperatif juga perlu dibangun dalam membantu menciptakan suasana yang positif karena hal itu mencegah perilaku individualistis dan egois dalam belajar. Saling menghargai sangat dibutuhkan untuk menggali potensi yang terbaik dalam diri siswa.

8. Pendekatan Seni.

Seni dapat digunakan secara efektif untuk membangun visi dan sikap perdamaian pada siswa. Kekuatannya terletak pada kemampuan afektif yang memungkinkan dihasilkan dari pendekatan seni. Seni adalah media perdamaian yang sangat kuat, yang dapat dieksplorasi tanpa henti. Berikut adalah beberapa contoh. Pilih topik dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan bina damai dan pengembangan diri agar siswa memiliki sikap empati. Mengintegrasikan toleransi dengan bina damai dengan seni membuat proses belajar lebih hidup dan menarik. Pendekatan seni termasuk dalam daftar berikut ini, namun tak terbatas pada:

- Bermain peran
- Simulasi kasus/kejadian
- Mengangkat kisah tokoh/figur tertentu atau quote dari tokoh/figur, digali dan dikembangkan
- Menganalisa lirik lagu, menganalisa karya visual atau potongan karya sastra
- Mengarang/berimajinasi
- Penulisan kreatif, mis. menulis surat, puisi, dll
- Pembuatan cerita bersambung secara bersama-sama
- Menulis kisah berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman dalam keluarga

9. Pendidikan Agama.

Agama sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah dapat secara khusus berkontribusi pada upaya bina damai. Setiap ajaran agama memang mengandung nilai-nilai perdamaian, namun beredar kritik bahwa bentuk pengajaran pendidikan agama yang umum digunakan saat ini adalah sempit, cenderung konservatif memecah belah dan dangkal. Guru pengajar agama baiknya mengadopsi pendekatan yang lebih luas dan beragam termasuk dengan cara-cara di bawah ini:

- Mengadopsi pendekatan yang berpusat pada siswa untuk mengajar agama, bukan sekadar ceramah. Mulailah dengan pengalaman hidup keseharian yang relevan dengan siswa
- Mengidentifikasi kebutuhan spiritual siswa yang berbeda-beda
- Mendorong pola beriman yang terbuka, mengedepankan diskusi, penemuan jati diri, mengadopsi secara aktif atau berbasis pengalaman, menggantikan model-model pengajaran yang selama ini kerap bermuatan instruksi dan patronisasi
- Tidak memandang rendah agama atau kepercayaan lain. Kembangkan sikap ramah, toleran, dan hormat terhadap sesama
- Gunakan metode kreatif untuk mempromosikan praktik beragama
- Gunakan kisah-kisah praktik baik bina damai khususnya yang terjadi dalam konteks sekolah, misalnya dapat diambil dari Buku Sekolah Penjaga Kebhinekaan “Cerita Baik Program Sekolah Damai Wahid Foundation”
- Diskusikan secara mendalam isu-isu manusia seperti tujuan hidup, tantangan hidup, keingintahuan, ketidaktahuan, dan lainnya. Dalam pembahasan, bawalah perspektif agama yang diajarkan serta agama lain agar dapat sedemikian rupa membantu memperluas cakupan pembahasan

37



Tahukah Anda?

Ahmad Wahib², seorang pemikir dan pembaharu Islam dalam buku catatan hariannya (yang kemudian dibukukan berjudul “Pergolakan Pemikiran Islam”) berkata:

“Cara bersikap kita terhadap ajaran Islam, Qur’an dan lain-lain sebagaimana terhadap Pancasila harus berubah, yaitu dari sikap sebagai insan otoriter menjadi sikap insan merdeka yaitu insan yang produktif, analitis dan kreatif. Kita jangan lagi merumuskan kejayaan kita karena adanya Islam sebagai tempat kita berpijak, melainkan: bahwa kejayaan kita terletak pada potensi-potensi diri kita sendiri sesuai dengan dorongan-dorongan moral yang ada dalam ajaran Islam.

Kunci pemikiran harus diletakkan pada fungsionalisasi Islam dalam kreativitas pribadi-pribadi kita dan bukan lagi pada status ajaran Islam dalam kehidupan kita. Islam jangan lagi dipandang sebagai bangunan emas yang megah yang bisa dipuja di mana kita mungkin hidup di dalamnya dengan berbuat atau tidak berbuat, tapi Islam bisa ada atau tidak ada tergantung pada ada atau tidak adanya kerja keras kita dalam diri kita masing-masing untuk mengamalkan ajaran-ajaran spiritual Islam.”

² Ahmad Wahib dikenal sebagai pemikir dan pembaharu Islam. Ia dikenal sebagai pembaharu terutama berkat catatan harian yang diangkat menjadi buku Pergolakan Pemikiran Islam (2004) oleh Djohan Effendi dan Ismet Natsir. Dalam catatannya, Wahib mencoba mempertanyakan apa yang sudah ia yakini selama ini mengenai Tuhan, ajaran Islam, masyarakat Muslim, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Aktivitas:**Menggambar Peta Sekolah, Kondisi Toleransi, dan Skenario Idealnya**

Fasilitator dapat menyediakan metaplan atau menggunakan aplikasi paint di komputer agar setiap peserta dapat menggambar secara kasar peta sekolah masing-masing beserta pembagian ruangnya, misal: ruang guru, lapangan, perpustakaan, unit kesehatan sekolah, dll. Selain menggambar peta sekolah, peserta juga diminta untuk mengingat peristiwa-peristiwa terkait pelecehan, kekerasan atau intoleransi yang pernah dialami atau terjadi di salah satu ruangan di sekolah. Setelah itu, tuliskan juga skenario idealnya.

**Gambar peta sekolah
Dan ruangan-ruangannya**

Saya pernah menerima komentar "Sekarang gendutan, ya?" di gerbang sekolah pasca kembali mengajar setelah cuti melahirkan.

Skenario Ideal

Ketika kembali dari cuti melahirkan, kawan sesama guru menghampiri saya dan menanyakan kabar saya "Bagaimana kabarmu? Sudah sempat tidur cukup disela-sela kesibukan mengurus bayi?"

**Gambar peta sekolah
Dan ruangan-ruangannya**

Saya pernah melihat seorang siswa meledek siswa lain di lapangan sekolah "Dasar sipit, lu! Jadi susah melihat kan?" dan saya hanya berlalu karena harus mengejar kesibukan lain.

Skenario Ideal

Ketika melihat siswa meledek bernada rasisme ke siswa lain di lapangan sekolah, saya menghampiri siswa tersebut untuk menjelaskan bahwa ledekan yang merendahkan fisik orang lain adalah bagian dari kekerasan verbal.



Sub Sesi 05

Bekerjasama dengan Orang Muda untuk Toleransi dan Bina Damai

³ Jika waktu 30 menit tidak cukup, Fasilitator dapat memperpanjang waktu untuk sesi ini menjadi 45 menit

⁴ Fasilitator perlu memperhatikan posisi guru ketika menceritakannya, apakah guru berperan sebagai pemberi nasihat/pengarah, atau guru mengambil posisi yang setara, misal: secara demokratis melibatkan siswa dalam mengambil keputusan.

Waktu

30 Menit³

- Menuliskan Pengalaman 10 menit
- Presentasi dan Diskusi Bekerjasama dengan Orang Muda 20 menit

Metode

Menuliskan Pengalaman, Presentasi dan Diskusi

Aktivitas:

Aktivitas: Tuliskan Pengalaman Peserta Bekerjasama Dengan Orang Muda (Siswa)

Fasilitator dapat menyediakan *post-it* atau metaplan atau dokumen *online* agar setiap peserta dapat menuliskan salah satu pengalaman mengajar mereka yang paling mereka ingat, yang menurut mereka merupakan bentuk melibatkan siswa (orang muda)⁴ dalam proses belajar itu sendiri.

Bekerjasama dengan Orang Muda untuk Toleransi dan Bina Damai

Tak dapat dipungkiri, banyak orang dewasa masih memegang stereotip negatif tentang pandangan dan kemampuan orang muda. Padahal, banyak riset menunjukkan bahwa orang muda memiliki pandangan yang tajam dan kemampuan yang luar biasa. Lantas, bagaimana orang dewasa seperti guru dapat memanfaatkan energi, kemauan, kemampuan dan komitmen orang muda untuk toleransi dan bina damai? Bagaimana caranya agar orang muda terlibat dalam proses penyelesaian masalah atau konflik dan bertindak secara berarti bermoldakan kapasitas yang mereka miliki? Ya, salah satu kuncinya adalah dengan kemitraan orang dewasa dan orang muda/remaja (*youth-adult partnership*).

Apa itu Kemitraan Orang Dewasa-Orang Muda?

Kemitraan sejati adalah kemitraan di mana masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk membuat saran dan keputusan dan di mana kontribusi masing-masing diakui dan dihargai. Kemitraan orang dewasa-orang muda adalah kemitraan di mana orang dewasa bekerja dalam kemitraan penuh dan bermakna dengan orang muda dalam isu-isu yang dihadapi orang muda, termasuk dalam pendidikan, toleransi, perdamaian dan bina damai.

Apa Saja Elemen Penting dari Kemitraan Orang Dewasa-Orang Muda yang Efektif?

Membangun kemitraan pemuda-dewasa yang efektif, berkelanjutan, dan benar-benar kolaboratif dapat menjadi tantangan. Untuk mewujudkan toleransi dan bina damai, kemitraan orang dewasa-orang muda harus efektif, dengan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Tetapkan tujuan yang jelas untuk kemitraan. Orang muda dan orang dewasa harus memahami apa peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan. Contoh: tetapkan tujuan bersama siswa dalam proses belajar mengajar.
2. Bagikan kekuasaan untuk membuat keputusan. Jika orang muda tidak memiliki

- kekuasaan untuk membuat keputusan, partisipasi mereka bukanlah kemitraan.
Contoh: libatkan siswa dalam menentukan metode belajar suatu mata pelajaran.
3. Orang dewasa (termasuk guru) harus percaya bahwa orang muda adalah manusia yang berharga, kurangi stereotip atau asumsi negatif tentang orang muda.
 4. Sadarilah bahwa zaman, gaya komunikasi, ketertarikan, ketidaktertarikan, tujuan dan harapan yang berbeda antara orang dewasa dengan orang muda, bahkan di antara orang muda itu sendiri.
 5. Jaga tujuan bersama dan apa yang ingin dicapai dari aktivitas atau hal yang dijalani bersama. Tujuan bersama dapat membantu menyelesaikan konflik yang timbul dari gaya komunikasi yang berbeda.
 6. Kemitraan orang dewasa-orang muda yang efektif memiliki harapan yang tinggi bagi para orang muda untuk berpartisipasi penuh tanpa rasa takut.
 7. Orang dewasa harus mencoba untuk membantu orang muda untuk bersikap bijaksana, termasuk kapan saat yang tepat untuk mengatakan "Tidak" ketika disuruh-suruh. Orang dewasa juga sebaiknya membantu orang muda dalam membuat keputusan atas diri mereka sendiri.
 8. Tegakan komitmen dari orang dewasa kepada orang muda dengan mengakui hak-hak mereka dan mendengar suara mereka agar kemitraan orang dewasa-orang muda dapat berjalan efektif.

Tangga Partisipasi Anak dan Orang Muda

| | | |
|---|--|---|
| 8 | Orang Muda Menginisiasi, Orang Dewasa dan Orang Muda Berbagi Peran dan Membuat Keputusan Bersama Secara Setara | Tingkatan/Skala Partisipasi Orang Dewasa-Orang Muda |
| 7 | Orang Muda Menginisiasi dan Orang Dewasa Memberi Input | |
| 6 | Orang Dewasa Mengajak Orang Muda Dalam Membuat Keputusan | |
| 5 | Orang Muda Diajak Konsultasi dan Diberi Informasi Oleh Orang Dewasa | |
| 4 | Orang Muda Diberi Tugas dan Diberi Informasi Oleh Orang Dewasa | Non-Partisipasi |
| 3 | Tokenisme (Aktivitas Yang Mengajak Orang Muda Namun Hanya Boleh Memberi Sedikit Umpan Balik) | |
| 2 | Dekorasi (Aktivitas Yang Mengajak Orang Muda Tanpa Pelibatan Orang Muda) | |
| 1 | Manipulasi (Aktivitas Di Mana Orang Muda Hanya Disuruh, Tanpa Pahami Tujuan Aktivitas Tersebut) | |

Roger Hart's Ladder of Participation



41

RUNG 1

Manipulasi (Aktivitas Di Mana Orang Muda Hanya Disuruh, Tanpa Paham Tujuan Aktivitas Tersebut)

RUNG 5

Orang Muda Diajak Konsultasi dan Diberi Informasi Oleh Orang Dewasa

RUNG 2

Dekorasi (Aktivitas Yang Mengajak Orang Muda Tanpa Pelibatan Orang Muda)

RUNG 6

Orang Dewasa Mengajak Orang Muda Dalam Membuat Keputusan

RUNG 3

Tokenisme (Aktivitas Yang Mengajak Orang Muda Namun Hanya Boleh Memberi Sedikit Umpan Balik)

RUNG 7

Orang Muda Menginisiasi dan Orang Dewasa Memberi Input

RUNG 4

Orang Muda Diberi Tugas dan Diberi Informasi Oleh Orang Dewasa

RUNG 8

Orang Muda Menginisiasi, Orang Dewasa dan Orang Muda Berbagi Peran dan Membuat Keputusan Bersama Secara Setara



Sub Sesi 06

Jurnal dan Gagasan

Waktu

25 Menit

Metode

Pengisian Lembar Kerja

Guna memastikan guru tetap belajar dan melatih sensitivitas mereka pasca pelatihan, maka metode Journaling perlu diadakan di akhir bab modul ini. Journaling bertujuan untuk mencatat kejadian-kejadian yang peserta lihat di kehidupan sehari-hari, misal mengingat satu kejadian yang berkaitan dengan materi dalam modul ini, lalu mereka menuliskan perasaan dan pendapat mereka terhadap kejadian tersebut. Journaling ingin mengamati perspektif dan pandangan peserta terkait isu-isu toleransi di sekitar mereka. Journaling juga akan mempermudah program untuk menilai perkembangan pemahaman peserta dan bagaimana materi dalam modul berkontribusi terhadap perkembangan pemahaman tersebut. Selain itu, kisah sukses juga bisa dipetik dari beberapa elemen yang dituliskan peserta di jurnal. Terdapat tiga bagian yang diharapkan dilengkapi, mencakup:

- Apa yang Saya Lihat: Anda diminta menceritakan pengalaman yang pernah Anda lihat, amati, atau alami terkait topik yang dibicarakan.
- Apa Perasaan Saya: Anda diminta mengungkapkan perasaan Anda terkait peristiwa tersebut.
- Apa Pendapat Saya: Anda diminta untuk memberikan pendapat terkait peristiwa yang terjadi, dapat mencakup kritik atau saran demi perbaikan situasi tertentu.

| Apa yang Saya Lihat? | Apa Perasaan Saya? | Apa Pendapat Saya? |
|--|--|--|
| Contoh: Saat kelas pertama pasca Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), saya mendapati salah seorang siswa baru di kelas saya merupakan pendatang dari daerah lain dan beragama Konghucu, sementara kelas saya merupakan kelas dengan mayoritas siswa beragama Islam. Saat sesi perkenalan, sejumlah siswa meledek siswa beragama Konghucu dengan sebutan-sebutan/panggilan yang merendahkan. | Contoh: Bingung, karena selama saya mengajar di sekolah tersebut tidak pernah ada siswa yang beragama Konghucu. Juga, tidak ada guru agama atau materi ajar yang memadai yang berkaitan dengan agama Konghucu. Ketika diingat, sepertinya siswa-siswa lain di kelas saya juga baru pertama kali menghadapi teman beragama Konghucu | Contoh: Apakah sebaiknya saya menjelaskan tentang Agama Konghucu kepada seluruh siswa di kelas? Atau saya persilakan siswa beragama Konghucu tersebut menjelaskan agama yang dianutnya sendiri? Selanjutnya, apakah saya harus mengkonsultasikan hal ini kepada Wakil Kepala Sekolah atau kepada Kepala Sekolah atau kepada guru yang lain? Terutama kelak menjelang pelajaran agama, bagaimana caranya agar siswa beragama Konghucu tetap bisa mendapatkan haknya untuk belajar -- tanpa harus 'terpaksa' mengikuti kelas yang mengajarkan agama lain? |



Kuis Akhir

Setelah menyelesaikan pembelajaran mengenai Peran Guru dalam Toleransi dan Bina Damai, Anda diharapkan mengisi kuis di bawah ini!!

Nama :

Gender :

Usia :

Provinsi :

Tempat tinggal :

| No | Pernyataan | Benar | Salah |
|----|--|-------|-------|
| 1 | Mengelola keberagaman dalam proses belajar mengajar adalah salah satu tanggung jawab guru di luar mengajar itu sendiri | | |
| 2 | Siswa yang memiliki pendapat yang berbeda dengan guru adalah siswa yang tidak sopan | | |
| 3 | Bentuk tokenisme orang muda adalah saat guru mengajak siswa dalam satu kegiatan namun tidak diberikan kesempatan mengemukakan pendapat | | |
| 4 | Guru tidak memiliki andil dalam menjaga perdamaian dan iklim toleransi di lingkungan sekolah | | |
| 5 | Pengembangan kapasitas dan profesionalisme guru dalam perdamaian penting dilakukan untuk menjaga iklim perdamaian di sekolah | | |

Silakan beri tanda silang (X) pada kolom "Benar" atau "Salah" terhadap setiap pernyataan sesuai dengan apa yang Anda ketahui.

Bab 02.

Konflik dan kekerasan

44



| | |
|----------------------|--|
| Bab | Konflik dan Kekerasan |
| Durasi | 230 menit |
| Metode | <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Materi • Kerja Jurnal • Kotak Referensi: studi kasus (artikel berita), infografis • Wadah Gagasan • Kuis Awal dan Kuis Akhir |
| Tujuan | <ul style="list-style-type: none"> • Memahami definisi konflik dan Segitiga ABC Galtung • Mengetahui kemampuan yang diperlukan dalam penanganan konflik • Memahami definisi (berbagai jenis) kekerasan, serta contoh-contoh tindak kekerasan • Memahami konsep relasi kuasa • Dapat mengidentifikasi contoh-contoh tindak kekerasan yang kerap terjadi di sekolah |
| Indikator | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan terkait konsep kekerasan pada post-test • Peserta berkomitmen untuk memperjuangkan perdamaian di sekolah |
| Pokok Bahasan | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep Konflik (110 menit) • Kekerasan (95 menit) • Kerja Jurnal dan Gagasan (25 menit) |
| Verifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Kuis Awal dan Kuis Akhir • Hasil lembar kerja jurnal dan gagasan • Hasil feedback umum dan pernyataan komitmen peserta |
| Persiapan | <ul style="list-style-type: none"> • Materi Presentasi • Lembar Kuis Awal dan Kuis Akhir • Lembar Kerja Jurnal • Lembar Gagasan |



Kuis Awal

Sebelum memulai pembelajaran mengenai Peran Guru dalam Toleransi dan Bina Damai, Anda diharapkan mengisi kuis terlebih dahulu!

Nama :

Gender :

Usia :

Provinsi :

Tempat tinggal :

| No | Pernyataan | Benar | Salah |
|----|---|-------|-------|
| 1 | Konflik terjadi ketika dua pihak tidak sepaham dan mengakibatkan kerusakan atau kekerasan | | |
| 2 | Konflik harus dihindari | | |
| 3 | Segitiga ABC Galtung menggambarkan tiga aspek konflik: attitude, behavior, communication | | |
| 4 | Menurut Galtung, ada tiga jenis kekerasan: kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural | | |
| 5 | Siswa beragama Konghucu tidak mendapatkan pelajaran agama karena tidak ada guru adalah salah satu contoh tindak kekerasan | | |
| 6 | Secara umum, guru dan siswa memiliki relasi kuasa yang setara di sekolah | | |

Silakan beri tanda silang (X) pada kolom "Benar" atau "Salah" terhadap setiap pernyataan sesuai dengan apa yang Anda ketahui.



Sub Sesi 01

Mengenal konsep konflik

Waktu

110 Menit

- Diskusi Awal 15 menit
- Presentasi Materi Konflik 25 menit
- Diskusi Lanjutan 20 menit
- Studi Kasus 40 menit
- Presentasi Akhir 10 menit

Metode

Materi presentasi, diskusi, dan studi kasus

Konsep Konflik

Konflik adalah hal yang tidak terelakkan. Konflik dapat ditemui di kehidupan sehari-hari, baik dengan keluarga maupun di pekerjaan. Dengan berkembangnya teknologi, kita juga semakin mudah berinteraksi dengan orang lain yang bahkan tidak kita kenal di dunia maya. Sehingga, sangat mungkin pula kita berkonflik dengan orang asing. Namun, apa itu konflik? Apakah konflik itu selalu buruk? Dalam bab ini, kita akan mengenal apa itu konflik melalui perspektif Johan Galtung, seorang ilmuwan studi perdamaian dari Norwegia.

Diskusi Singkat (15 menit)

Sebelum memulai materi, peserta akan diajak untuk sejenak merefleksikan dan berbagi pemahaman dan persepsi mereka mengenai konflik. Karena diskusi ini bertujuan untuk membuka sesi dan mengajak peserta untuk mulai berpikir mengenai konflik, sesi refleksi akan dilakukan secara individu (masing-masing) selama lima (5) menit dan sesi diskusi akan dilakukan di forum besar selama 10 menit. Diskusi bersifat singkat dan sukarela. Setidaknya dua (2) peserta dapat menceritakan pendapat dan pengalaman mereka terkait konflik. Setiap peserta yang bersedia menceritakan pendapat dan pengalamannya mendapatkan waktu maksimal tiga (3) menit untuk berbagi cerita ke forum. Fasilitator atau peserta lain mendapatkan waktu dua (2) menit untuk memberikan tanggapan.

Pertanyaan panduan yang dapat digunakan untuk diskusi ini adalah:

- Apa yang pertama kali muncul di benak Anda ketika mendengar kata 'konflik'?
- Apakah konflik itu baik atau buruk?
- Adakah satu pengalaman pribadi terkait konflik dan penanganan (atau kegagalan dalam menangani) konflik yang dapat Anda ceritakan di forum ini? Anda dapat menceritakan pengalaman konflik baik di sekolah maupun di keluarga, atau dengan orang asing.

Apabila hanya ada satu (1) orang yang bersedia menceritakan pengalamannya, fasilitator dapat sekilas menggali pendapat para peserta sebagai forum dengan bertanya, "Apakah Anda setuju dengan pendapat peserta X bahwa konflik itu baik/buruk? Apakah ada yang memiliki pendapat berbeda?" Melalui diskusi singkat ini, kita akan mendapatkan gambaran umum mengenai perspektif awal para peserta terkait konflik.

Materi Presentasi (25 menit)

Konflik secara sederhana dapat diartikan sebagai ketidakselarasan tujuan (incompatibility of goals). Contoh yang menggambarkan ketidakselarasan tujuan: Beberapa siswa ingin menggunakan lapangan untuk bermain basket di waktu yang sama dengan kelompok marching band berlatih. Fasilitator dapat memberikan contoh lain yang sesuai dan membantu menggambarkan konsep konflik sebagai ketidakselarasan tujuan.

Apabila ditangani dan dikelola dengan baik, konflik atau ketidakselarasan tujuan antara dua kelompok siswa di atas dapat berujung pada beragam solusi kreatif yang berorientasi pemecahan masalah (problem-solving), perasaan empati pada kebutuhan masing-masing pihak, dan sikap nirkekerasan atau keengganan untuk merespon dengan kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam kasus penggunaan lapangan, solusinya dapat berupa keputusan untuk memakai lapangan secara bergantian, untuk patungan agar dapat menyewa lapangan di luar sekolah bagi salah satu pihak, untuk berlatih di sisi lapangan yang berbeda, dan sebagainya.

Namun, apabila tidak ditangani dan dikelola dengan baik, konflik atau ketidakselarasan tujuan yang sama dapat memunculkan rasa frustrasi yang kemudian diekspresikan dalam tindak agresif, bahkan kekerasan, dalam bentuk apapun. Dalam kasus di atas, kemungkinannya sangat beragam, mulai dari mencemooh, menghina, mengancam, merebut, mengusir, dan sebagainya.

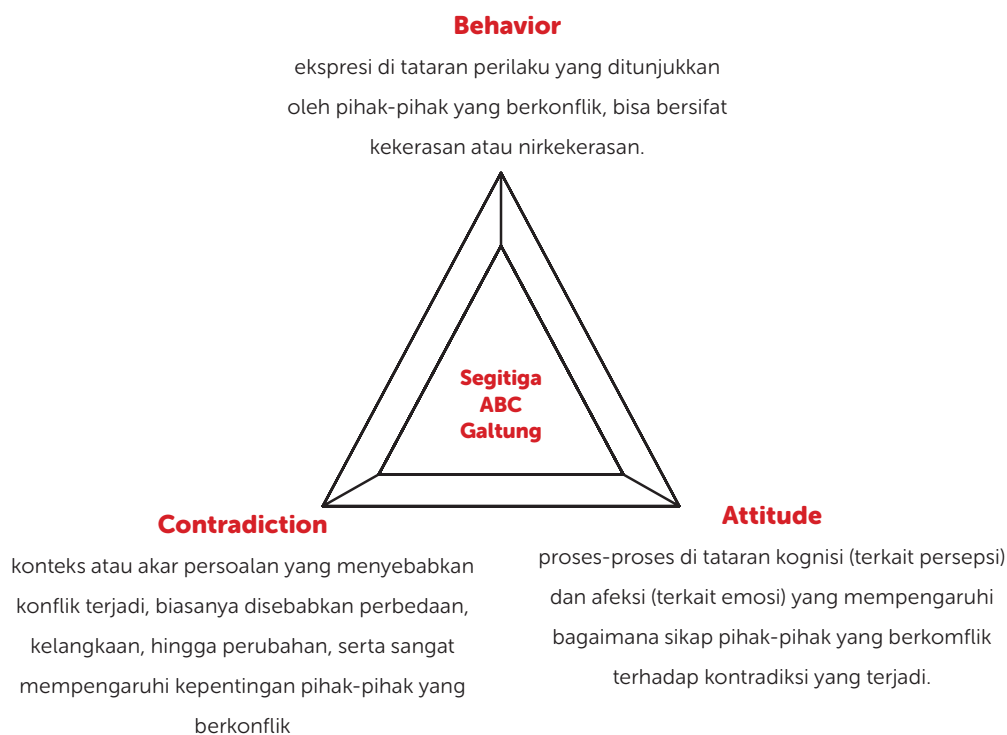
Apa artinya? Konflik pada dasarnya bersifat netral dan perlu dibedakan dari kekerasan. Kekerasan hanyalah salah satu ekspresi perilaku dalam berkonflik. Apabila pihak-pihak yang berkonflik memiliki keterampilan menghadapi dan mengelola konflik yang baik, konflik bahkan bersifat konstruktif karena memungkinkan sebuah persoalan ditangani, mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk mengadopsi cara berpikir yang berorientasi pada pemecahan masalah, mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, hingga mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka.



Catatan untuk fasilitator

Pada poin ini, fasilitator dapat menghubungkan kembali ke salah satu contoh pengalaman peserta yang telah disampaikan di awal sesi. Fasilitator dapat mengingatkan bahwa kejadian konflik itu sendiri adalah netral, sementara lanjutan dari kejadian konflik tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Fasilitator dapat memberikan contoh ekspresi perilaku alternatif (baik positif maupun negatif) yang mungkin terjadi dari kejadian konflik tersebut. Contoh: bila pengalaman konflik berujung pada ekspresi negatif, maka fasilitator dapat memberikan contoh ekspresi positif yang mungkin terjadi dari konflik tersebut, dan sebaliknya.

Johan Galtung, seorang ilmuwan studi perdamaian dari Norwegia, menyebutkan bahwa setiap konflik memiliki tiga aspek, yang dapat digambarkan dalam Segitiga ABC berikut:



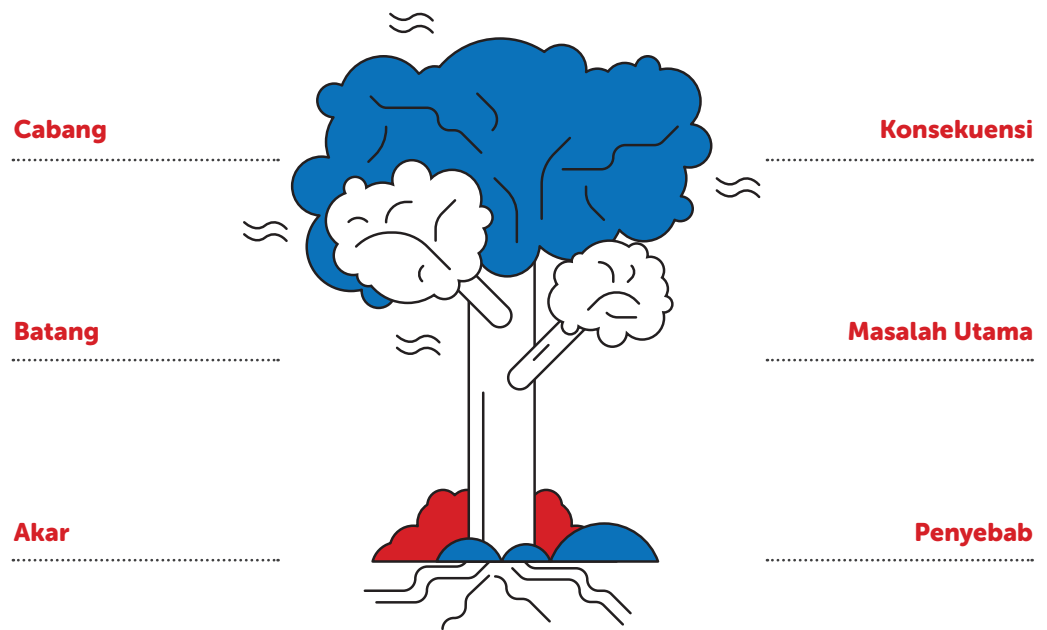
49

Segitiga ABC Galtung

- **Attitude - Sifat dalam berkonflik**
proses-proses di tataran kognisi (terkait persepsi) dan afeksi (terkait emosi) yang mempengaruhi bagaimana pihak-pihak yang berkonflik memahami akar konflik yang dihadapi serta menerjemahkan responnya dalam perilaku berkonflik yang spesifik
- **Behavior - Perilaku dalam berkonflik**
ekspresi yang ditunjukkan di tataran perilaku oleh pihak-pihak yang berkonflik, baik dengan kekerasan atau tanpa kekerasan
- **Contradiction - Akar konflik**
akar persoalan yang menyebabkan konflik terjadi, biasanya di level permukaan tampak disebabkan oleh perbedaan, walaupun jika dilihat lebih mendalam bisa jadi perbedaan yang ada disebabkan karena kelangkaan atau perubahan tertentu di dalam masyarakat

Konsep lain yang serupa dengan Segitiga ABC Galtung adalah pohon masalah. Dalam konsep ini, analogi pohon digunakan dalam membedah sebuah masalah. Seperti pohon, setiap masalah memiliki tiga hal:

- **akar** atau hal yang menyebabkan timbulnya sebuah masalah
- **batang** atau masalah utama itu sendiri, dan
- **cabang** atau akibat dari masalah yang timbul dari masalah tersebut.



Pohon masalah adalah alat analisis konflik yang membantu kita untuk mencari dan menyelesaikan akar masalah. Ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, kadang pandangan kita dikaburkan oleh hal-hal lain, seperti masalah utama dan akibatnya, sehingga kita lupa bahwa masalah ini memiliki akar atau penyebab utama yang perlu kita tangani. Karena itu, ketika kita berhadapan dengan konflik, kita harus hati-hati dan jangan cepat mengambil kesimpulan. Kita harus memahami masalah secara utuh agar tahu akar masalahnya. Menyelesaikan akar masalah tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tapi juga memungkinkan kita mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.

Setelah mendapatkan pemahaman bahwa konflik bersifat netral dan tidak semua konflik berujung pada kekerasan, kita tidak perlu takut ketika harus berhadapan dengan sebuah konflik. Berikut adalah beberapa kemampuan yang penting dimiliki dalam menangani sebuah konflik:

1. Mendengarkan dengan efektif.
2. Mengidentifikasi poin-poin ketidaksepakatan antara pihak yang berkonflik.
3. Mengekspresikan kebutuhan Anda dengan jelas.
4. Melihat konflik sebagai kesempatan untuk berkembang.
5. Fokus pada isu yang sedang dibahas dan tidak melakukan generalisasi atau memperkeruh situasi.



Catatan untuk fasilitator

Sisakan waktu, setidaknya lima (5) menit agar peserta memiliki kesempatan untuk bertanya di akhir presentasi.

Diskusi Singkat (20 menit)

Setelah memahami konsep konflik, peserta akan diajak untuk sejenak merefleksikan dan berbagi pemahaman. Seperti diskusi di awal sesi, sesi refleksi akan dilakukan secara individu (masing-masing) selama lima (5) menit dan sesi diskusi akan dilakukan di forum besar selama 15 menit. Diskusi bersifat singkat dan sukarela. Setidaknya dua (2) peserta dapat menceritakan pendapat dan pengalaman mereka terkait penanganan konflik. Setiap peserta yang bersedia menceritakan pendapat dan pengalamannya mendapatkan waktu maksimal lima (5) menit untuk berbagi cerita ke forum. Fasilitator atau peserta lain mendapatkan waktu tiga (3) menit untuk memberikan tanggapan. Bila memungkinkan, ajak peserta yang belum aktif dalam diskusi di awal sesi untuk bercerita.

Pertanyaan panduan yang dapat digunakan untuk diskusi ini adalah:

1. Sebagai guru, bagaimana saya mengelola konflik yang saya temui di sekolah? Apakah saya sudah mengelola konflik yang saya temui di sekolah dengan baik?
 - Apakah saya sudah mendorong pengelolaan konflik dengan solusi kreatif yang berorientasi pada pemecahan masalah?
 - Apakah saya sudah menunjukkan sikap nirkekerasan dalam mengelola konflik?
 - Apakah saya sudah menggunakan empati dalam pengelolaan konflik? Bagaimana saya menunjukkan atau melibatkan empati saya dalam pengelolaan konflik?
2. Apa yang belum saya lakukan untuk mendorong terjadinya pengelolaan konflik yang baik di sekolah? Apa yang menghalangi saya sehingga saya belum membantu proses pengelolaan konflik yang baik di sekolah?
3. Apakah saya menyadari bahwa posisi saya sebagai guru serta nilai-nilai pribadi yang saya anut mempunyai andil saat saya menilai dan membuat keputusan?
 - Bagaimana posisi saya sebagai mempengaruhi guru mempengaruhi keputusan atau penilaian saya terhadap konflik dan pihak yang terlibat?
 - Nilai-nilai pribadi apa yang mempengaruhi saya dalam membuat keputusan atau penilaian terhadap konflik dan pihak yang terlibat?
4. Apa yang bisa saya lakukan atau perlu saya kembangkan untuk mengelola konflik di sekolah dengan baik, baik konflik antar siswa, antar guru, maupun antara guru dan siswa?

Karena sifat pertanyaan yang disampaikan adalah refleksi diri (*self-reflection*) dan opini, fasilitator dapat menggali pengalaman peserta dan mendorong peserta untuk kritis dengan menanyakan hal-hal atau pernyataan yang dapat mendukung pernyataan peserta, sesuai dengan pertanyaan pengiring yang sudah disertakan di atas. Contoh: "Bagaimana Anda menunjukkan empati Anda dalam proses pengelolaan konflik?"

Studi Kasus (40 menit)

Setelah memahami konsep Segitiga ABC Galtung, kita akan menganalisis beberapa contoh kasus dengan menggunakan konsep Segitiga ABC Galtung. Pada kegiatan ini, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok sebaiknya beranggotakan maksimum lima (5) orang. Peserta dapat dibagi secara acak, dengan

memperhatikan gender dan tingkat keaktifan peserta dalam berpartisipasi. Setiap kelompok akan mendapatkan satu (1) kasus untuk dibedah dengan menggunakan konsep Segitiga ABC Galtung. Pada kasus yang berujung pada atau menyebabkan tindakan negatif atau yang tidak menunjukkan empati, minta kelompok untuk mengajukan setidaknya satu (1) alternatif solusi kreatif yang berorientasi pada pemecahan masalah dan menunjukkan empati.

Sebelum memulai diskusi studi kasus dalam kelompok, fasilitator dapat mengulang contoh cara menganalisis sebuah kejadian konflik dengan menggunakan konsep Segitiga ABC Galtung yang telah disampaikan saat presentasi (contoh penggunaan lapangan basket).

Setelah peserta dibagi ke kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok akan mendiskusikan studi kasus yang diterima selama 10 menit dalam kelompoknya. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan forum selama lima (5) menit. Fasilitator atau peserta lain mendapatkan waktu tiga (3) menit untuk memberikan tanggapan.

Studi kasus untuk kerja kelompok:

- 1. Studi kasus 1:** Masa jabatan Ketua OSIS SMA 999 angkatan 100 akan segera berakhir. Ada beberapa siswa yang tertarik untuk menjadi Ketua OSIS angkatan 101. Seperti tahun-tahun sebelumnya, OSIS mengadakan pemilihan terbuka (voting) yang melibatkan semua siswa SMA 999 untuk memilih Ketua OSIS angkatan 101. Kandidat dengan suara terbanyak akan terpilih menjadi Ketua OSIS SMA 999 angkatan 101. Sebelum pemilihan, setiap kandidat diberikan kesempatan untuk mengutarakan visi dan misinya di hadapan siswa, guru, dan staf sekolah.
 - *Contradiction* - akar konflik: perbedaan pandangan/visi para kandidat Ketua OSIS, perbedaan kepentingan kandidat untuk menjadi Ketua OSIS, perubahan - kekosongan posisi Ketua OSIS, terbatasnya posisi Ketua OSIS
 - *Behavior* - perilaku dalam berkonflik: nirkekerasan - menggunakan pemilihan terbuka yang melibatkan warga sekolah dalam memilih Ketua OSIS angkatan 101
 - *Attitude* - sifat dalam berkonflik: mencari solusi kreatif yang berorientasi pada pemecahan masalah, berempati dan mengakomodir kebutuhan semua pihak - demokratis, memberikan kesempatan bagi setiap kandidat untuk melibatkan warga sekolah (siswa, guru, dan staf) dalam proses pemilihan Ketua OSIS
- 2. Studi kasus 2:** Di SMA XYZ, hampir semua siswa perempuan menggunakan rok abu-abu panjang. Seorang siswa perempuan kelas 10 SMA XYZ menggunakan rok abu-abu pendek (sepanjang lutut) sebagai atribut seragam dan mendapatkan teguran dari pihak sekolah, meski tidak ada peraturan sekolah yang mewajibkan penggunaan rok panjang sebagai seragam.
 - *Contradiction* - akar konflik: perbedaan pandangan dan ekspektasi antara pihak sekolah dengan siswa - sekolah mengharapkan siswa perempuan tersebut untuk mengikuti teman-temannya dan menggunakan rok panjang, sementara siswa perempuan tersebut tetap menggunakan rok pendek

karena tidak ada peraturan sekolah yang mewajibkan penggunaan rok panjang

- *Behavior* - perilaku dalam berkonflik: kekerasan - sekolah menegur siswa perempuan karena menggunakan rok pendek, meski tidak ada peraturan yang mewajibkan penggunaan rok panjang
- *Attitude* - sifat dalam berkonflik: kekerasan - tidak berempati, tidak memberikan kesempatan pada siswa perempuan untuk menjelaskan alasannya, tidak mengakomodir kebutuhan siswa untuk mengekspresikan pandangan pribadi yang tidak konformis, meski pandangan tersebut tidak melanggar peraturan sekolah



Catatan untuk fasilitator

Fasilitator memiliki wewenang untuk memutuskan apakah sebaiknya istilah 'kekerasan' digunakan saat mengulas studi kasus ini karena istilah 'kekerasan' belum diperkenalkan. Istilah 'kekerasan' akan diperkenalkan pada sesi selanjutnya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan istilah 'kekerasan' pada studi kasus ini adalah pemahaman peserta (berdasarkan observasi dan dinamika penyampaian materi dan diskusi) serta waktu yang tersisa untuk sesi ini.

3. **Studi kasus 3:** Seorang siswa tidak dapat menerima rapor karena siswa tersebut belum melunasi SPP selama tiga (3) bulan terakhir. Konsekuensi ini sudah dituliskan dalam tata tertib sekolah yang disebar di awal tahun ajaran. Namun, tidak ada komunikasi antara sekolah dan orangtua/wali siswa: sekolah tidak memberikan surat peringatan ketika SPP tidak kunjung dibayar, sementara orangtua/wali siswa tidak pernah mencoba menyampaikan ketidakmampuan keluarga dalam melakukan pembayaran SPP ke pihak sekolah.

- *Contradiction* - akar konflik: ketidakmampuan orangtua/wali siswa dalam memenuhi kewajiban (pembayaran SPP), tidak adanya komunikasi antara sekolah dan orangtua/wali siswa
- *Behavior* - perilaku dalam berkonflik: kekerasan - tidak memberikan rapor yang menjadi hak siswa padahal siswa tidak memiliki andil dalam konflik ini

Catatan tambahan: Rapor adalah hak karena siswa telah memenuhi kewajiban sebagai siswa sesuai kapasitasnya, contoh: datang ke sekolah, mengerjakan tugas, mengikuti ujian. Siswa tidak memiliki kapasitas untuk memastikan pembayaran SPP. Pembayaran SPP adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtua/wali siswa.

- *Attitude* - sifat dalam berkonflik: kekerasan - tidak berempati, sekolah tidak memberikan kesempatan pada orangtua/wali siswa untuk menjelaskan mengapa mereka tidak membayar SPP, sementara orangtua/wali siswa tidak mengontak sekolah untuk menjelaskan alasan tidak dibayarnya SPP, tidak memenuhi hak siswa untuk mendapatkan rapor



Catatan untuk fasilitator

Fasilitator memiliki wewenang untuk memutuskan apakah sebaiknya istilah 'kekerasan' digunakan saat mengulas studi kasus ini karena istilah 'kekerasan' belum diperkenalkan. Istilah 'kekerasan' akan diperkenalkan pada sesi selanjutnya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan istilah 'kekerasan' pada studi kasus ini adalah pemahaman peserta (berdasarkan observasi dan dinamika penyampaian materi dan diskusi) serta waktu yang tersisa untuk sesi ini.

Saat mengulas hasil diskusi setiap kelompok, fasilitator perlu mengangkat setidaknya satu (1) hal positif yang dilakukan setiap kelompok. Hal positif dapat berupa proses diskusi kelompok yang dinamis, penilaian kritis dalam proses analisa, empati yang ditunjukkan kelompok terhadap kelompok yang dirugikan dalam konflik. Selain itu, fasilitator juga perlu mengingatkan bahwa suatu tindakan dapat dilihat sebagai beberapa sisi yang berbeda. Intoleransi adalah perilaku ekspresi (*behavior*) dan nilai yang mempengaruhi seseorang (*attitude*) ketika berhadapan dengan konflik. Hal ini akan dibahas dalam materi "Hubungan antara Segitiga ABC Galtung dan Intoleransi."

Apabila fasilitator ingin mempersingkat waktu, bila ada kelompok yang mendapatkan studi kasus yang sama, fasilitator dapat meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil. Setelah presentasi, fasilitator dapat bertanya ke kelompok yang tidak melakukan presentasi, "Apakah hasil diskusi kelompok Anda berbeda dengan kelompok presentasi? Bila ya, apa yang berbeda?" Bila tidak ada yang berbeda, fasilitator dapat memberikan tanggapan dan melanjutkan ke presentasi kelompok selanjutnya atau materi presentasi.

Materi presentasi (10 menit)

Hubungan antara Segitiga ABC Galtung dan Intoleransi

Bagaimana kita melihat tindak intoleransi dengan Segitiga ABC Galtung?

Segitiga ABC Galtung dapat membantu kita memahami intoleransi sebagai dua hal sekaligus. Pertama, intoleransi adalah sebuah perilaku kekerasan yang merupakan ekspresi yang muncul dalam menghadapi konflik (*behavior*) yang biasanya disebabkan atau berakar pada persoalan terkait perbedaan, kelangkaan, dan/atau perubahan (*contradiction*). Kedua, sebagai nilai-nilai yang mempengaruhi cara seseorang mempersepsikan dan merasakan kontradiksi tertentu (*attitude*) yang disebabkan atau berakar pada persoalan terkait perbedaan, kelangkaan, dan/atau perubahan (*contradiction*). Sikap yang didominasi nilai-nilai intoleran inilah yang lantas menjustifikasi pilihan seseorang untuk melakukan tindak intoleransi yang penuh kekerasan.



Catatan untuk fasilitator

Sisakan waktu, setidaknya lima (5) menit agar peserta memiliki kesempatan untuk bertanya di akhir presentasi.

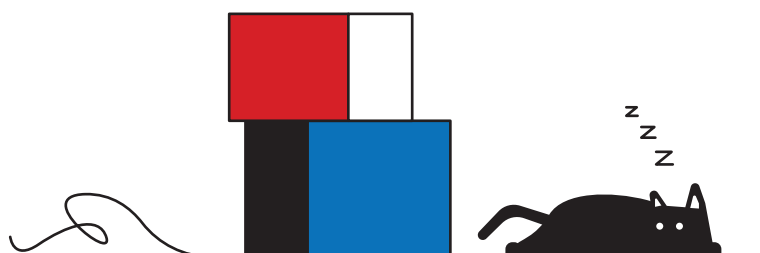


Pesan Inti

- Konflik adalah ketidakselarasan tujuan. Karena itu, konflik tidak sama dengan kekerasan.
- Pada dasarnya, konflik bersifat netral. Karenanya, jangan takut ketika berhadapan dengan sebuah konflik.
- Segitiga ABC Galtung membantu kita memahami akar, sifat, dan perilaku dalam berkonflik.
- Pengelolaan konflik yang baik akan mengedepankan empati pada kebutuhan setiap pihak yang berkonflik, sikap nirkekerasan dan keengganan untuk merespon dengan kekerasan dalam bentuk apapun, dan menemukan solusi kreatif yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving).

Referensi Pembelajaran Tambahan

Conflict Management. Communication Institute for Online Scholarship, 2002. <http://www.cios.org/encyclopedia/conflict/index.htm>.





Sub Sesi 02

Mengenal Kekerasan

Waktu

95 Menit

- Diskusi Singkat 10 menit
- Presentasi Konsep Kekerasan dan Relasi Kuasa 45 menit
- Studi Kasus 40 menit

Metode

Materi presentasi, diskusi, dan studi kasus

Diskusi singkat (10 menit)

Sebelum memulai materi, peserta akan diajak untuk melihat beberapa gambar tentang kekerasan dan memberikan pendapatnya. Untuk kegiatan ini, fasilitator dapat memanfaatkan fitur teknologi seperti Google Form atau poll yang terdapat pada Google Meet atau Zoom (bila kegiatan dilakukan dengan platform pertemuan virtual). Fasilitator akan menunjukkan beberapa gambar dan bertanya kepada peserta, "Apakah gambar ini menunjukkan kekerasan?". Peserta akan menjawab "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan gambar yang muncul. Bila memungkinkan, fasilitator akan menghitung berapa jumlah peserta yang menjawab "Ya" dan "Tidak" untuk setiap gambar. Setelah selesai menunjukkan semua gambar dan merangkum jumlah "Ya" dan "Tidak" untuk setiap gambar, ajak peserta untuk membandingkan jawaban mereka dan berdiskusi.

Sebelum menampilkan gambar-gambar, fasilitator harus menyampaikan *trigger warning* atau peringatan konten kepada peserta bahwa setidaknya fasilitator akan menampilkan gambar yang mengandung unsur kekerasan, namun tidak ada darah. Berikan kesempatan untuk peserta yang sensitif untuk tidak mengikuti kegiatan awal pada sesi ini. Peserta dapat kembali ketika diskusi telah selesai dan pemaparan materi akan dimulai.

Pertanyaan panduan yang dapat digunakan untuk diskusi ini adalah:

1. Apakah gambar ini menunjukkan kekerasan? Mengapa?
2. Untuk gambar yang sama (contoh: gambar X), apabila beberapa peserta memiliki jawaban berbeda (ada yang menjawab "Ya" dan ada yang menjawab "Tidak"): Mengapa Anda menjawab "Ya"? (Bertanya ke peserta lain) Mengapa Anda menjawab "Tidak"? Untuk gambar yang sama (gambar X), mengapa jawaban Anda berbeda dengan jawaban rekan Anda?
3. Untuk gambar yang berbeda (contoh: gambar X dan gambar Y), apabila ada peserta memiliki jawaban berbeda (ada yang menjawab "Ya" dan ada yang menjawab "Tidak"): Mengapa Anda menjawab "Ya" untuk gambar X dan "Tidak" untuk gambar Y?

Karena diskusi ini bertujuan untuk membuka sesi dan mengajak peserta untuk mulai berpikir mengenai kekerasan, sesi diskusi akan dilakukan di forum besar selama 10 menit. Diskusi bersifat singkat dan sukarela. Setidaknya dua (2) peserta dapat menceritakan pendapat mereka tentang gambar yang ditampilkan. Apabila hanya ada satu (1) orang yang bersedia menceritakan pendapatnya, fasilitator dapat sekilas menggali pendapat para peserta

sebagai forum dengan bertanya, “Apakah Anda setuju dengan pendapat peserta X bahwa gambar ini adalah (atau bukan) tindak kekerasan? Apakah ada yang memiliki pendapat berbeda?” Melalui diskusi singkat ini, kita akan mendapatkan gambaran umum mengenai perspektif awal para peserta terkait kekerasan.

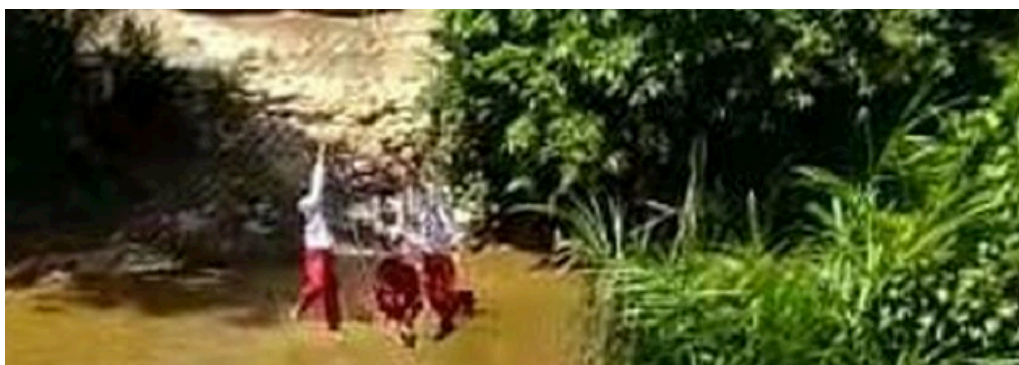
Gambar 1.

Perundungan terhadap siswi perempuan di sebuah SMP di Purworejo di awal 2020
Artikel pendukung sebagai referensi dapat dibaca [di sini](#).



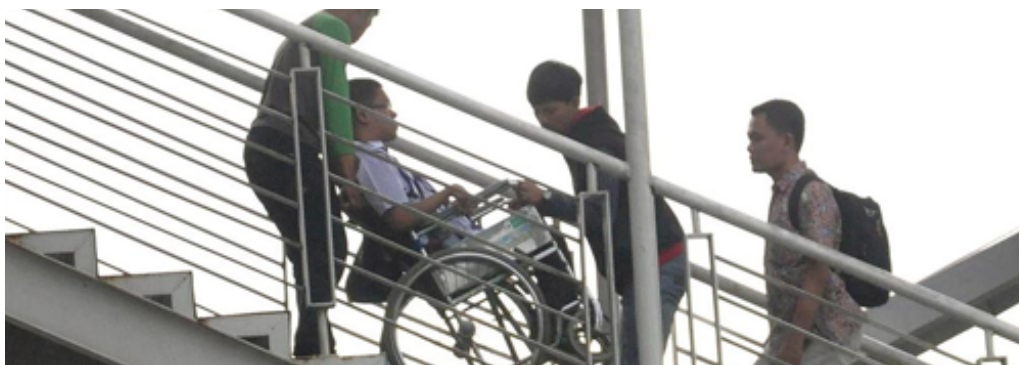
Gambar 2.

Siswa SD di Riau menggantung pada keranjang untuk menyeberang sungai ketika berangkat sekolah di awal Juni 2021



Gambar 3.

Seorang difabel yang menggunakan kursi roda dibantu oleh dua orang lainnya saat menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)



Gambar 4.

Pernikahan anak - sepasang anak di bawah usia 18 tahun menjadi pengantin di Makassar



Setelah diskusi, fasilitator dapat menyampaikan bahwa ketiga gambar tersebut menunjukkan tindak kekerasan: Gambar 1 menunjukkan kekerasan langsung, Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan kekerasan struktural, dan Gambar 4 menunjukkan kekerasan kultural. Penjelasan lebih lanjut mengenai kekerasan akan disampaikan pada pemaparan materi sesi ini.

Materi presentasi (45 menit)

Setelah memahami bahwa konflik tidak sama dengan kekerasan dan tidak harus berujung pada kekerasan, pertanyaan selanjutnya adalah: apa itu kekerasan? Galtung (1969) mengatakan bahwa kekerasan merujuk pada kondisi-kondisi kesenjangan yang menyebabkan seseorang tidak mampu merealisasikan potensi maksimumnya sebagai individu. Dari definisi ini, kita perlu memahami bahwa definisi kekerasan tidak terbatas pada tindakan yang menyebabkan kerusakan material atau fisik. Dalam Gambar 3 yang ditunjukkan dalam diskusi singkat di awal sesi, gambar tersebut menunjukkan kekerasan karena orang difabel tidak dapat secara mandiri menggunakan JPO yang ada. Meski orang tersebut dapat berpindah tempat sendiri dengan menggunakan kursi roda, dia masih membutuhkan bantuan orang lain atau harus tergantung pada orang lain ketika menggunakan JPO. Gambar 4 juga menunjukkan kekerasan karena anak yang seharusnya masih menikmati masa kanak-kanak dengan bermain dan belajar dan masih belum matang baik secara fisik dan mental harus hidup sebagai pasangan dan mengurus anak (apabila pasangan tersebut kemudian memiliki anak).

Mengapa kita perlu memahami konsep kekerasan?

Indonesia adalah negara yang besar dengan masyarakat yang plural. Beragam suku dan bahasa hidup sebagai satu bangsa memang menjadi salah satu keunikan Indonesia. Di saat yang sama, kita harus ingat bahwa perbedaan ini membuat kita rentan akan kesenjangan dan kekerasan. Kita sering mendengar berbagai cerita yang dialami oleh baik guru maupun siswa dalam memperjuangkan pendidikan, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). [Acara TV Kick Andy sering meliput cerita-cerita tersebut](#). Salah satu cerita menyorot seorang siswa di Papua yang harus berangkat jam 3 pagi agar bisa menumpang truk sawit dan kemudian berjalan kaki sepanjang lima (5) kilometer untuk mencapai sekolahnya. Kita juga telah melihat di Gambar 2 di awal sesi bahwa pada awal Juni 2021 masih ada siswa SD di Riau yang bergantung di keranjang untuk menyeberang sungai saat berangkat sekolah. Siswa-siswa ini adalah korban kekerasan karena mereka mengalami kondisi-kondisi kesenjangan, dalam hal ini kesenjangan infrastruktur, yang menghambat mereka dalam mendapatkan pendidikan demi merealisasikan potensi maksimumnya sebagai individu.

Kita pun juga merasakan bahwa di masa pandemi kesenjangan semakin nyata. Banyak siswa dan teman-teman guru mendapati bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kurang efektif. Wilayah-wilayah dengan infrastruktur yang kurang baik, biasanya di luar Jawa, memiliki jaringan internet yang kurang baik. Selain itu, tidak semua guru dan siswa memiliki gawai dan kemampuan finansial yang memadai untuk mengikuti kegiatan PJJ. Akibatnya kegiatan PJJ terhambat dan bahkan banyak guru dan siswa tetap harus hadir di sekolah.



Ingat

Pesan yang ingin disampaikan dari contoh-contoh di atas adalah adanya kekerasan struktural. Mungkin akan ada kecenderungan di antara peserta untuk bersyukur atas kondisi yang ada (kondisi peserta lebih baik daripada contoh-contoh dan maka patut disyukuri). Fasilitator sebaiknya menggali ini lebih lanjut agar peserta tidak salah menangkap pesan dan bisa memahami materi terkait Segitiga Kekerasan Galtung dan relasi kuasa.

Segitiga Kekerasan Galtung

Kesenjangan tersebut disebabkan oleh setidaknya tiga bentuk kekerasan yang digambarkan oleh Galtung melalui segitiga berikut:



Segitiga Kekerasan Galtung membantu kita memahami tindak intoleransi sebagai sebuah ekspresi berkonflik ketika seseorang dihadapkan pada perbedaan dapat menjelma menjadi kekerasan langsung, kekerasan struktural, maupun kekerasan kultural. Tiga bentuk kekerasan ini saling terhubung satu sama lain. Kekerasan struktural bisa memunculkan kekerasan langsung. Kekerasan struktural yang berlangsung terus-menerus dan dianggap normal, akhirnya menjadi kekerasan kultural. Kekerasan kultural juga bisa menimbulkan kekerasan langsung maupun struktural, dan sebaliknya.

Salah satu contoh kekerasan dalam tindak intoleransi melalui perspektif Segitiga Kekerasan Galtung adalah sebagai berikut.

Seorang siswa Tionghoa bisa jadi tidak mampu mencapai potensi maksimumnya karena bersekolah di sekolah yang intoleran, dimana ia sering dirundung oleh siswa yang lain (kekerasan langsung), sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah, seperti tidak mendapatkan pelajaran agama yang sesuai agamanya - misalnya Konghucu (kekerasan struktural), dan kedua bentuk kekerasan tersebut dilanggengkan oleh kultur yang memandang etnis Tionghoa sebagai pendatang yang harus selalu dinomorduakan (kekerasan kultural).

Karena sekolah tidak memenuhi kebutuhan pelajaran agama Konghucu, siswa Tionghoa tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dapat merealisasikan potensi maksimumnya sebagai individu. Menurut Galtung, siswa ini telah mengalami tindak kekerasan.

Pada contoh ini, fasilitator perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep kekerasan struktural dan kekerasan kultural yang dialami oleh siswa Tionghoa. Kekerasan langsung tidak perlu dibahas lebih lanjut karena contoh sudah menggambarkan dengan jelas. Fasilitator dapat memulai penjelasan mengenai kekerasan struktural dan kekerasan kultural dengan menggunakan konsep pemenuhan hak dan Segitiga ABC Galtung yang telah dibahas pada Sub Sesi 1 (Konsep Konflik).

- Kekerasan struktural yang dialami siswa Tionghoa menurut Segitiga ABC Galtung:
 - *Contradiction* - akar konflik: ketiadaan sumber daya (dan/atau keinginan) untuk memenuhi kebutuhan pelajaran agama siswa Tionghoa, tidak adanya guru yang memberikan pelajaran agama Konghucu untuk siswa Tionghoa
 - *Behavior* - perilaku dalam berkonflik: kekerasan - tidak memenuhi kebutuhan pelajaran agama siswa Tionghoa
 - *Attitude* - sifat dalam berkonflik: kekerasan - tidak mencari solusi kreatif yang berorientasi pada pemecahan masalah, tidak berempati dan mengakomodir kebutuhan siswa, tidak membuka komunikasi dengan siswa untuk mencari solusi alternatif. Selain itu mungkin ada hal-hal lain di pihak sekolah, seperti nilai-nilai yang dianut yang tidak tertulis dalam peraturan sekolah, yang menghambat proses penyediaan guru pelajaran agama untuk siswa Tionghoa
- Kekerasan kultural yang dialami siswa Tionghoa menurut Segitiga ABC Galtung:
 - *Contradiction* - akar konflik: ketiadaan sumber daya (dan/atau keinginan) untuk memenuhi kebutuhan pelajaran agama siswa Tionghoa, tidak adanya guru yang memberikan pelajaran agama Konghucu untuk siswa Tionghoa
 - *Behavior* - perilaku dalam berkonflik: kekerasan - kultur yang memandang etnis Tionghoa sebagai pendatang adalah warga nomor dua atau karena jumlah siswa beretnis Tionghoa yang sedikit di sekolah, sehingga pemenuhan kebutuhannya tidak menjadi prioritas

- *Attitude* - sifat dalam berkonflik: kekerasan - tidak mencari solusi kreatif yang berorientasi pada pemecahan masalah, tidak berempati dan mengakomodir kebutuhan siswa, tidak membuka komunikasi dengan siswa untuk mencari solusi alternatif. Hal ini juga dilanggengkan oleh kultur yang memandang bahwa etnis Tionghoa sebagai pendatang dan warga nomor dua.
- Konsep pemenuhan hak untuk siswa didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) no. 55 tahun 2007 pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama." Menurut PP ini, siswa Tionghoa seharusnya mendapatkan pendidikan agama Konghucu, terlepas dari jumlah siswa beretnis Tionghoa yang ada di sekolah tersebut. Apabila siswa ini adalah satu-satunya siswa beretnis Tionghoa dengan agama Konghucu, sekolah harus tetap berusaha memenuhi kebutuhan pelajaran agama/kepercayaan setiap siswa.

Fasilitator juga dapat menyampaikan beberapa contoh lain untuk mengilustrasikan tindak kekerasan. Salah satu contoh yang dapat dibagikan adalah kekerasan struktural yang kerap dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) yang menganut animisme (penghayat kepercayaan) atau beragama minoritas (contoh: Ahmadiyah) atau WNI transgender. Mereka masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebagai WNI yang hidup di Indonesia, KTP adalah dokumen penting untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan publik esensial seperti mendapatkan layanan BPJS Kesehatan dan membuka rekening bank. KTP juga dibutuhkan agar dapat menyuarakan hak politik sebagai pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketika seorang WNI tidak memiliki KTP, WNI tersebut tidak bisa mendapatkan layanan publik atau menjadi pemilih dalam pemilu atau pilkada.

Seperti gunung es, kekerasan langsung hanyalah ujung dari kekerasan struktural dan kultural yang biasanya lebih kompleks serta cenderung berkelindan dengan sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam contoh siswa etnis Tionghoa, kita telah melihat bagaimana sistem sosial dan budaya berperan dalam kekerasan. Akan tetapi, kita perlu mengingat ada faktor-faktor lain seperti ekonomi (yang terlihat jelas di masa pandemi dan daerah 3T) dan politik yang turut berperan dalam melanggengkan tindak kekerasan.



Ingat

Seperti yang telah disampaikan dalam sub-sesi sebelumnya, intoleransi adalah kekerasan.

Relasi Kuasa

Kuasa (atau *power*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang atau satu kelompok untuk melakukan apa yang diinginkan meski mendapatkan tantangan dari pihak lain (Weber 1978). Kuasa memiliki hubungan yang

erat dengan relasi kuasa karena kuasa hanya muncul ketika ada interaksi antara dua pihak dan ada unsur resistensi atau perlawanan atau timbal balik di setiap relasi kuasa (Foucault 1980). Kuasa biasanya bersifat otoritatif atau mendominasi karena mempengaruhi relasi antara pihak yang terlibat (Bernstein 1996). Kuasa dan relasi kuasa dapat ditemukan dalam hubungan antarmanusia yang ada di kehidupan kita sehari-hari, termasuk hubungan antara guru dan siswa. Pada bagian ini, kita akan membahas relasi kuasa yang terjadi antara guru dan siswa.

Mengapa kita perlu memahami konsep relasi kuasa, terutama antara guru dan siswa di sekolah? Menurut M. Y. Wong (2014), ada dua alasan utama:

1. Relasi kuasa antara guru dan siswa menggambarkan berbagai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa, dan membantu kita dalam memahami bagaimana kultur kuasa berperan dalam kehidupan sehari-hari.
 - Ruang kelas adalah wadah atau ruang kuasa di mana guru dapat menggunakan pengawasan dan disiplin sebagai sarana yang berpengaruh dalam menegakkan kuasanya
 - Kuasa guru atas siswa biasanya implisit atau tidak terlihat
 - Kuasa guru tidak selalu digunakan untuk mengontrol siswa; guru juga dapat membagi kuasanya dan bekerja sama dengan siswa
 - Melalui diskusi dan interaksi tanya jawab, hubungan antara guru dan siswa terus-menerus dibentuk dan berubah
2. Relasi kuasa antara guru dan siswa adalah miniatur atau cerminan dalam skala kecil dari relasi kuasa yang terjadi di masyarakat.

Menurut studi yang dilakukan oleh M. Y. Wong di Hong Kong, enam (6) faktor utama yang membentuk relasi kuasa antara guru dan siswa adalah:

1. Budaya menghormati dalam kebudayaan Tiongkok. Guru dipandang sebagai sosok yang lebih tua, senior, berpengalaman dan berwawasan luas, sehingga guru dan ajarannya harus dihormati. Apabila siswa memiliki pendapat yang berbeda dengan guru, siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pendapatnya karena takut dianggap mengganggu atau tidak sopan.
2. Budaya ujian. Budaya tradisional Tiongkok yang menekankan pentingnya mendapatkan nilai ujian yang tinggi masih berlaku di masyarakat Hong Kong dan membantu melanggengkan dominasi guru di sekolah. Tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi berdampak besar pada dinamika praktik pembelajaran di ruang kelas. Siswa tidak lagi mengedepankan eksplorasi, berpikir kritis, dan kreatif dalam proses belajar. Sementara guru menjadi sumber pengetahuan bagi siswa. Sayangnya, guru-guru juga masih mempertahankan budaya ini dengan menggunakan praktik mengajar yang memacu siswa mendapatkan nilai ujian yang tinggi.
3. Agama yang dianut sekolah. Dua dari empat sekolah yang diobservasi adalah sekolah yang berafiliasi dengan agama: satu sekolah Kristen dan satu sekolah Taoisme. Nilai-nilai agama dipromosikan tidak hanya di mata pelajaran agama, namun juga dalam

- kurikulum sekolah dan kegiatan sekolah yang merayakan ritual keagamaan. Contoh: kegiatan belajar mengajar dimulai dengan doa pagi. Dalam mata pelajaran agama, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara pemaparan materi satu arah dari guru ke siswa. Siswa diharapkan menerima, menerima, dan mengimani ajaran agama yang diterima dari guru agama tanpa proses diskusi. Siswa tidak berani mengajukan pertanyaan kritis tentang agama karena agama adalah hal yang kompleks dan memiliki otoritas yang tinggi. Hal ini membatasi kemampuan berpikir kritis para siswa dan tidak mempertimbangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa.
4. Reformasi kurikulum di Hong Kong yang mengedepankan partisipasi siswa dalam kelas (student-centric teaching) melalui kegiatan kelompok, permainan, berbagi pengalaman, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran di luar kelas, dan lain-lain. Salah satu tujuan dari reformasi kurikulum ini adalah untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara guru dan siswa yang sebelumnya didominasi oleh guru. Kegiatan belajar mengajar tidak lagi mengandalkan pemaparan materi satu arah dari guru ke siswa. Sekarang siswa juga dapat mengekspresikan pendapat mereka dalam kegiatan belajar mengajar.
 5. Mata pelajaran. Di Hong Kong, mata pelajaran pendidikan nilai (values education) seperti kewarganegaraan dan pendidikan pengembangan pribadi memberikan kesempatan lebih bagi siswa untuk membentuk kuasa yang dimilikinya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa mata pelajaran pendidikan nilai, meski menjadi bagian dari reformasi kurikulum, bukan mata pelajaran wajib (kecuali pendidikan pengembangan pribadi) dan sekolah memiliki keleluasaan dalam menentukan material dan metode pembelajaran, seperti penggunaan student-centric teaching dalam mata pelajaran pendidikan nilai (values education).
 6. Budaya sekolah yang diobservasi dalam studi. Setiap sekolah memiliki aturan dan budaya masing-masing. Aturan dan budaya ini memiliki dampak yang berbeda terhadap dinamika relasi kuasa antara guru dan siswa. Di sekolah yang menekankan disiplin, seperti adanya larangan untuk berdiri, bertanya, dan menjawab pertanyaan saat pelajaran berlangsung tanpa seizin guru, relasi kuasa antara guru dan siswa cenderung timpang dan menempatkan guru di posisi dominan. Lain dengan sekolah yang menerapkan reformasi kurikulum: relasi kuasa antara guru dan siswa lebih seimbang di lingkungan yang mengutamakan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.

63

Dari enam faktor di atas, budaya menghormati, ujian, dan agama sekolah menjadi faktor utama yang membentuk relasi kuasa yang timpang antara guru dan siswa di Hong Kong. Tiga faktor ini membatasi kuasa siswa, sehingga guru menjadi lebih dominan.

Dari studi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa bahwa salah satu penyebab relasi kuasa yang timpang antara guru dan siswa di sekolah di Hong Kong adalah pendekatan satu arah yang top-down (dari atas ke bawah atau dari guru ke siswa) dan tidak partisipatif. Pada pendekatan ini, siswa diharapkan pasif dan dianggap sebagai wadah kosong yang harus menerima apa pun yang disampaikan guru. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, seperti diskusi dan pendapat, tidak menjadi perhatian. Interaksi dua arah yang sehat antara guru dan siswa di mana kedua belah pihak saling mendengarkan, serta

mendorong/memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis dan mengekspresikan pendapatnya akan membantu menyeimbangkan relasi kuasa yang timpang.

Selain itu, perlu diingat bahwa relasi kuasa antara guru dan siswa lebih kompleks daripada yang terlihat. Dinamika relasi kuasa tidak ditentukan oleh enam faktor di atas saja. Interaksi antara enam faktor tersebut juga berperan dalam menentukan relasi kuasa antara guru dan siswa. Selain itu, ada berbagai faktor lain yang membentuk relasi kuasa antara keduanya, seperti latar belakang guru dan siswa (seperti agama, kelas sosial, suku, gender, etnis), kepribadian guru dan siswa, nilai-nilai yang dianut guru dan siswa, keinginan guru dan siswa dalam berinteraksi, dan sebagainya.

Dengan memahami konsep relasi kuasa, peserta (yang adalah guru) diharapkan dapat menyadari posisinya yang "cenderung dominan". Namun, karena kuasa terbentuk dari interaksi antara dua pihak dan bersifat dinamis, masih ada kesempatan untuk membentuk kembali relasi kuasa agar lebih seimbang. Setelah mendapatkan materi pelatihan ini, guru diharapkan dapat lebih berhati-hati saat berinteraksi dengan siswa dan mendorong/memfasilitasi siswa agar lebih partisipatif, demi terbentuknya relasi kuasa yang lebih seimbang.



Catatan untuk fasilitator

- Relasi kuasa juga dapat ditemukan dalam hubungan antarsiswa. Contoh: siswa dari keluarga berada memiliki sumber daya finansial yang lebih baik daripada siswa pada umumnya dan menjadi siswa yang menonjol. Ketika siswa ini berkonflik dengan siswa lain, guru harus mempertimbangkan adanya relasi kuasa yang timpang antara kedua siswa di mana siswa dari keluarga berada memiliki kuasa yang dominan.
- Dalam menghadapi konflik, metode resolusi konflik yang dipilih harus mempertimbangkan relasi kuasa antara dua pihak yang berkonflik. Mempertemukan kedua belah pihak tanpa mediasi tidak selalu menjadi pilihan yang terbaik, terutama ketika relasi kuasa antara kedua belah pihak timpang.

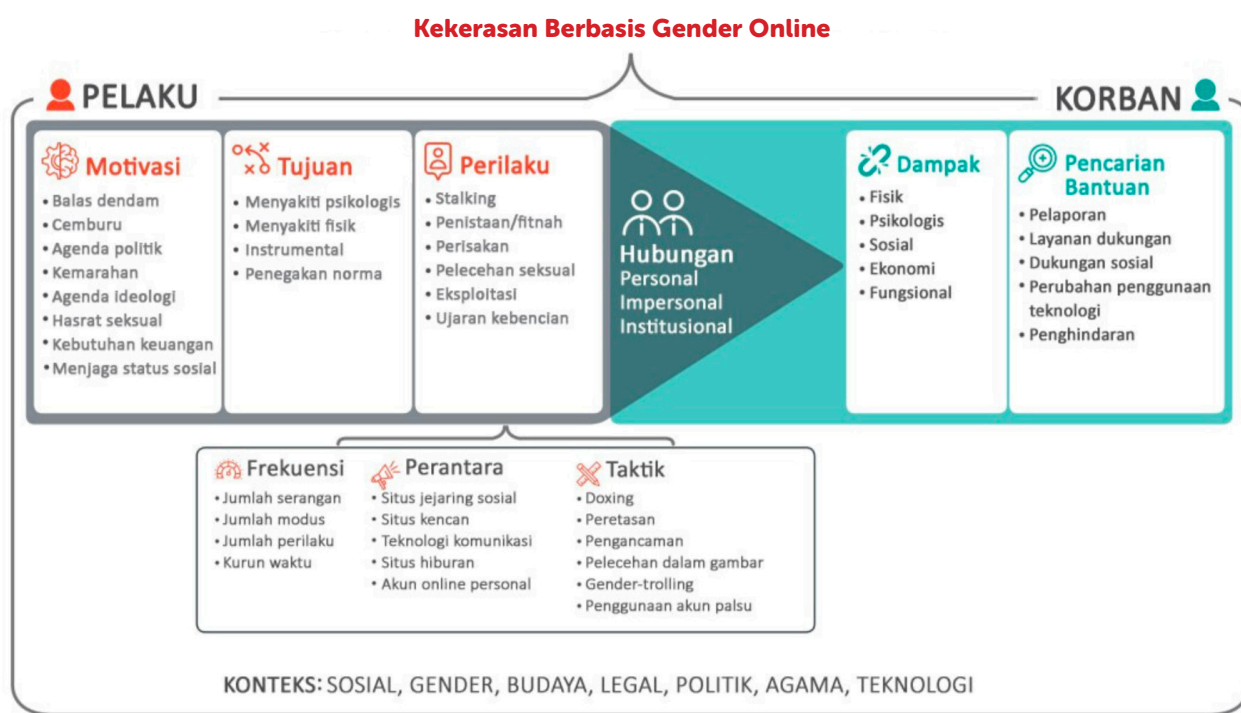
Bentuk Kekerasan Lain

Selain tiga kekerasan yang dibahas dalam Segitiga Kekerasan Galtung, kita perlu mengetahui bentuk-bentuk kekerasan lain yang juga sering terjadi di masyarakat, yaitu kekerasan berbasis gender (online) atau KBG(O) dan kekerasan seksual. Saat membahas kekerasan, perlu diingat bahwa, di samping kesenjangan, kekerasan juga terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi kuasa yang timpang

1. Kekerasan berbasis gender (online)

- Menurut UNHCR dan Panduan KBGO SAFEnet, kekerasan berbasis gender (KBG) adalah tindakan membahayakan yang ditujukan pada seseorang karena gender orang tersebut. Kekerasan berbasis gender mengakar dari ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kuasa, dan norma-norma yang membahayakan. KBG online (KBGO) adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia maya.

- Pada masa-masa krisis, termasuk pandemi, perempuan baik dewasa maupun anak-anak, semakin rentan menjadi korban KBG.
- KBG dapat berbentuk kerugian yang membahayakan seksual, fisik, mental, maupun ekonomi yang terjadi di ranah publik maupun privat. KBG juga bisa berbentuk kekerasan, koersi, kekerasan seksual, perkawinan anak, sunat perempuan, dan kejahatan demi kehormatan.
- KBG dapat berdampak kematian. Para penyintas biasanya memiliki trauma yang berdampak panjang pada hidupnya.
- KBG adalah pelanggaran serius atas hak asasi manusia dan adalah isu kesehatan dan perlindungan yang mengancam jiwa. Saat ini diestimasikan bahwa satu dari tiga perempuan akan mengalami kekerasan berbasis gender selama hidupnya. Di Indonesia sendiri, menurut data Komnas Perempuan, tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019. Untuk pengaduan kasus *cyber crime*, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 97 kasus di 2018 menjadi 281 kasus di 2019, atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Angka ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan.



© 2018 International Center for Research on Women (ICRW). All rights reserved.

2. Kekerasan seksual (WHO)

- Menurut WHO, kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk melakukan dan memperoleh tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan, atau diarahkan untuk memperdagangkan/memanfaatkan, seksualitas seseorang dengan paksaan, oleh siapapun terlepas dari hubungan orang tersebut dengan korban, dalam situasi apapun, termasuk namun tidak terbatas pada lingkungan rumah dan lingkungan kerja.



Ingat

Bedakan antara KBG(O) dan kekerasan seksual.

Catatan tambahan

- Fasilitator dapat menyertakan beberapa kutipan atau ayat dari berbagai agama yang mengecam kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan metode nirkekerasan dalam menghadapi konflik selama pemaparan materi atau diskusi. Beberapa contoh ayat yang dapat digunakan:
 - Islam - ayat yang mengecam ketidakadilan dan kekerasan: "Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih". (Q.S. asy-Syurâ [42]:42)
 - Kristen - ayat yang mendorong berlaku adil, terutama terhadap kelompok yang membutuhkan: "Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam; ia mengharapkannya, karena ia orang miskin; supaya ia jangan berseru kepada TUHAN mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu." (Ulangan 24:14-15)
 - Kristen - ayat yang mendorong penggunaan metode nirkekerasan dalam menghadapi konflik: "Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." (Matius 5:38-39)
 - Ingat: Dalam memilih kutipan ayat agama, fasilitator perlu mengecek kembali dan memperhatikan konteks dari ayat tersebut.
- Fasilitator dapat menyertakan beberapa contoh kejadian di Amerika Serikat selama pemaparan materi atau diskusi. Salah satu contoh kejadian yang dapat digunakan:
 - Kasus kekerasan dalam bentuk penyerangan terhadap orang-orang Asia-Amerika (warga negara Amerika yang memiliki garis keturunan Asia) semakin marak sejak awal pandemi di 2020. Salah satu faktor yang menyebabkan jumlah kasus penyerangan meningkat adalah stigma pembawa virus yang dikaitkan dengan orang Asia, termasuk orang Asia-Amerika.
 - Ingat: Dalam memilih kejadian tindak intoleransi, fasilitator perlu mengecek kembali dan memperhatikan konteks dan relasi kuasa dari kejadian tersebut mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu." (Ulangan 24:14-15)
- Fasilitator dapat menyertakan beberapa contoh yang terkait dengan mata pelajaran tertentu.



Pertanyaan kritis untuk refleksi diri

- Contoh tindak kekerasan apa yang pernah saya jumpai atau dengar di sekolah?
- Apakah saya sering membiarkan tindakan seperti olokan antar siswa dengan menganggapnya sebagai tindakan yang normal antarteman dan sebuah “fase” atau “tahap” sementara yang akan selesai ketika mereka dewasa?
- Sebagai guru yang memiliki otoritas lebih daripada siswa, apakah saya sudah berkontribusi dalam menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa, baik perempuan maupun laki-laki, baik miskin maupun kaya, dari latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda?
- Sebagai guru, apakah saya pernah memberikan label atau memiliki asumsi atas siswa tertentu karena latar belakang atau nilai yang dianut atau penampilan siswa tersebut berbeda dari saya dan/atau siswa kebanyakan? Bila ya, tindakan apa yang saya ambil?

Studi Kasus (40 menit)

Setelah memahami konsep kekerasan, kita akan menganalisa beberapa contoh kasus dengan menggunakan konsep kekerasan. Pada kegiatan ini, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok sebaiknya beranggotakan maksimum lima (5) orang. Peserta dapat dibagi secara acak, dengan memperhatikan gender dan tingkat keaktifan peserta dalam berpartisipasi. Setiap kelompok akan mendapatkan satu (1) kasus untuk dibedah dan mengidentifikasi jenis kekerasan yang terjadi dengan menggunakan konsep Segitiga Kekerasan Galtung (kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung) dan jenis-jenis kekerasan yang telah dipelajari pada sub sesi ini (KBGO dan kekerasan seksual).

Setelah peserta dibagi ke kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok akan mendiskusikan studi kasus yang diterima selama 10 menit dalam kelompoknya. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan forum selama lima (5) menit. Fasilitator atau peserta lain mendapatkan waktu tiga (3) menit untuk memberikan tanggapan, seperti menanyakan, “mengapa kejadian ini adalah contoh kekerasan seksual?”

Apabila fasilitator ingin mempersingkat waktu, bila ada kelompok yang mendapatkan studi kasus yang sama, fasilitator dapat meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil. Setelah presentasi, fasilitator dapat bertanya ke kelompok yang tidak melakukan presentasi, “Apakah hasil diskusi kelompok Anda berbeda dengan kelompok presentasi? Bila ya, apa yang berbeda?” Bila tidak ada yang berbeda, fasilitator dapat memberikan tanggapan dan melanjutkan ke presentasi kelompok selanjutnya atau materi presentasi.

Studi kasus untuk kerja kelompok:

1. **Studi kasus 1:** Tidak adanya fasilitas untuk siswa difabel di sekolah, meski ada seorang siswa difabel yang sudah dua tahun bersekolah di sekolah tersebut.
 - a. Contoh tindak kekerasan struktural karena tidak adanya fasilitas yang memadai (atau belum ada usaha dari sekolah untuk menyediakan fasilitas) untuk siswa difabel.

- b. Contoh tindak kekerasan kultural karena ableism atau abilisme. Ableism atau abilisme adalah diskriminasi atau prasangka sosial terhadap penyandang disabilitas. Abilisme tidak selalu terang-terangan, dan bisa berakar dari kesalahpahaman atau bahkan niat baik.
- c. Kita perlu berhati-hati dalam menanggapi tanggapan atau respon dari korban kekerasan dalam proses penyelesaian masalah.
 - Apabila siswa disabilitas memutuskan untuk tidak diberi fasilitas, apakah dia benar-benar merasa tidak apa-apa? Mungkin sebenarnya dia tidak ingin merepotkan pihak sekolah. Kita juga perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa siswa difabel ini sudah terbiasa dengan tidak tersedianya fasilitas yang menunjang aksesibilitas siswa, sehingga siswa merasa proses pengadaan ini merepotkan pihak sekolah. Alasan ini tidak dapat dibenarkan. Sekolah tetap harus mengutamakan aksesibilitas siswa tanpa diminta.
 - Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan relasi kuasa antara siswa difabel dan siswa lainnya atau pihak lain di sekolah. Apakah siswa difabel takut diganggu teman-temannya apabila dia mendapatkan perlakuan khusus? Atau siswa difabel merasa tidak berhak meminta sekolah menyediakan fasilitas penunjang untuk satu-satunya siswa difabel di sekolah tersebut?

2. **Studi kasus 2:** Favoritisme terhadap siswa tertentu. Siswa laki-laki X mendapatkan nilai yang bagus dan perlakuan khusus lainnya dari guru-guru karena orangtuanya adalah donatur sekolah.
 - a. Contoh tindak kekerasan kultural yang menghormati donatur atau pihak yang memberikan sumbangan sehingga siswa X mendapatkan perlakuan khusus dan siswa lain tidak.
 - b. Favoritisme ini berpotensi menjadi contoh tindak kekerasan langsung.



Pesan Inti

- Kekerasan adalah kondisi-kondisi kesenjangan yang menyebabkan seseorang tidak mampu merealisasikan potensi maksimumnya sebagai individu.
- Ada beragam jenis kekerasan. Menurut Galtung, ada kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung. Selain itu, ada kekerasan berbasis gender (online) dan kekerasan seksual.
- Kekerasan tidak terbatas pada tindakan yang menyebabkan kerusakan material atau fisik.
- Intoleransi adalah kekerasan.
- Dalam menghadapi konflik, penting untuk tidak menghadapi konflik dengan tindak kekerasan, karena kekerasan akan membuahkan kekerasan lain.



Referensi Pembelajaran Tambahan

- Hunt, Luke. "Indonesia Records Its First Honor Killing." – The Diplomat. for The Diplomat, June 3, 2020. <https://thediplomat.com/2020/06/indonesia-records-its-first-honor-killing/>.
- Sharp, Gene. 198 Methods of Nonviolent Action. Albert Einstein Institution, 2017. <https://www.brandeis.edu/peace-conflict/pdfs/198-methods-non-violent-action.pdf>.



Sub Sesi 03

Konflik & Kekerasan

Waktu

25 Menit

Metode

Pengisian lembar kerja

Pengisian Jurnal dan Gagasan (25 menit)

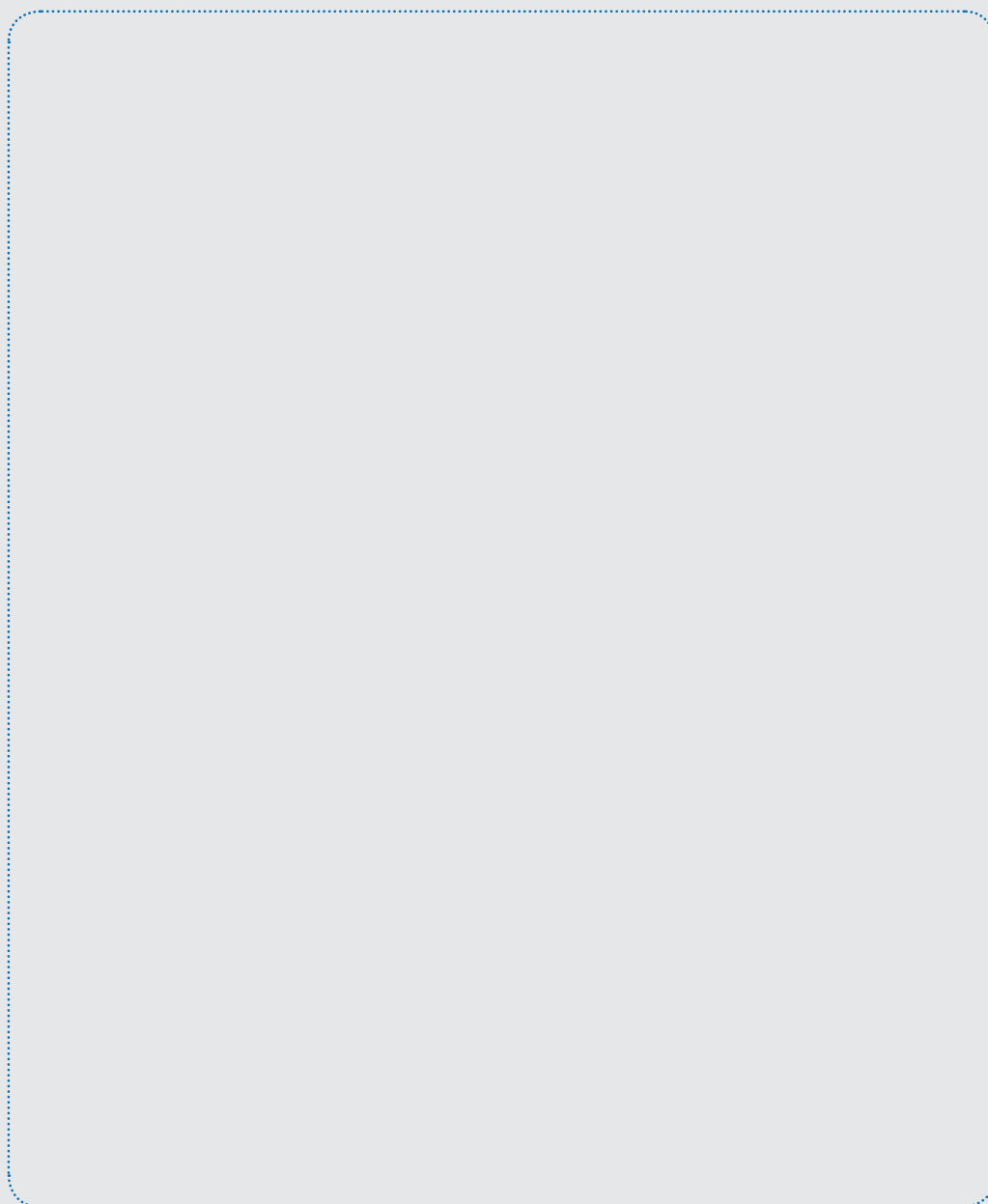
Setelah seluruh sesi pembelajaran serta studi kasus dipelajari, Anda diharapkan mengisi lembar kerja jurnal (journaling) untuk merekam pengalaman Anda terkait topik Konflik dan Kekerasan. Terdapat tiga bagian yang perlu dilengkapi:

1. **Apa yang Saya Lihat:** Anda diminta untuk menceritakan satu (1) pengalaman yang pernah Anda lihat, amati, atau alami terkait topik yang dibicarakan.
2. **Apa Perasaan Saya:** Anda diminta untuk mengungkapkan perasaan Anda terkait peristiwa tersebut.
3. **Apa Pendapat Saya:** Anda diminta untuk memberikan pendapat terkait peristiwa yang terjadi, dapat mencakup kritik atau saran demi perbaikan situasi tertentu.

| Apa yang Saya Lihat? | Apa Perasaan Saya? | Apa Pendapat Saya? |
|---|--|--|
| <p>Contoh: sekolah ini memiliki sistem moving classroom (sistem pindah ruang kelas). Saya melihat siswa yang difabel gerak mengalami kesulitan ketika harus pindah ke ruang kelas di lantai yang berbeda. Siswa ini selalu ditemani dan dibantu oleh beberapa temannya ketika harus pindah ruang kelas.</p> | <p>Contoh: saya tidak nyaman, sedih melihat siswa ini mengalami kesulitan setiap ada kebutuhan pindah ruang kelas. Namun saya lega melihat siswa ini memiliki teman yang peduli - teman-teman ini selalu menemani dan membantunya.</p> | <p>Contoh: meski siswa ini selalu mendapatkan bantuan dari teman-temannya, seharusnya dia tidak perlu selalu mengalami kesulitan ini.</p> <p>Setelah memahami konsep kekerasan, siswa ini mengalami kekerasan struktural karena dua hal: 1) sekolah ini tetap memberlakukan sistem pindah ruang kelas meski ada siswa difabel gerak yang akan mengalami kesulitan setiap kali para siswa harus pindah ruang kelas dan 2) sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk siswa difabel.</p> <p>Sebagai guru, yang bisa saya lakukan adalah mendorong agar kelas siswa difabel gerak ini tidak perlu melakukan sistem pindah ruang kelas. Bila memungkinkan, saya akan mendorong sekolah untuk membangun fasilitas pendukung untuk siswa difabel.</p> |

Gagasan

Tentu kita menyadari bersama bahwa modul ini bukanlah modul yang sempurna dan telah mencakup semua pembelajaran yang Anda butuhkan. Untuk menengahi hal tersebut, Anda dapat menambahkan ide, gagasan, informasi penting, fakta baru, pertanyaan, saran, kritik, maupun yang lainnya terkait pembelajaran Konflik dan Kekerasan. Partisipasi Anda untuk menyempurnakan modul ini sungguh sangat berarti! Silakan tulis gagasan Anda di kolom di bawah ini!





Kuis Akhir

Setelah pembelajaran mengenai Konflik dan Kekerasan selesai, Anda diharapkan mengisi kuis akhir berikut ini.

Nama :

Gender :

Usia :

Provinsi :

Tempat tinggal :

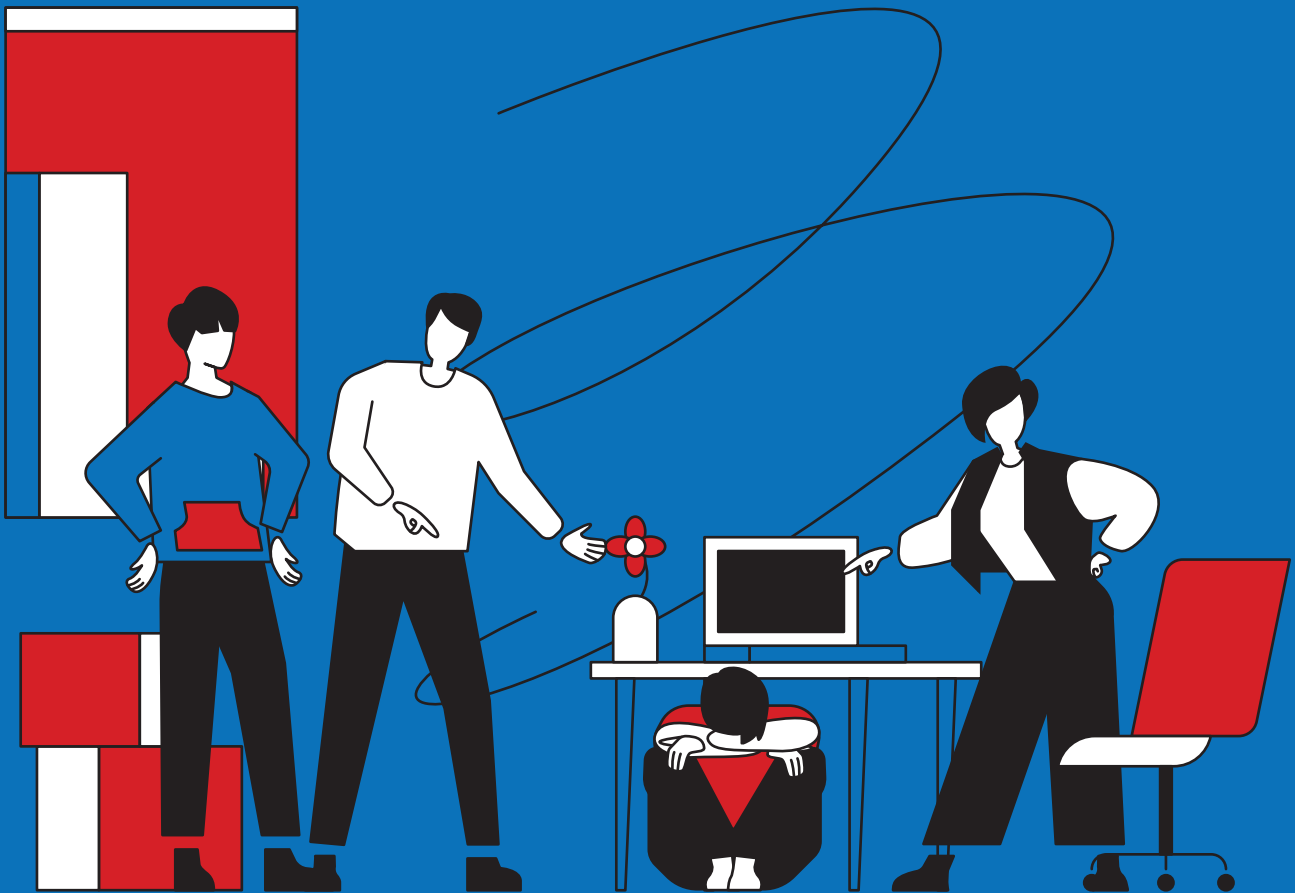
Silakan beri tanda silang (X) pada kolom "Benar" atau "Salah" terhadap setiap pernyataan sesuai dengan apa yang Anda ketahui.

| No | Pernyataan | Benar | Salah |
|----|---|-------|-------|
| 1 | Konflik terjadi ketika dua pihak tidak sepaham dan mengakibatkan kerusakan atau kekerasan | | |
| 2 | Konflik harus dihindari | | |
| 3 | Segitiga ABC Galtung menggambarkan tiga aspek konflik: <i>attitude, behavior, communication</i> | | |
| 4 | Menurut Galtung, ada tiga jenis kekerasan: kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural | | |
| 5 | Siswa beragama Konghucu tidak mendapatkan pelajaran agama karena tidak ada guru adalah salah satu contoh tindak kekerasan | | |
| 6 | Secara umum, guru dan siswa memiliki relasi kuasa yang setara di sekolah | | |

Bab 03.

Intoleransi di Indonesia

72



Intoleransi di Indonesia

| | |
|---------------|---|
| Bab | Intoleransi di Indonesia |
| Durasi | 225 menit |
| Metode | <ul style="list-style-type: none"> - Presentasi Materi - Studi Kasus - Diskusi Terbuka - Pre-Posttest - Film - Games |
| Tujuan | <ul style="list-style-type: none"> Mengeksplorasi pengalaman guru mengenai toleransi/intoleransi di lingkungannya. Memahami akar masalah intoleransi di Indonesia. Mendorong keterlibatan guru dalam membangun ekosistem sekolah yang toleran/inklusif |
| Indikator | <ul style="list-style-type: none"> Peserta mampu mengidentifikasi peristiwa atau kasus intoleransi Peserta memahami konstruksi dibalik kasus intoleransi Peserta berkomitmen untuk menjadi agen perubahan untuk membangun lingkungan yang toleran |
| Pokok Bahasan | <ul style="list-style-type: none"> Identifikasi Kasus Intoleransi Memahami Identitas Radikalisme dan Intoleransi Ketahanan Masyarakat dan Keluarga |
| Verifikasi | <ul style="list-style-type: none"> Hasil asesmen awal dan akhir Hasil lembar kerja jurnal dan gagasan Hasil feedback pernyataan komitmen peserta guru |
| Persiapan | <ul style="list-style-type: none"> Materi Presentasi Film Pertanyaan Kunci Bahan bacaan Pre-posttest |



Sub Sesi 01

Identifikasi Kasus Intoleransi

Waktu

45 Menit

- Diskusi Identifikasi Kasus Intoleransi 20 menit
- Tipologi Respon terhadap Masalah 15 menit
- Definisi Sikap 10 menit

Metode

Studi kasus dan diskusi kelompok

Diskusi Identifikasi Kasus Intoleransi Di Sekolah

Pada sesi awal ini, penting bagi peserta untuk mengenali berbagai peristiwa intoleransi di sekitar mereka serta mendiskusikannya secara bersama. Sesi ini untuk mengantarkan pemahaman peserta pada ragam pengalaman yang mereka kenali. Peserta dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi kasus intoleransi terutama di lingkungan sekolah. Masing-masing kelompok memutuskan perwakilan yang akan mempresentasikan pendapat mereka mengenai 1 kasus yang dipilih oleh kelompok. Masing-masing kelompok akan memilih sebuah peristiwa yang menurut anggota kelompok adalah peristiwa intoleransi. Pada tahap ini mungkin terjadi perbedaan penilaian peserta mengenai peristiwa tersebut tentang apakah terjadi intoleransi atau tidak, Fasilitator akan mencatat poin-poin diskusinya untuk diulas lebih jauh di akhir sesi.

Peserta mendiskusikan kronologi dan latar belakang serta dampak dari terjadinya peristiwa tersebut. Pilihan studi kasus berasal dari pengalaman empirik peserta, atau sebuah peristiwa yang menjadi sorotan yang dikenali (informasinya memadai) oleh anggota kelompok. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh setiap kelompok adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa intoleransi apa yang Anda pilih sebagai studi kasus kelompok, mengapa memilihnya?
2. Bagaimana gambaran peristiwanya? Gunakanlah prinsip penggalian informasi secara sederhana 5W1H (*When, Where, What, Why, Who, How*)?
3. Apakah satu kasus tersebut memiliki hubungan dengan kasus lainnya?
4. Ketika terjadi di lingkungan Anda (sekitar tempat tinggal atau sekolah), bagaimana Anda maupun sekolah Anda menyikapinya?
5. Apa yang dapat Anda pelajari dari kasus tersebut?

Untuk lebih mendalami sebuah kasus, ada baiknya fasilitator mengelaborasi topik latihan pada sesi sebelumnya mengenai konflik dan kekerasan, dihubungkan dengan topik latihan sesi ini, untuk melihat kedalaman analisis setiap kasus yang diangkat oleh peserta. Setelah diskusi, fasilitator meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dalam forum diskusi terbuka.

Fasilitator kemudian melanjutkan pada tipologi respon alamiah manusia ketika menghadapi permasalahan. Topik lanjutan ini merupakan upaya untuk menjembatani

pengetahuan peserta dengan bentuk perubahan sikap yang diharapkan dari pelatihan ini.

Tipologi Respon terhadap Masalah

Cobalah masing-masing Anda, menjelaskan secara umum peristiwa atau masalah intoleransi apa saja yang pernah Anda alami atau Anda saksikan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana Anda menghadapi dan mengelolanya. Cobalah Anda refleksikan secara individual, tulis dalam sticky note lalu tempelkan sebagai artefak dalam room yang senantiasa dapat dilihat dan disimak oleh setiap orang yang terlibat dalam pelatihan ini. Sebagai pengantar, fasilitator akan mengajukan 2 (dua) pertanyaan;

1. Apa respon terburuk Anda ketika menghadapi masalah intoleransi? Tuliskan sebanyak yang Anda ingat.
2. Apa respon terbaik Anda ketika menghadapi masalah intoleransi? Tuliskan sebanyak yang Anda ingat.

Patut Anda perhatikan, pertanyaan tersebut mesti dijawab berdasarkan pengalaman empirik Anda, bukan berdasarkan pengamatan terhadap orang lain. Sebab dapat dipastikan bahwa sebagai peristiwa alamiah, setiap individu pasti pernah mengalami masalah meski tentu dalam berbagai level. Pertanyaan ini penting untuk diajukan karena menyangkut hal fundamental menyangkut cara mempersepsikan dan bertindak dalam situasi tertentu terlebih lagi krisis, hal yang kita bahas dalam pelatihan ini.

Pada hakikatnya terdapat tiga bentuk respon manusia pada saat berhadapan dengan masalah/konflik. Respon tersebut merupakan respon yang natural, respon awal yang didasarkan pada pikiran bawah sadar kita. Respon tersebut adalah:

1. **Agresif/irasional**, respon ini biasanya muncul karena adanya kepercayaan lebih, dan bisa menang (mengalahkan orang lain). Respon ini bisa dilihat dalam bentuk nyata berupa tindakan yang cenderung merusak dan menyerang lawan yang dianggap membuat konflik atas masalah. Respon ini banyak dipengaruhi oleh pertimbangan emosional negatif seperti kemarahan, kebencian, dan dendam, pada kondisi nyata tindakan ini banyak dilakukan secara spontan dan sedikit menggunakan pertimbangan pemikiran. Karena ada masalah kemudian muncul parang, pedang, memukul, melukai dan mengharapkan konflik cepat selesai dengan menyerang dan mengalahkan pihak lain.
2. **Lari/diam**, respon ini terlihat nyata melalui tindakan lari dari persoalan yang dihadapi, mengecilkan sebuah masalah atau konflik untuk sekedar menenangkan diri namun tidak ada tindakan nyata untuk menyelesaikannya. Pada sisi lain diam juga disamakan dengan lari karena tidak melakukan sesuatu dan membiarkan sesuatu terjadi tanpa berusaha untuk menyelesaikan permasalahan. Tindakan diam bisa dilakukan karena kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu, atau karena ancaman keselamatan yang luar biasa menjadikan ketidakberdayaan untuk menyelesaikan masalah. Namun terkadang ada juga yang diam karena hanya ingin menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan permasalahan terjadi, yang penting tidak mengganggu kepentingan dia.

3. **Menghadapi dan mengelola masalah**, tindakan ini sering disebut dengan tindakan yang rasional, karena tindakan yang dilakukan mengedepankan pertimbangan pemikiran yang rasional. Menghadapi artinya mendudukan permasalahan/konflik secara proporsional tidak berlebihan dan memunculkan komitmen untuk merespon permasalahan/konflik dengan penuh pertimbangan pemikiran untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Mengelola artinya mendorong permasalahan/konflik diarahkan pada penyelesaian yang meminimalkan kekerasan dan memaksimalkan kepentingan dan hubungan antara stakeholder (para pihak) yang bermasalah/konflik

Berpijak pada 3 (tiga) tipologi sikap di atas, kita tentu berharap bahwa sebagai pendidik, para peserta pelatihan bersedia memilih dari tipologi yang agresif/irasional dan lari/diam, menuju tipologi menghadapi dan mengelola masalah. Hal ini akan sangat menentukan dalam cara peserta menyusun bahan pembelajaran yang sensitif terhadap isu toleransi..

Definisi Sikap

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi (senang – tidak senang, setuju – tidak setuju, baik – tidak baik, dan sebagainya). Newcomb, seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain, fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, merupakan faktor predisposisi perilaku (reaksi tertutup).

Komponen Pokok Sikap

Menurut Allport (1954) sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu :

- Kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap obyek, artinya bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek. Contoh: saya yakin ponsel Android lebih baik ketimbang iPhone.
- Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap objek, artinya bagaimana penilaian (terkandung didalamnya faktor emosi) orang tersebut terhadap objek. Contoh: saya lebih suka memakai ponsel Android ketimbang iPhone.
- Kecenderungan untuk bertindak (*tend to behave*), artinya sikap adalah merupakan komponen yang mendahului tindakan atau perilaku terbuka. Sikap adalah angsang-angung untuk bertindak atau berperilaku terbuka (tindakan). Contoh: saya akan membeli ponsel Android ketimbang iPhone.

Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (*total attitude*). Dalam menentukan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan dan emosi memegang peran penting. Seperti halnya pengetahuan, sikap juga memiliki tingkatan berdasarkan intensitasnya, yaitu: menerima (*receiving*), menanggapi (*responding*), menghargai (*valuing*), bertanggungjawab (*responsible*).



Sub Sesi 02

Memahami Identitas

Waktu

60 Menit

- Mengenal Identitas Diri 20 menit
- Presentasi dan Diskusi Materi Identitas 20 menit
- Film 20 menit

Metode

Presentasi, diskusi, dan film

Mengenal Identitas Diri

Sebelum memulai diskusi mendalam dan presentasi materi seputar identitas, ada baiknya sesi ini dimulai dengan kuis mengenal identitas diri. Peserta dipersilakan menyiapkan alat tulis untuk menjawab semua pertanyaan terkait identitas yang melekat pada diri mereka. Jawaban yang ditulis nantinya tidak akan dibagikan kepada peserta yang lainnya, hanya menjadi catatan pribadi dalam permainan ini. Pertanyaan mencakup:

- Apa etnis atau suku Anda? Apakah Anda bersuku Jawa, Sumatra, Bugis, Gorontalo, Batak, Minang, atau yang lainnya?
- Berapa usia Anda? Apakah Anda tergolong usia muda atau dewasa?
- Apa agama atau kepercayaan Anda? Apakah Anda Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau kepercayaan lainnya?
- Apakah Anda tinggal di kota atau di desa/kabupaten?
- Apa identitas gender Anda? Apakah Anda perempuan, laki-laki, trans perempuan, trans laki-laki, atau gender lainnya?
- Apakah Anda memiliki disabilitas tertentu? Contoh: Tuli, Bisu, Buta, disabilitas fisik, atau yang lainnya?

Identifikasi identitas diri ini sangat penting dilakukan agar peserta dapat memposisikan diri saat membahas relasi kuasa dan politik identitas yang akan dibahas lebih dalam di sesi ini.

Identitas

Sesi ini akan menekankan pembahasan tentang dasar-dasar pembentukan identitas, serta bagaimana identitas tersebut dimanifestasikan. Pertanyaan yang bisa diajukan oleh Fasilitator untuk memantik diskusi adalah:

1. Apa itu identitas?
2. Bagaimana dan mengapa identitas itu dibentuk, dan atas pertimbangan apa?
3. Apa tujuan dan fungsi identitas?

Fasilitator juga bisa memantik normativitas yang sangat dikenali oleh peserta, misalnya dengan mengajukan pertanyaan tentang pandangan teologis mereka dengan mengutip sumber kitab suci yang menjelaskan tentang bagaimana identitas terbentuk dan ditujukan. Diskusi bisa dikembangkan di sini.

Dari sisi teoritik, terdapat banyak teori yang dikembangkan mengenai identitas, mulai dari yang esensialis, yang memandang bahwa identitas itu merupakan sesuatu yang diwarisi, inheren dalam diri seseorang (*given*), sampai pada teori yang menunjukkan identitas sebagai sesuatu yang terus mengalami reformulasi, rekonstruksi, negosiasi, dan perubahan. Fasilitator bisa mengembangkan diskusi yang lebih kritis dalam topik ini untuk kemudian diletakkan dalam konteks ekspresinya di ruang publik.

Ekspresi identitas di ruang publik, seperti dalam relasi sosial penting dianalisis bersama peserta. Pada poin ini, identitas akan dilihat sebagai media “pemosisian” (*positioning*) diri atau kelompok dalam hubungannya dengan yang lain. Relasi identitas sosial, terutama yang timpang, terdapatnya dominasi kelompok identitas tertentu dan diskriminasi dan bahkan persekusi terhadap kelompok identitas lain. **Poin penting yang ingin dipahami di sini adalah faktor-faktor penyebab ketimpangan relasi identitas sosial.**

Isu penting terkait dengan teori dan konsep identitas adalah (formulasi) identitas sebagai “proyek” yang memiliki tujuan tertentu. Pembahasan ini akan menjelaskan khususnya fenomena politik identitas. Mengapa dan bagaimana sebuah identitas menjadi media penting dalam mobilisasi preferensi atau gerakan politik tertentu. Fenomena politik Indonesia pasca orde baru sangat kental dengan politik identitas. Konteks elektoral pemilu 2014 dan 2019 adalah contoh yang bisa digunakan untuk memberi ilustrasi mengenai operasi identitas sebagai sumber penting dalam mobilisasi.

Isu penting terkait dengan teori dan konsep identitas adalah (formulasi) identitas sebagai “proyek” yang memiliki tujuan tertentu. Pembahasan ini akan menjelaskan khususnya fenomena politik identitas. Mengapa dan bagaimana sebuah identitas menjadi media penting dalam mobilisasi preferensi atau gerakan politik tertentu. Fenomena politik Indonesia pasca orde baru sangat kental dengan politik identitas. Konteks elektoral pemilu 2014 dan 2019 adalah contoh yang bisa digunakan untuk memberi ilustrasi mengenai operasi identitas sebagai sumber penting dalam mobilisasi.

Fasilitator melanjutkan sesi ini dengan membahas (re)produksi identitas yang dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dengan menggunakan sentimen tertentu. Secara khusus, sesi ini akan membahas peran negara dan kekuatan “mayoritas” memproduksi wacana dominan yang kemudian menjadi rujukan (re)produksi identitas oleh warga negara, khususnya terkait dengan identitas agama, kepercayaan, etnisitas, dan adat. Keempat kategori identitas tersebut tentu menyisakan banyak kategori lain, seperti difabel, kategori kelas, pusat-daerah, dan seterusnya. Pembahasan konstruksi ragam identitas diharapkan dapat merefleksikan kompleksitas masalah yang terjadi pada kategori lain dalam sejarah pembentukan identitas warga negara Indonesia.

Atas nama “nasionalisme”, negara telah mendefinisikan keempat konsep tersebut, mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengannya, dan faktanya telah menyebabkan berbagai bentuk perlakuan diskriminatif terhadap kelompok warga negara tertentu. Etnisitas, yang di masa Orde Baru ditekan agar tidak menjadi penanda warga, telah dikonstruksi untuk kepentingan nasionalisme. Salah satu contoh manifestasinya adalah

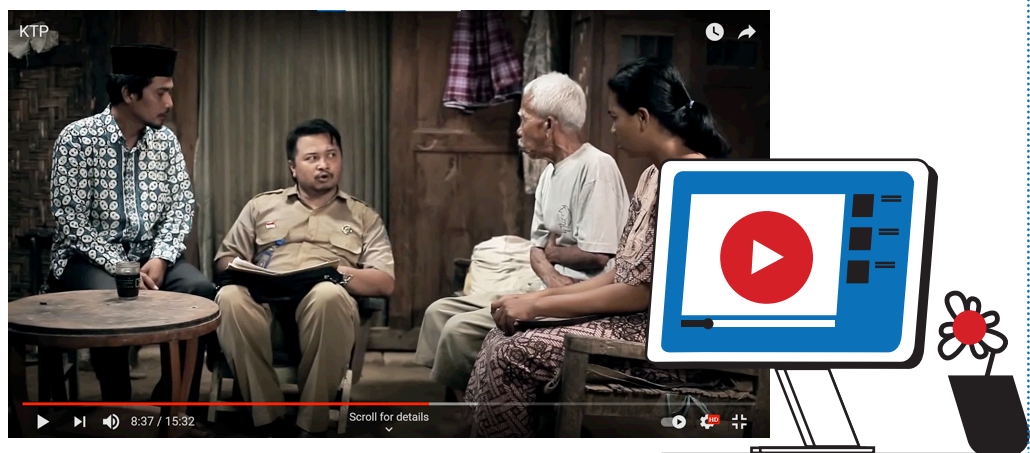
untuk kepentingan pariwisata. Jika etnisitas tidak dijadikan penanda identitas warga, agama justru telah menjadi alat indeksasi warga negara, seperti misalnya yang terjadi dalam pendidikan agama. Pembedaan agama dan kepercayaan oleh negara, misalnya berdasarkan UU No.1/PNPS 1965 telah menciptakan polarisasi, diskriminasi dan bahkan persekusi terhadap sebagian warga negara. Sejarah kehidupan penghayat kepercayaan dan kelompok beda paham dalam agama-agama yang diakui oleh negara identik dengan sejarah diskriminasi. Mereka disesatkan dan dikriminalkan. Adat yang sebagian warga negara menganggapnya sebagai “jantung” identitas (juga sering disinonimkan dengan “agama”) telah direduksi sejak masa penjajahan menjadi sekedar “budaya.” Sebagian warga negara melihat adat sebagai penanda utama identitas kolektivitas mereka, tetapi negara justru sering menafikannya, sekalipun tidak selalu. Adat boleh bertahan hanya jika selaras dengan “nasionalisme”, ramah dengan turisme, dan tidak bertentangan dengan agama-agama yang diakui.¹

¹ Modul Sekolah
Pengelolaan Keragaman,
CRCS UGM

Pertanyaan-pertanyaan kunci:

- Apa saja sumber keragaman identitas? Bagaimana identitas terbentuk? Apa saja jenis identitas?
- Bagaimana memahami dan menjelaskan fenomena mengentalnya isu identitas dalam peristiwa intoleransi seperti yang terjadi di beberapa daerah?

Referensi Pembelajaran Tambahan



Pada akhir sesi, Fasilitator perlu memutar film pendek “KTP” (link: https://www.youtube.com/watch?v=kwdzu_L-uSE) untuk membungkus diskusi terkait identitas. Film ini berfungsi sebagai repetisi untuk mengikat proses diskusi yang cukup kaya dalam memahami kompleksitas persoalan identitas yang, seringkali, menjadi sumber petaka dalam kasus-kasus intoleransi di Indonesia. Selain film tersebut, ada pula film berjudul “Identity” (link: <https://www.viddsee.com/video/identity/079yu>)



Sub Sesi 03

Radikalisme dan Intoleransi

Waktu

50 Menit

- Presentasi Awal dan Identifikasi Peraturan Sekolah 20 menit
- Sebaran dan Potensi Radikalisme di Indonesia 30 menit

Metode

Presentasi dan diskusi kelompok

Pembahasan sesi ini ditujukan untuk memahami radikalisme dan hubungannya dengan intoleransi. Absolutisasi kebenaran tertentu oleh satu pihak, yang kemudian dimanifestasikan secara kaku, keras, dan memaksa akan melahirkan tindakan yang berkebalikan dengan toleransi. Kita mengenal Indonesia sebagai negara pluralis, di mana kemajemukan hadir dan berkembang di dalamnya. Kemajemukan meniscayakan adanya pertemuan yang semakin intensif antar kelompok-kelompok manusia. Salah satu dampaknya adalah pergesekan yang seringkali terjadi di antara identitas yang berbeda. Ketika keyakinan terhadap suatu agama tertentu cenderung dimutlakan maka akan sangat berpotensi pada timbulnya pergesekan atau ketegangan.

Fenomena radikalisme pada dasarnya telah dielaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai salah satu dari tiga persoalan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. "Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa" yang berujung pada tindak kekerasan antar sesama masyarakat. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap "yang berbeda". Demikian juga dengan RPJMN 2019-2024 yang menekankan secara kuat moderasi beragama sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah radikalisme yang berkembang secara pesat di Indonesia dalam lebih dari 2 dekade ini.

Fenomena intoleransi, sikap eksklusif dan radikalisme berwajah agama (bisa juga identitas tertentu lainnya) yang saat ini menjadi persoalan mendasar Indonesia, jelas bukan cerminan karakter yang diharapkan dalam Pancasila. Karakter bersama yang harus dibangun adalah sikap saling menghargai antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap dan tindakan kekerasan yang bersumber dari sikap merasa keyakinannya paling benar bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik di kalangan sesama pemeluk suatu agama maupun di antara umat agama lain. Sikap dan semangat egoisme keagamaan, juga egoisme identitas lainnya, sudah sepatutnya digerus dan kembali menginternalisasi cita-cita bersama sebuah bangsa dengan membangun keharmonisan hubungan antara manusia, dengan menjadikan perasaan ketuhanan merupakan perasaan kebersamaan. Sehingga keharmonisan beragama dapat termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari dalam wujud karakter bangsa Indonesia yang manusiawi, cinta persatuan, gemar bermusyawarah dan gotong royong serta komitmen terhadap keadilan.

Rentannya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam paham

dan tindakan radikalisme, mulai dari kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, gencarnya infiltrasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya pendidikan kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, dan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernisasi negatif. Apabila hal itu tidak segera diatasi, maka semakin lama akan terjadi benturan yang mengakibatkan terpecah belahnya serta perusakan-perusakan kehidupan manusia yang mengancam kemajemukan yang telah lama ada.

Terkait fenomena radikalisme dan intoleransi yang berkembang, termasuk juga di sekolah, Fasilitator perlu mendiskusikan langkah-langkah penanganannya dalam sesi ini. Peserta bisa dibagi kedalam 3-4 kelompok untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan ini:

1. Apa saja peraturan di sekolah, baik tertulis maupun tidak, sifatnya anjuran maupun mengikat, yang menyangkut agama, gender, seragam, biaya, syarat keikutsertaan siswa dalam ujian, maupun pengambilan ijazah?

| Peraturan Terkait | Penjelasan |
|--------------------------|-------------------|
| Agama | |
| Gender | |
| Seragam | |
| Iuran Sekolah | |
| Syarat Ujian | |
| Ambil Ijazah | |

81

2. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan dan berpotensi melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dan sekaligus mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang berdiri di atas nilai-nilai Ke-bhinneka-an, kebersamaan dan kegotongroyongan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia selama ini.

| Pelajaran | Materi terkait Perdamaian |
|------------------------------|----------------------------------|
| Kewarganegaraan | |
| Agama Islam | |
| Kesenian | |
| Sejarah | |
| ... (mata pelajaran lainnya) | |

Sebaran dan Potensi Radikalisme di Indonesia

Studi dan penelitian yang menelaah secara komprehensif terkait radikalisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah cukup memadai untuk memperlihatkan secara gamblang sebaran dan potensi radikalisme. Secara khusus, bagian ini menyetengahkan hasil studi dan penelitian tersebut yang dilakukan oleh beberapa lembaga baik Pemerintah, individu maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya terkait dengan sebaran dan potensi radikalisme di Indonesia dan hal-hal yang berhubungan dengan isu dan praktik radikalisme, khususnya radikalisme berbasis agama, atau umum dikenal sebagai radikalisme agama.

Pada tahun 2007, Abuza meneliti gerakan radikal di kalangan kaum muda. Menurutnya, sebagian kaum muda terpelajar seperti siswa atau mahasiswa terpengaruh oleh paham radikal keagamaan. Kaum muda ini bercirikan: 1) intoleran terhadap perbedaan; 2) mudah mengkafirkan pihak lain; 3) ketaatan kaku terhadap pemimpinnya; 4) berupaya menguasai ruang politik kampus; 5) mendukung tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum radikal; dan 6) melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang dianggap sekuler dan menyimpang dari agama, menentang dan berusaha mengubah dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila dengan azas-azas atau paham yang mereka yakini. Secara ringkas, menurut Abuza, karakteristik kaum muda radikal tersaji dalam matriks berikut:

Karakteristik Kaum Muda Radikal

| No | Ciri-Ciri | Keterangan |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Intoleran terhadap perbedaan | <ul style="list-style-type: none"> • Menafikan keberagaman yang ada di sekitarnya dan memaksakan budaya mereka kepada kelompok lain. • udaya yang disandang kaum muda yang berpaham radikal didapatkan dari budaya Timur-Tengah dan menolak budaya-budaya lain, meskipun budaya tersebut berasal dari lokalitas masyarakat. |
| 2 | Mudah mengkafirkan | <ul style="list-style-type: none"> • Cenderung mudah menyematkan istilah kafir kepada kelompok yang berbeda dengan mereka • Segala tingkah laku yang berbeda dengan kelompoknya diberi label kafir • Perilaku di luar kelompoknya adalah hasil dari konspirasi barat-yahudi-zionisme |
| 3 | Ketaatan kaku terhadap pemimpin | <ul style="list-style-type: none"> • Sangat taat dan patuh terhadap pemimpin di dalam kelompok • Taat dan patuh terhadap pemimpin politik di luar kelompok yang menaungi kelompoknya • Mengarah pada tindakan pengkultusan pribadi ataupun pengkultusan kelompok |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | Penguasaan ruang politik kampus | <ul style="list-style-type: none"> • Menguasai lembaga-lembaga siswa dan mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), OSIS atau lembaga ekstrakurikuler • Upaya memperlancar rekrutmen dan menjalankan agenda-agenda gerakan radikal yang dikendalikan dari luar kampus atau sekolah |
| 5 | Mendukung tindak kekerasan berdasarkan agama | <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan kekerasan berdasar agama merupakan upaya untuk menertibkan masyarakat • Tindakan kekerasan merupakan perintah Tuhan melalui kitab suci untuk memerangi segala bentuk tindakan-tindakan yang dianggap berlawanan dengan agama • Dukungan terhadap tindakan terorisme • Dukungan terhadap peperangan bersenjata terhadap pihak-pihak yang dianggap musuh Tuhan |
| 6 | Perlawanan terhadap pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan yang dianggap sekuler dan menyimpang dari agama • Menentang dan berusaha mengubah dasar negara |

Pada tahun yang sama, Abdullah Fajar dan kawan-kawan dalam *Laporan Penelitian Islam Kampus*, menyebutkan bahwa di beberapa kampus perguruan tinggi umum, kecenderungan mahasiswa untuk mendukung tindakan kekerasan (walaupun atas nama agama) juga sangat tinggi. Hasil penelitian yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007 ini melibatkan 2.466 sampel mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ketika para mahasiswa ditanya tentang pelaksanaan “*amar ma’ruf nahi munkar*” dalam bentuk *sweeping* tempat-tempat yang dianggap sumber maksiat, mereka menjawab sebagai berikut: sekitar 65% mendukung dilakukannya aksi *sweeping* kemaksiatan, 18% mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan *sweeping*, sekitar 11% (268 responden) menyatakan tidak mendukung *sweeping*. Sisanya sebanyak 6% tidak memberikan jawaban. Mereka yang mendukung *sweeping* beralasan bahwa kegiatan *sweeping* sebagai bagian dari perintah agama (88%), mendukung *sweeping* karena berpendapat bahwa aparat keamanan tidak mampu menegakkan hukum (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%).

Pada tahun 2008 mulai dari Mei hingga Agustus Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian tentang *Sikap Sosial-Keagamaan Masyarakat di Jawa*, dan menemukan bahwa radikalisme muncul salah satunya akibat pemahaman guru terhadap agama yang sangat eksklusif dan konservatif. Misalnya, sekitar 62,4% dari responden (guru agama Islam) menolak wacana memiliki pemimpin publik non muslim, sekitar 67,4% mengatakan bahwa mereka lebih merasa sebagai muslim dibanding sebagai orang Indonesia, mayoritas responden mendukung penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara untuk memerangi berbagai kejahatan, dan sekitar 21,3% dari responden menginginkan hukuman mati bagi mereka yang murtad dari Islam.

Fakta mengenai rentannya anak muda dan penetrasi radikalisme dikuatkan pada hasil penelitian MAARIF Institute pada tahun 2011. Penelitian ini mencoba menelisik pemetaan persoalan radikalisme di kalangan pelajar SMA di 50 SMA Negeri di empat kota: Cianjur, Pandeglang, Surakarta dan Yogyakarta. Hasilnya ditemukan bahwa anak muda atau pelajar memiliki kecenderungan untuk menginternalisasi pandangan-pandangan radikal yang dipenetrasi oleh lingkungan terdekatnya. Internalisasi itu diawali dengan kecenderungan kesadaran keislaman yang lebih tinggi daripada kesadaran kebangsaan. Bahkan pada taraf tertentu, kesadaran keislaman telah menggantikan atau menafikan kesadaran kebangsaan. Menurut penelitian ini juga, sekolah adalah ruang terbuka bagi diseminasi paham apa saja. Karena terlalu terbuka, kelompok radikal keagamaan memanfaatkan ruang terbuka ini untuk masuk secara aktif dan masif (khususnya lewat Rohani Islam –ROHIS), yang mengkampanyekan pahamnya dan memperluas jaringannya. Kelompok keagamaan yang masuk mulai dari yang ekstrem menghujat negara dan ajakan untuk mendirikan negara Islam, hingga kelompok Islamis yang ingin memperjuangkan penegakan syariat Islam.

Selanjutnya, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada tahun 2011 merilis hasil survei yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2011. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 49% siswa bersikap setuju terhadap aksi radikal terhadap agama. Radikalisme agama tidak hanya sebatas pada siswa, golongan mahasiswa pun memiliki kecenderungan mendukung gerakan radikal atas nama agama. Dari 2.466 responden mahasiswa, sebanyak 1.594 responden (65%) menyetujui tindakan *sweeping* kemaksiatan, sebanyak 446 responden (18%) mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan *sweeping* kemaksiatan, 268 responden (11%) tidak menyetujui kegiatan *sweeping* kemaksiatan, dan 158 responden (6%) tidak memberikan jawaban. Lebih lanjut, sebanyak 2.170 responden (88%) menyatakan bahwa kegiatan *sweeping* tersebut merupakan perintah agama.

Wahid Foundation pada 16 Mei 2016 merilis hasil survei tentang *Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivistis Rohani Islam (ROHIS) Sekolah-Sekolah Negeri*. Hasilnya, rata-rata di atas 20% responden mengakui sering mendengar materi dan pendapat dalam pengajian ROHIS yang cenderung radikal, misalnya kebencian umat agama lain terhadap Islam, perlawanan bahkan kalau perlu perang terhadap umat lain atau pemerintah yang memusuhi dan mengancam umat Islam, perang pemikiran (*ghazwul fikri*), agama menjadi pertimbangan utama dalam memilih teman. Yang cukup mengagetkan adalah fakta-fakta berikut yang ditemukan dalam survei: 78% responden mendukung ide khilafah, 37% meyakini Osama bin Laden mati syahid, 33% mengartikan jihad sebagai perang atau mengangkat senjata melawan orang kafir, 33% meyakini para teroris yang beroperasi di Indonesia seperti Amrozi, Imam Samudera sampai dengan Bahrudin Naim telah mempraktikkan jihad sejati, 17% setuju orang murtad dibunuh, 10% mendukung bom sarinah, dan 6% mendukung ISIS.

Satu tahun kemudian setelah Wahid Foundation merilis hasil surveinya, tepatnya Mei 2017, data yang hampir sama ditemukan juga dalam survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). Survei SMRC memiliki beberapa temuan, di antaranya: 14,5% responden menganggap ancaman terhadap NKRI paling banyak dikarenakan oleh paham-paham keagamaan tertentu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, hampir 1 dari 10 orang Indonesia secara eksplisit menginginkan NKRI diganti dengan sistem khilafah. Dalam merespons

ISIS, 2,7% dari yang mengaku tahu tentang ISIS menyatakan setuju dengan cita-cita ISIS untuk membentuk kekhalifahan walaupun secara umum hampir semua warga Indonesia menolak cita-cita ISIS membentuk khilafah untuk menggantikan NKRI yang bersandar pada Pancasila dan UUD. Tampaknya rasa nasionalisme merupakan faktor paling penting yang memunculkan sentimen negatif warga pada ISIS, bukan sentimen terhadap demokrasi maupun kondisi sosial-ekonomi, politik, hukum, maupun keamanan. Yang lebih mencengangkan lagi, secara demografis sikap positif terhadap HTI yang memiliki cita-cita selaras dengan ISIS ditemukan lebih banyak di kalangan warga perkotaan dan berumur lebih muda

Selain itu, terkait pandangan generasi muda dalam melihat bagaimana tingkat penerimaan mereka terhadap pemimpin yang berbeda agama menjadi menarik. Generasi muda di sini adalah anak-anak muda yang menjadi responden survei yang berusia antara 17-29 tahun. Survei Nasional CSIS periode 23-30 Agustus 2017 menemukan data bahwa terdapat angka cukup tinggi, yaitu 53% generasi muda yang tidak bisa menerima pemimpin yang berbeda agama. Sementara hanya sekitar 38% saja yang bisa/dapat menerima pemimpin yang berbeda agama.

Potensi dan sebaran radikalisme di negeri ini tidak hanya menasar kalangan remaja dan anak muda sebagaimana dijelaskan berdasarkan temuan hasil penelitian di atas, tetapi juga telah menyentuh kalangan profesional Indonesia. Pada Oktober 2017, Alvara Research Center merilis hasil survei *Potensi Radikalisme di Kalangan Profesional Indonesia*. Temuan data Alvara Research Center dalam survei tersebut sebagai berikut:

- Kalangan profesional yang tidak mendukung pemimpin non muslim yang terpilih secara demokratis bisa dikatakan cukup besar (29,7%), terutama dari kategori PNS.
- Sebanyak 27,6% profesional yang mendukung Perda Syariah karena dianggap tepat untuk mengakomodir penganut agama mayoritas, mayoritas berasal dari PNS dan Swasta. Persentase profesional yang setuju dengan negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara *kaffah* mencapai 29,6%. PNS dan pegawai swasta yang menyatakan setuju bahwa negara Islam harus diperjuangkan untuk penerapan Islam secara *kaffah* lebih tinggi dibanding BUMN.
- Mayoritas profesional menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang tepat untuk Negara Indonesia (84,5%), namun memilih ideologi Islam bisa dikatakan cukup tinggi (15,5%). PNS yang menyatakan ideologi Pancasila lebih tepat dibanding Ideologi Islam, lebih besar dibanding Swasta dan BUMN.
- Profesional yang setuju dengan *khilafah* sebagai bentuk ideal Indonesia dibanding NKRI paling besar di kalangan PNS (22,2%), kemudian Swasta (17%). Mayoritas profesional tidak setuju untuk berjihad menegakkan negara Islam/*khilafah*, namun yang setuju untuk berjihad jumlahnya juga cukup besar (19,6%).

Penelitian tentang radikalisme dilakukan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dirilis 8 November 2017 dengan judul *Api dalam Sekam: Keberagamaan Gen Z*. Survei Nasional tentang "Sikap Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia ini melibatkan responden kalangan siswa, mahasiswa, guru dan dosen di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan pada level opini, siswa/mahasiswa cenderung memiliki pandangan

keagamaan yang intoleran. Hal tersebut tercermin dari persebaran antara opini radikal, toleransi eksternal, dan toleransi internal siswa. Dari ketiga kategori tersebut, pandangan keagamaan siswa yang paling intoleran terdapat pada opini radikal (58,5%) disusul opini intoleransi internal (51,1%) dan opini intoleransi eksternal (34,3%). Sedangkan dari sisi aksi, nampak bahwa siswa/mahasiswa memiliki perilaku keagamaan yang cenderung moderat/toleran. Mereka yang termasuk dalam kategori aksi radikal hanya 7,0% dan aksi intoleransi eksternal 17,3%. Namun pada aksi intoleransi internal, cenderung lebih tinggi, yaitu 34,1%.

Pada level opini, guru/dosen cenderung memiliki pandangan keagamaan yang toleran/moderat. Fakta ini berkebalikan dengan yang terjadi pada siswa. Hal tersebut tercermin dari persebaran opini guru/dosen pada lebih rendahnya opini intoleransi internal (33,9%), opini intoleransi eksternal (29,2%), dan opini radikal (23,0%). Sedangkan pada level aksi, nampak bahwa adanya dua perbedaan signifikan antara aksi toleransi internal dan aksi radikal. Dimana guru/dosen mempunyai kecenderungan kuat memiliki perilaku sangat intoleran pada kategori aksi toleransi internal (69,3%), sedangkan pada kategori aksi radikal 8,4% dan pada kategori aksi toleransi eksternal 24,2%.

Survei Nasional ini juga menemukan bahwa model pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berpotensi membentuk radikalisme siswa. Sama halnya dengan opini radikal guru dan model pembelajaran PAI dari Guru bisa mempengaruhi radikalisme siswa. Artinya, guru menjadi faktor penting dalam pembentukan seseorang dalam proses menjadi intoleran dan radikal. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan guru dalam pembelajaran. Jihad juga merupakan salah satu isu intoleran yang sering diusung kelompok Jihadis. Bagi mereka, jihad adalah *qital* dan terutama ditujukan melawan non-muslim. 37,71% responden setuju jihad adalah melawan non-muslim.

Tetapi terdapat kesimpulan lainnya yang menarik, sikap positif ditunjukkan guru/dosen dan siswa/mahasiswa yang menjadi responden terhadap NKRI, yaitu sebanyak 91,93% (guru dan dosen) dan 80,74% (siswa dan mahasiswa) tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah *thaghut* dan kafir. Sebanyak 86,02% (guru dan dosen) dan 69,71% (siswa dan mahasiswa) tidak setuju jika penyerangan terhadap aparat negara yang dianggap *thaghut* dan kafir dapat dibenarkan.

Demikian juga dengan makna dan aksi jihad: guru/dosen dan siswa/mahasiswa tidak setuju makna jihad diartikan sebagai cara kekerasan, yaitu sekitar 82,30% (guru dan dosen) dan 62,29% (siswa dan mahasiswa) tidak setuju bahwa jihad yang sesungguhnya adalah berperang melawan non muslim. Sekitar 93,17% (guru dan dosen) dan 76,65% (siswa dan mahasiswa) tidak setuju jika tindakan pengeboman atau bom bunuh diri atas nama agama adalah jihad yang sesungguhnya, dan 81,37% (guru dan dosen) dan 65,57% (siswa dan mahasiswa) tidak setuju jika orang yang murtad boleh dibunuh.



Sub Sesi 04

Ketahanan Masyarakat dan Keluarga

Waktu

70 Menit

- Presentasi Peran Keluarga dalam Pencegahan Radikalisme 15 menit
- Mengembangkan Kualitas Pendidikan Multikultural 20 menit
- Peran Pemuda 15 menit
- Diskusi Kelompok 20 menit

Metode

Presentasi dan diskusi kelompok

Pada sesi ini, pembahasan ditekankan pada pentingnya membangun ketahanan masyarakat dan keluarga dalam rangka untuk menangkal radikalisme dan intoleransi. Fasilitator mengelaborasi berbagai bahan untuk membangun kerangka bersama pentingnya pengajaran di rumah maupun di sekolah. Pada akhir sesi, Fasilitator meminta peserta untuk membangun rencana kerja (action plan) di sekolah masing-masing, yang menghubungkan peran guru dan orang tua (**jika bisa didorong kerjasama dengan Komite Sekolah**) dalam rangka membangun lingkungan yang memiliki resiliensi terhadap konteks radikalisme dan intoleransi.

Ada tiga institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda. *Pertama, pendidikan.* Melalui peran lembaga pendidikan, guru dan kurikulum dalam memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran pada generasi muda. *Kedua, keluarga,* melalui peran orang tua dalam menanamkan cinta dan kasih sayang kepada generasi muda dan menjadikan keluarga sebagai unit konsultasi dan diskusi. *Ketiga, komunitas.* Melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda.

Daya tahan masyarakat mencakup kondisi sosial ekonomi, praktik kolektif, sikap dan perilaku individu atau kelompok yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap potensi, sebaran dan pengaruh gerakan radikalisme. Termasuk di dalamnya daya tahan keluarga. Sebagai sebuah unit sosial yang khusus, masyarakat atau komunitas ditandai keberagaman budaya, kepentingan, dan afiliasi kolektif. Interaksi antar individu dan interaksi antar kelompok dipengaruhi latar belakang budaya, ekonomi dan politik. Aspek-aspek tersebut memberi gambaran apakah masyarakat dan keluarga berada dalam situasi krisis, berada jauh dari pengaruh radikalisme atau sudah terpapar ideologi, pemikiran dan gerakan radikalisme.

Ketahanan dan kerentanan masyarakat dan keluarga terhadap pengaruh radikalisme tidak otomatis datang dari kapasitas budaya dan perilaku sosial yang melingkupinya. Agar terhindar dari bias *culturalist* yang gemar memberi stigma negatif pada masyarakat, rumusan aspek ini memahami ketahanan dan kerentanan masyarakat dan keluarga sebagai konsekuensi dari efektif atau tidak efektifnya tata kelola dan kapasitas

kelembagaan. Rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat dan keluarga tidak terlepas dari ketersediaan dan akses pelayanan publik dan pasar ekonomi. Begitu pula maraknya kemunculan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), asosiasi etnik dan keagamaan yang menjadi *trigger* dan pemicu pengaruh radikalisme tidak dapat dipisahkan dari cara kerja dan hasil pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Demikian halnya dengan potensi konflik kekerasan yang bisa saja terjadi diakibatkan oleh pengaruh dan sebaran ideologi radikal yang berkembang di masyarakat, mengajak kita mencermati tiga hal. *Pertama*, hubungan sosial antara komunitas, antara keluarga dan ketersediaan mekanisme atau praktik sosial yang memungkinkan interaksi yang bersifat kekeluargaan antar para pihak; *kedua*, advokasi pemerintah dan masyarakat sipil terhadap kapasitas lokal daerah untuk promosi perdamaian yang jauh dari pengaruh ideologi, pemikiran dan gerakan radikal; dan *ketiga*, menciptakan ruang partisipasi dan interaksi sosial yang memungkinkan agar tidak terjadi segregasi sosial di tingkat masyarakat dan keluarga yang tidak terpapar ideologi, pemikiran dan gerakan radikal.

Peningkatan kapasitas masyarakat (dan keluarga di dalamnya) dengan pemberdayaan masyarakat bertujuan mencapai masyarakat berdaya, baik dari sisi pengetahuan maupun aksi kontra radikalisme terhadap masifnya gerakan radikalisme. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, merancang dan menentukan program pembangunan yang dinilai tepat berdasarkan kemampuannya. Peningkatan kapasitas diterapkan dalam bentuk pendidikan dan pendampingan teknis dalam berbagai tingkatan: individu, keluarga, komunitas, pemerintahan, dan kelembagaan/organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga non pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan indikasi adanya gerakan yang sistematis penyebaran paham radikal pada kalangan generasi muda dan bahkan anak-anak usia sekolah. Penyebaran paham radikal di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui sosial media, aktivitas-aktivitas sosial keagamaan dan bahkan secara sistematis paham radikal telah masuk melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal.

Alih-alih menangkal penyebaran paham dan gerakan radikal, upaya pencegahan dan penanganan radikalisme yang dilakukan masih bersifat konvensional dan seakan sepenuhnya hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat gerakan, pemikiran dan aksi paham radikal ditransformasikan menjadi gerakan budaya yang akan menggantikan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang toleran, ramah, saling menghormati perbedaan dan gotong royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, upaya-upaya pencegahan dan penanganan gerakan radikalisme harus didorong menjadi sebuah gerakan nasional untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa.

Mengembangkan Kualitas Pendidikan Agama dan Multikultural

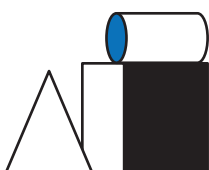
Paham yang menginginkan perubahan terhadap segala situasi yang ada dengan cara apapun ini telah merasuk ke dalam diri anak, yang dalam konteks ini segala usia mulai dari anak-anak hingga remaja dan pemuda. Jika dikaitkan dengan anak (anak-anak dan remaja), radikalisme dalam ranah ini berarti sebuah kekerasan yang dilakukan oleh mereka untuk dapat mengubah segala situasi apapun.

Dalam konteks radikalisme keagamaan, hasil berbagai penelitian lembaga non pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan tingginya jumlah/persentase generasi muda di berbagai daerah yang sudah mulai terpapar pemikiran-pemikiran radikalisme dalam bentuk dukungan terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang berlatar belakang agama dan penegakan hukum agama, dan bahkan banyak kalangan muda yang setuju atas pemikiran bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa sudah tidak relevan dan mendukung pendirian negara berdasarkan syariat agama tertentu.

Dalam konteks yang berbeda, intensitas kejadian tindakan radikal pelajar sekolah dalam bentuk tawuran dan tindakan kekerasan antar pelajar juga menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nampaknya memang masalah tawuran pelajar erat kaitannya dengan sikap radikalisme anak, dan hal ini tentunya menjadi masalah serius yang harus diselesaikan bersama-sama. Ini terbukti dengan selalu meningkatnya kasus tawuran yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan catatan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang 2013 terjadi 255 kasus tawuran pelajar di Indonesia. Angka tersebut dinilai meningkat dibanding tahun 2012 sebelumnya, yakni sebanyak 147 kasus. Sedangkan untuk kasus tawuran pelajar di DKI Jakarta sebanyak 112 kasus pada 2013, juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2012, yakni 98 kasus. Sikap pelajar yang bertindak kasar merupakan cermin dari kondisi lingkungan di sekitarnya. Salah satu kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang bertindak kasar, yakni bagaimana orang tua dalam mengasuh seseorang (anak) tersebut. Senada dengan itu, beberapa pakar pendidikan menilai, meningkatnya kriminalitas dan radikalisme di lingkungan sekolah oleh para pelajar akhir-akhir ini juga diakibatkan oleh hilangnya keteladanan di sekolah, rumah, dan masyarakat di sekitar mereka.

Keluarga merupakan lembaga sosial pertama dan dasar dari semua lembaga-lembaga sosial lainnya. Keluarga berperan membina anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun budaya dimana ia berada. Dalam konsep sosiologi, keluarga sebagai bagian unit terkecil dari masyarakat yang memegang peran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika unit sosial terkecil itu baik, maka baiklah masyarakat, bangsa, dan negara dan sebaliknya, jika keluarga abai dalam bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, maka bisa jadi memiliki pengaruh buruk terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa yang akan datang.



Para penganut teori struktural fungsional melihat masyarakat dengan menganalogikan

masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa sehat atau sakit. Demikian halnya juga dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga yang saling berhubungan satu sama lain dan bersifat fungsional terhadap anggota keluarga lainnya. Bahwa pada umumnya, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak dimana masing-masing anggota keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar anggota keluarga. Jika satu fungsi dalam keluarga terganggu, maka fungsi lainnya juga akan terganggu.

Radikalisme yang dilakukan oleh anak adalah suatu sikap yang dilakukan dan ditunjukkan oleh anak karena suatu keadaan untuk mengubah atau untuk mencari apa yang belum bisa dipenuhi oleh orangtua. Radikalisme bisa dilakukan oleh anak karena pola asuh. Pola asuh adalah salah satu bentuk sosialisasi terhadap anak. Pola asuh berperan untuk membentuk perilaku anak. Pola asuh juga merupakan salah satu bentuk pendidikan terhadap anak yang akan menentukan jadi apa dan bagaimana anak tersebut saat dewasa nanti.

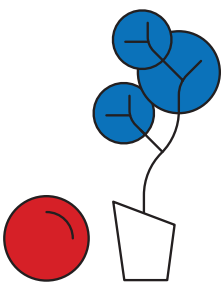
Beberapa dampak atau pengaruh pola asuh orang tua terhadap anak-anak, yaitu:

1. Pola asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stress, mempunyai minat terhadap hal-hal baru dan kooperatif terhadap orang lain.
2. Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri.
3. Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik anak yang agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial.

Namun demikian, di luar seluruh persoalan internal dalam keluarga, beberapa faktor penting yang menjadi penyebab melemahnya ketahanan keluarga dalam membendung perubahan perilaku keluarga, khususnya anak dalam tindakan-tindakan radikalisme, di antaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi.
2. Tingkat pendidikan dalam keluarga.
3. Pola Asuh keluarga.
4. Pemahaman nilai-nilai agama dalam keluarga.

Faktor-faktor inilah yang kemudian akan menentukan tingkat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai propaganda gerakan radikal yang dilakukan dalam berbagai cara dan pendekatan.



Kompleksitas persoalan keluarga menjadi hal yang strategis untuk mendapat perhatian semua pihak, khususnya pemerintah dan seluruh lembaga non-pemerintah dalam mencegah penyebaran gerakan radikal dan menjadikan keluarga sebagai 'entry point' pencegahan dini penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda Indonesia. Terkait berbagai masalah tersebut di atas, beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dan menjadi agenda bersama dalam menangkal penyebaran paham radikal

dengan menempatkan keluarga sebagai basis pencegahan gerakan radikal adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai kegiatan pengembangan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat.
2. Memperkuat basis pendidikan dan pengetahuan orang tua, khususnya dalam konteks pengetahuan keagamaan dan pendidikan karakter bangsa.
3. Membangun dan memperbesar jaringan komunikasi antar-masyarakat dalam satu komunitas dan atau jaringan komunikasi antara orang tua dan guru, guna mendeteksi berbagai perubahan sikap dan perilaku anak yang mengarah pada tindakan-tindakan radikal.
4. Mengintensifkan peran tokoh masyarakat/adat dan tokoh agama dalam memberikan pembinaan keagamaan dan budaya/kearifan lokal bagi seluruh anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Memperkuat Peran Keluarga dalam Pencegahan Radikalisme

Keragaman adalah anugerah Ilahi yang harus dirangkai menjadi simfoni keindahan yang harmonis. Mustahil kita hidup dalam satu kesatuan yang seragam. Anak didik harus dibuka mata dan wawasannya untuk melihat sekian perbedaan yang ada di sekitarnya, dimana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen dan plural. Paling tidak heterogenitas dan pluralitas masyarakat itu bisa dilihat dari eksistensi keragaman suku (etnis), ras, agama (aliran kepercayaan), dan budaya (kultur). Inilah realitas bangsa yang multikultural dan multireligius. Kekayaan ini harus dijaga menjadi keragaman dibawah semangat kebersamaan, bukan penyatuan. Fenomena kekerasan atas nama agama yang sering dikenal dengan radikalisme agama semakin tampak garang ketika muncul berbagai peristiwa teror pemboman di tanah air. Beberapa peristiwa teror dalam bentuk pengeboman telah memakan banyak korban dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berbagai fenomena radikalisme atau kekerasan tersebut di atas, tentu tidak muncul dengan sendirinya. Sejumlah faktor penyebab timbulnya paham radikalisme di bidang agama yang disinyalir telah merambah di dunia pendidikan. Peningkatan radikalisme keagamaan banyak berakar pada kenyataan kian merebaknya berbagai penafsiran, pemahaman, aliran, bahkan sekte di dalam (intra) satu agama tertentu. Menurut Azyumardi Azra, di kalangan Islam, radikalisme keagamaan itu banyak bersumber dari:

1. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat al-Qur'an.
2. Bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu.
3. Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial-budaya, dan akses globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal.

Untuk mengeliminasi berbagai masalah radikalisme keagamaan, khususnya di dunia pendidikan, maka dibutuhkan instrumen pendidikan yang mampu mengarahkan kemajemukan bangsa ini. Pendidikan adalah salah satu jawaban, karena ia merupakan ranah yang strategis untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Pendidikan merupakan wahana yang paling tepat untuk membangun kesadaran multikulturalisme serta sebagai salah satu media penting yang dapat membentuk bagaimana corak pandangan hidup seseorang atau masyarakat, apakah pandangan hidup mereka hanya untuk kepentingan hidup di dunia ini saja, atau di akhirat saja, atau untuk keduanya. Selain itu lembaga pendidikan dapat membentuk manusia yang cerdas, bermoral, memiliki semangat hidup dan memiliki semangat mengembangkan ilmu dan teknologi guna membangun bangsanya.

Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini, dunia pendidikan mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Konsep pendidikan saat ini harus mampu mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme yang memang sudah terkandung dalam ajaran agama. Ada beberapa aspek yang diperlukan bagaimana seorang anak belajar dari kehidupannya. Tentu anak di sini bukan hanya berarti anak dalam pengertian sempit, namun lebih bermakna individu pembelajar (*learner*). Hal ini menjadi penting karena sikap dan karakter seseorang merupakan akumulasi dari pengetahuan dan pengalaman sebagai hasil dari proses belajar. Berikut ini beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan pendidikan agama:

Pertama, pendidikan yang menghargai dan merangkul segala bentuk keragaman. Dengan demikian, diharapkan akan tumbuh kearifan dalam melihat segala bentuk keragaman yang ada; **Kedua**, pendidikan agama merupakan sebuah usaha sistematis untuk membangun pengertian, pemahaman, dan kesadaran anak didik terhadap realitas yang pluralis-multikultural. Hal ini penting dilakukan, karena tanpa adanya usaha secara sistematis, realitas keragaman akan dipahami secara sporadis, fragmentaris atau bahkan memunculkan eksklusifitas yang ekstrem. **Ketiga**, pendidikan agama tidak memaksa atau menolak anak didik karena persoalan identitas suku, agama, ras atau golongan. Mereka yang berasal dari beragam perbedaan harus diposisikan secara setara, egaliter dan diberikan medium yang tepat untuk mengapresiasi karakteristik yang mereka miliki. Masing-masing anak memiliki posisi yang sama dan harus memperoleh perlakuan yang sama. **Keempat**, pendidikan agama memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya *sense of self* kepada setiap anak didik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan diri, terutama bagi anak didik yang berasal dari kalangan ekonomi kurang beruntung, atau kelompok yang relatif terisolasi.

Pendidikan Agama memang masih banyak menuai kritik. Salah satu faktor penyebab kegagalan pendidikan agama adalah karena praktik pendidikannya lebih banyak memperhatikan aspek kognitif dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan

kurang pembinaan aspek afektif dan *konatif-volutif*, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Atau dalam praktiknya, pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi yang berakhlak mulia.

Pendidikan agama lebih mengutamakan pengajaran agama daripada pendidikan moral. Padahal intisari pendidikan agama justru terletak pada pendidikan moral tersebut. Selain itu, ada juga beberapa kelemahan lainnya, baik dalam pemahaman materi pendidikan maupun dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Dalam bidang teologi, ada kecenderungan mengarah pada paham fatalistik.
2. Bidang akhlak yang hanya berorientasi pada urusan sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama.
3. Bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian.
4. Dalam bidang hukum cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa.
5. Agama cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan.
6. Orientasi mempelajari Kitab Suci masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna.

93

Orientasi semacam ini menyebabkan terjadinya keterpisahan dan kesenjangan antara ajaran agama dan realitas perilaku pemeluknya. Oleh karena itu diperlukan reorientasi dalam pembelajaran agama. Jika pendidikan agama ingin kontekstual dengan perkembangan zaman, paradigma pendidikan yang selama ini dikembangkan harus diubah. Perubahan paradigma yang dimaksud adalah mengubah cara belajar dari model warisan menjadi cara belajar pemecahan masalah, dari hafalan ke dialog, dari pasif ke *heuristic*, dari strategi menguasai materi sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi, dari mekanis ke kreatif, dari memandangi dan menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan menjadi memandangi dan menerima ilmu dalam dimensi proses, dan fungsi pendidikan bukan hanya mengasah dan mengembangkan akal, namun mengolah dan mengembangkan hati (moral) dan keterampilan.

Karenanya, pendidikan agama dalam pelaksanaannya paling tidak metodologi pengajaran, silabus dan kurikulumnya harus memenuhi tiga hal berikut ini, yaitu:

1. Membongkar kurikulum yang eksklusif doktriner dengan kurikulum yang pluralis yang mampu membebaskan peserta didik keluar dari pandangan eksklusif.
2. Porsi moralitas dan etika universal harus diberikan secara lebih proporsional dengan pengajaran ritualitas-formalis.
3. Peserta didik perlu diberi wawasan yang cukup mengenai agama-agama lain. Karena ketidaktahuan terhadap hal tersebut sering kali menimbulkan asumsi miring bahkan negatif terhadap agama lain.

Dari segi metode pengajaran, hendaknya hubungan guru dan murid bersifat dialogis-

komunikatif. Guru tidak dipandang sebagai satu-satunya sumber belajar, murid bukan sebagai objek pengajaran. Namun guru dan murid sama-sama sebagai subjek belajar sehingga suasana belajar di kelas akan dinamis dan hidup. Dalam hal ini pendidikan bisa dimaknai sebagai pemberdayaan manusia agar mandiri dan kreatif. Reorientasi pelaksanaan pendidikan agama diharapkan dapat menghasilkan *output* yang memiliki kesalehan individual juga kesalehan sosial sebagai modal utama dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompleks dengan kondisi masyarakat yang multikultural dan multireligius.

Fenomena masuknya paham radikalisme keagamaan ke sekolah tentu perlu segera diambil langkah-langkah penanggulangan dan pencegahannya. Beberapa upaya yang bisa ditempuh antara lain:

1. Memberikan penjelasan tentang agama secara memadai. Misi ajaran agama yang sebenarnya sangat mulia dan luhur seringkali justru mengalami distorsi akibat pemahaman yang keliru terhadap beberapa aspek ajaran agama yang berpotensi menimbulkan paham radikal.
2. Penjelasan tentang toleransi. Ajaran agama sebenarnya sangat sarat dengan nilai-nilai toleransi. Namun sayang, toleransi sering difahami secara sempit sehingga tidak mampu menjadi lem perekat intra dan antar umat beragama.
3. Pengenalan tentang hubungan ajaran agama dengan kearifan lokal. Ajaran agama yang datang di Indonesia bukanlah ajaran yang bebas dari relasi sejarah lokal yang mengitarinya. Artinya, memahami ajaran agama tidak bisa dicabut dari akar sosio-historis dimana agama itu berada. Keberadaan agama di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosio-historis masyarakat Indonesia yang juga telah memiliki kearifan lokal.
4. Mengedepankan dialog dalam pembelajaran agama. Pembelajaran agama yang mengedepankan indoktrinasi faham tertentu dengan mengesampingkan faham yang lain hanya akan membuat para siswa memiliki sikap eksklusif yang pada gilirannya kurang menghargai keberadaan agama yang lain.
5. Pemantauan terhadap kegiatan dan materi mentoring keagamaan. Keberadaan kegiatan mentoring agama atau kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang lain di sekolah sesungguhnya sangat membantu tercapainya tujuan pendidikan agama.
6. Pengenalan dan penerapan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural pada dasarnya adalah konsep dan praktik pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai persamaan tanpa melihat perbedaan latar belakang budaya, sosial-ekonomi, etnis, agama, gender, dan lain-lain.

Peran Pemuda

Paham radikal merupakan akar dari intoleransi atau ketidakrukunan antarumat beragama. Anak-anak dan remaja adalah generasi penerus yang harus dilindungi dari radikalisme, sehingga perlu penanganan yang tepat. Pendidikan multikultural sangat diperlukan dalam membentuk generasi saling menghormati dalam setiap perbedaan. Keadaan psikologis anak-anak dan remaja harus tetap dipertahankan dalam pendidikan multikultural. Dalam pembentukan komunitas lintas agama, dunia bermain untuk anak-anak dan suasana santai untuk remaja harus tetap dipertahankan.

Tak bisa dipungkiri, pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga. Masa depan negeri ini bertumpu pada kualitas mereka. Namun ironisnya, kini tak sedikit kaum muda yang justru terpapar dan bahkan menjadi pelaku aksi teror yang merupakan refleksi dari paham radikalisme yang mereka anut.

Masa transisi krisis identitas kalangan pemuda berkemungkinan untuk mengalami apa yang disebut *Quintan Wiktorowicz* (2005) sebagai *cognitive opening* (pembukaan kognitif), sebuah proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal. Alasan-alasan seperti itulah yang menyebabkan mereka sangat rentan terhadap pengaruh dan ajakan kelompok kekerasan dan terorisme. Sementara itu, kelompok teroris menyadari problem psikologis generasi muda. Kelompok radikal memang mengincar mereka yang selalu merasa tidak puas, mudah marah dan frustrasi baik terhadap kondisi sosial maupun pemerintahan. Mereka juga telah menyediakan apa yang mereka butuhkan terkait ajaran pembenaran, solusi dan strategi meraih perubahan, dan rasa kepemilikan. Kelompok radikal juga menyediakan lingkungan, fasilitas dan perlengkapan bagi remaja yang menginginkan kegagahan dan melancarkan agenda kekerasannya.

Rentannya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme, mulai dari:

1. Kemiskinan
2. Kurangnya pendidikan agama yang damai
3. Gencarnya infiltrasi kelompok radikal
4. Lemahnya semangat kebangsaan
5. Kurangnya pendidikan kewarganegaraan
6. Kurangnya keteladanan
7. Tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernisasi yang negatif

Sangat memprihatinkan ketika melihat berbagai fakta yang mempertontonkan kedekatan pemuda dengan budaya kekerasan. Kehadiran *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menjadi momok baru yang menakutkan bagi kalangan generasi muda dengan berbagai provokasi, propaganda dan ajakan kekerasan yang menggiurkan. Sejak kemunculannya menghentakkan situasi keamanan bangsa ini, ISIS setidaknya telah mampu menggetarkan gairah anak muda untuk ikut terlibat dalam gerakan politik kekerasan di Suriah. Fakta-

fakta tersebut memperlihatkan bagaimana kerentanan kalangan generasi muda dari keterpengaruhan ajaran sekaligus ajakan yang disebarkan oleh kelompok radikal baik secara langsung maupun melalui media online yang menjadi sangat populer akhir-akhir ini.

Karena itulah, upaya membentengi generasi muda dari keterpengaruhan ajaran dan ajakan kekerasan menjadi tugas bersama. Ada tiga institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda, yaitu:

1. Pendidikan, melalui peran lembaga pendidikan, guru dan kurikulum dalam memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran pada generasi muda.
2. Keluarga, melalui peran orang tua dalam menanamkan cinta dan kasih sayang kepada generasi muda dan menjadikan keluarga sebagai unit konsultasi dan diskusi.
3. Komunitas: melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda.

Di atas upaya-upaya konkrit di atas, sejatinya ada beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan paham radikalisme di kalangan pemuda.

- Memperkuat pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggungjawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar warga masyarakat.
- Mengarahkan para pemuda pada berbagai aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi pemuda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya sehingga dapat mengantisipasi pemuda dari pengaruh ideologi radikal terorisme.
- Memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan.
- Memberikan keteladanan kepada pemuda. Sebab, tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi role model yang bisa diikuti dan diteladani oleh para pemuda.



Diskusi Kelompok

Fasilitator memandu diskusi kelompok sebagai bagian dari pemetaan rencana tindak lanjut guru setelah pelatihan berakhir. Dalam sesi diskusi ini, peserta guru mengeksplorasi kemampuan serta keinginan mereka dalam usaha merawat toleransi dan perdamaian di sekolah masing-masing. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan mencakup:

1. Bagaimana peserta guru dapat mengintegrasikan pembelajaran toleransi, keragaman, dan perdamaian ke dalam mata pelajaran yang diampu di masa mendatang?

| Pelajaran | Materi terkait Perdamaian |
|------------------------------|---------------------------|
| Kewarganegaraan | |
| Agama Islam | |
| Kesenian | |
| Sejarah | |
| ... (mata pelajaran lainnya) | |

2. Bagaimana rencana peserta guru untuk membangun lingkungan sekolah yang inklusif?
3. Apakah ada inisiatif tertentu yang dapat dilakukan antara guru dengan siswa berkolaborasi membentuk sekolah yang lebih toleran dan damai? Jika ada, apakah inisiatif tersebut?

| Kelompok | Inisiatif Kolaborasi |
|----------|----------------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |



Bab 04.

Ke(tidak) setaraan Pendidikan di Indonesia

98

Ke(tidak)setaraan Pendidikan di Indonesia



| | |
|---------------|--|
| Bab | Ke(tidak)setaraan Pendidikan di Indonesia |
| Durasi | 190 menit |
| Metode | <ul style="list-style-type: none"> • Permainan • Presentasi Materi • Studi Kasus • Diskusi Terbuka • <i>Pre-Posttest</i> • Lembar Kerja Jurnal • Lembar Gagasan |
| Tujuan | <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peningkatan pengetahuan guru terhadap isu kesetaraan di Indonesia • Mendorong sikap persetujuan guru terhadap kesetaraan gender • Mendorong peran guru, khususnya guru perempuan, memperjuangkan kesetaraan gender dan perdamaian di Indonesia |
| Indikator | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta guru memiliki peningkatan pengetahuan terkait isu kesetaraan gender • Peserta guru menyatakan persetujuan bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki akses yang setara dalam akses serta kesempatan ekonomi, sosial, dan politik • Peserta guru perempuan berkomitmen memperjuangkan kesetaraan dan perdamaian di lingkungan sekolah |
| Pokok Bahasan | <ul style="list-style-type: none"> • Kuis Awal (5 menit) • Bias dan Privilese (45 menit) • Ketidaksetaraan di Sekitar Kita (70 menit) • Ketidaksetaraan Pendidikan di Indonesia (40 menit) • Kerja Jurnal dan Gagasan (25 menit) • Kuis Akhir (5 menit) |
| Verifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil asesmen awal dan akhir • Hasil lembar kerja jurnal dan gagasan • Hasil feedback pernyataan komitmen peserta guru |
| Persiapan | <ul style="list-style-type: none"> • Materi Presentasi • Permainan <i>Privilege Walk</i> • Lembar Kerja Jurnal • Lembar Gagasan • Pre-posttest |



Kuis Awal

Sebelum memulai pembelajaran mengenai Peran Guru dalam Toleransi dan Bina Damai, Anda diharapkan mengisi kuis terlebih dahulu!

.....
 Nama :

.....
 Gender :

.....
 Usia :

.....
 Provinsi :

.....
 Tempat tinggal :

Silakan beri tanda silang (X) pada kolom "Benar" atau "Salah" terhadap setiap pernyataan sesuai dengan apa yang Anda ketahui.

| No | Pernyataan | Benar | Salah |
|----|---|-------|-------|
| 1 | Perempuan harus memiliki hak dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki | | |
| 2 | Laki-laki memiliki kemampuan yang lebih dalam memimpin dari pada perempuan sehingga layak menjadi pemimpin politik | | |
| 3 | Perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan seperti laki-laki | | |
| 4 | Laki-laki merupakan tulang punggung keluarga sehingga lumrah memiliki hak lebih besar dibanding perempuan dalam pekerjaan | | |
| 5 | Perempuan lebih cocok mengerjakan pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki | | |



Sub Sesi 01

Memahami Bias dan Privilese

Waktu

45 Menit

- Permainan Mengenal Bias Pribadi 10 menit
- Diskusi dan Studi Kasus 10 menit
- Permainan Mengenal Privilese 15 menit
- Diskusi dan Studi Kasus 10 menit

Metode

Permainan dan Studi Kasus



Catatan untuk fasilitator

Fasilitator memandu sesi permainan setelah perkenalan, sebelum menyampaikan presentasi materi. Seluruh bahan permainan tersedia dalam bagian ini

Setiap orang pasti memiliki bias masing-masing, dan sangat penting bagi kita untuk mengenal bias yang kita miliki agar kita tidak memiliki sikap menghakimi terhadap orang atau kelompok lain tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka alami atau rasakan. Agar terhindar dari perilaku menghakimi, mari kita berkenalan dengan bias personal atau bias pribadi, yaitu sikap mempercayai asumsi kita terhadap keadaan orang lain dengan menganggap keadaan orang lain sama seperti keadaan kita, atau mempercayai status orang lain berdasarkan kabar burung yang beredar. Dalam memahami bias personal, dapat dilakukan dengan proses permainan penilaian diri sendiri, yang mencakup menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Proses menjawab pertanyaan ini tidak perlu dibagikan kepada sesama peserta, melainkan menjadi catatan diri sendiri saja.

- **Apa identitas gender Anda?**
(Anda dipersilakan untuk mengidentifikasi gender Anda: perempuan, laki-laki, trans perempuan, trans laki-laki, atau yang lainnya)
- **Di mana Anda tinggal?**
(Apakah anda tinggal di pedesaan, kota, atau daerah pinggiran? Apakah Anda tinggal di kos, kontrakan, rumah, atau apartemen?)
- **Apa agama atau kepercayaan Anda?**
(Anda dipersilakan untuk mengidentifikasi agama atau kepercayaan Anda: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sunda Wiwitan, atau yang lainnya)
- **Berapa usia Anda?**
(Anda dipersilakan untuk mengidentifikasi usia Anda secara numerik, dan bandingkan klasifikasi kelompok usia Anda, apakah Anda termasuk kelompok usia muda, yaitu usia 16 - 30 tahun berdasarkan UU No. 40 tahun 2009, termasuk kelompok usia dewasa, yaitu usia 20 - 60 tahun, atau termasuk kelompok usia lanjut, yaitu usia di atas 60 tahun berdasarkan UU No. 13 tahun 1998)
- **Apakah Anda bekerja?**
(Silakan identifikasi status pekerjaan Anda, apakah tidak bekerja, bekerja secara penuh

- waktu, atau bekerja secara paruh waktu)
- **Apa identitas suku Anda?**
(Apakah Anda termasuk Suku Jawa, Betawi, Batak, Minang, Dayak, Banjar, Melayu, Bali, Abui, Bugis, Gorontalo, Kaili, Asmat, Ambai, atau yang lainnya)
 - **Apakah Anda memiliki disabilitas tertentu?**
(Apakah Anda memiliki disabilitas Tuli, Buta, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, atau yang lainnya?)

Setelah mengidentifikasi identitas diri yang melekat, kita dapat melakukan refleksi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Lagi-lagi, untuk menjawab pertanyaan di bawah ini tidak perlu dibagikan ke dalam forum pertemuan, melainkan menjadi catatan pribadi saja. Jika jawaban dari pertanyaan adalah "iya", maka tuliskan skor "1", sedangkan jawaban "tidak" bernilai "0".

Tabel 1.
Permainan
Identifikasi
Bias Pribadi

| No | Pernyataan | Iya | Tidak |
|----|--|-----|-------|
| 1 | Apakah Anda dapat mengakses Internet dengan mudah setiap hari dan setiap saat? | | |
| 2 | Apakah Anda dapat memilih untuk menikah atau tidak menikah? | | |
| 3 | Apakah Anda dapat menikah secara sah? | | |
| 4 | Apakah Anda dapat beribadah tanpa gangguan? | | |
| 5 | Apakah Anda dapat naik turun tangga dengan mudah tanpa asistensi orang lain atau alat? | | |
| 6 | Apakah Anda dapat memahami berita tanpa bahasa isyarat? | | |
| 7 | Apakah Anda dapat mengidentifikasi toilet dengan mudah tanpa harus bertanya? | | |
| 8 | Apakah Anda dapat mengidentifikasi toilet dengan mudah tanpa harus bertanya? | | |
| 9 | Apakah terdapat penjagaan ketat di daerah tempat tinggal Anda? | | |

| No | Pernyataan | Iya | Tidak |
|----|--|-----|-------|
| 10 | Apakah Anda memiliki jaminan kesehatan dan jaminan hari tua? | | |
| 11 | Apakah Anda memiliki penghasilan yang tetap setiap bulan? | | |

Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita perlu memahami bahwa tidak semua orang dapat menjawab “iya” untuk setiap pertanyaan yang ada. Ada kelompok tertentu yang tidak bisa memiliki apa yang kita miliki saat ini jika tidak ada keadaan tertentu yang diusahakan, contohnya: menonton berita tanpa bahasa isyarat. Kelompok Tuli akan mengalami kesulitan saat menonton berita yang tidak disertai dengan bahasa isyarat, dengan demikian, akses informasi terhadap kelompok ini menjadi tidak setara dengan kita sebagai kelompok yang tidak memiliki disabilitas Tuli. Contoh lain adalah mengenai pekerjaan, tentu orang dengan pekerjaan paruh waktu memiliki kerentanan lebih besar dibanding orang yang memiliki pekerjaan penuh waktu. Pekerja paruh waktu biasanya tidak memiliki jaminan kesehatan atau jaminan hari tua yang dibebankan kepada kantor, melainkan mereka harus mengusahakannya sendiri. Perbedaan-perbedaan situasi inilah yang perlu kita ketahui agar kita terhindar dari sikap menghakimi.

103

Proses di atas pun menjadikan kita dapat lebih memahami bahwa terdapat identitas atau keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada seseorang, secara historis seakan telah menentukan “nasib” hidup orang tersebut. Terdapat beberapa keadaan yang tidak bisa kita samakan dengan keadaan kita hanya atas dasar “kita sama-sama manusia” atau “kita sama-sama orang Indonesia”. Hal inilah yang terkadang memunculkan bias dalam diri kita dan menjadikan kita seakan mengerti keadaan orang lain tanpa tahu identitas, keadaan, serta sejarah yang melekat pada diri orang tersebut. Bias didefinisikan sebagai tindakan mendukung atau menentang orang atau hal tertentu dengan cara yang tidak adil, karena membiarkan opini pribadi mempengaruhi penilaian kita terhadap hal tersebut. Bias implisit adalah asosiasi otomatis yang ada dalam pikiran orang tentang sekelompok orang, termasuk stereotip. Ini terbentuk secara otomatis dan tidak disengaja, tetapi bisa saja menghasilkan sikap, perilaku, atau tindakan yang berprasangka buruk untuk atau terhadap seseorang atau sekelompok orang.



Studi Kasus



Foto: Ari Saputra, Detik

Tak dapat dipungkiri bahwa kesulitan mendapatkan pekerjaan dialami oleh hampir semua orang saat pandemi COVID-19. Hal ini banyak dirasakan khususnya bagi angkatan kerja muda yang baru saja lulus dari pendidikan tinggi. Sesuai dengan Berita Resmi Statistik pada 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda mencapai 20.46%, jauh lebih tinggi daripada kelompok usia lain. Selain data yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia didominasi oleh kelompok usia muda, (20-24 dan 25-29 tahun), nyatanya kesempatan lapangan pekerjaan yang sempit tanpa adanya kepastian dari pemerintah serta diperparah dengan fleksibilitas dunia kerja menyebabkan kelompok muda ini akan terus dibayang-bayangi pengangguran dan kemiskinan. Banyak orang masih berpandangan, kelompok muda dapat memiliki kualitas hidup yang sama seperti kelompok usia tua, seakan mengabaikan situasi finansial, sosial, dan politik yang berubah sehingga kelompok muda banyak dihadapkan pada ketidakpastian. Tekanan kepada kelompok muda dalam dunia kerja yang dianggap sebagai kelompok yang lebih energik, inovatif, kreatif, dan suka akan tantangan menyebabkan kelompok muda berada pada kondisi sulit menerima segala tugas, dieksploitasi, dan terpapar pada risiko *burnout*.



Permainan Mengenal Privilese



Catatan untuk fasilitator

Fasilitator memandu sesi permainan lanjutan, sebelum menyampaikan presentasi materi. Seluruh bahan permainan tersedia dalam bagian ini

Setelah mengenal bias pribadi, kita juga perlu mengenal keadaan menguntungkan atau privilese (privilege) yang kita miliki. Terkadang, keadaan privilese inilah yang membedakan kita dapat menikmati fasilitas atau kenyamanan yang sudah tersedia di lingkungan kita. Hal ini pulalah yang mungkin saja menjadikan kita menganggap bahwa semua orang dapat menikmati semua hal yang sudah kita miliki saat ini. Dalam memahami hal ini, kita dapat melakukan permainan Jalan Privilese atau Privilege Walk berikut ini.

Privilege Walk

- Silakan laksanakan pembagian nomor kepada peserta yang hadir
- Nomor yang dapat dibagikan adalah nomor 1 - 9

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

- Setiap nomor kemudian memiliki peran yang mewakilinya, antara lain:
 1. Laki-laki, menteri pendidikan, 30 tahun, sudah berkeluarga
 2. Perempuan, petani, 30 tahun, janda, korban bencana
 3. Trans perempuan, 35 tahun, lajang, perias
 4. Perempuan, siswa sekolah menengah, 17 tahun, desa
 5. Laki-laki, tuli, 25 tahun, duda anak 2
 6. Perempuan, kepala kantor kecamatan, 30 tahun, lajang
 7. Laki-laki, orang dengan HIV dan AIDS, 25 tahun, kerja di agensi
 8. Perempuan, orang dengan HIV dan AIDS, 25 tahun, punya anak 1
 9. Laki-laki, freelance, 25 tahun, belum berkeluarga
- Dalam situasi yang memiliki peserta lebih dari sembilan orang, maka dapat diberlakukan sistem berulang, yaitu setiap nomor bisa saja jatuh pada dua atau lebih orang peserta
- Akan terdapat pernyataan yang dibacakan kepada setiap orang yang bermain
- Apabila pernyataan yang dibacakan sesuai dengan peran yang sedang dimainkan,

pemain akan memberikan nilai +1 (plus satu) pada diri mereka, jika tidak sesuai maka nilainya -1 (minus satu), sedangkan jika ragu-ragu maka berikan nilai 0 (nol)

- Total nilai akan dijumlah pada akhir permainan
- Pernyataan yang dibacakan mencakup:
 1. Saya bisa melamar pekerjaan di perkotaan dengan mudah
 2. Saya bisa mendapatkan layanan kesehatan yang memuaskan
 3. Saya bisa bergaul dengan siapapun tanpa membuat orang takut
 4. Saya bisa melamar pekerjaan di kantor kementerian
 5. Saya bisa berkeluarga dengan aman tanpa prasangka tetangga
 6. Saya dapat mengakses informasi dengan mudah tanpa bantuan khusus
- Setiap pemain akan menjelaskan total nilai yang dimilikinya dan memberikan pendapat mengapa ia bisa mendapatkan nilai tersebut



Panduan Pertanyaan bagi Fasilitator

1. Siapa peserta yang memiliki nilai paling besar dan paling rendah? Mengapa demikian?
2. Adakah peserta dengan nomor peran yang sama? Apakah memiliki nilai yang berbeda? Mengapa demikian?
3. Apa pandangan peserta terhadap permainan ini? Adakah wawasan baru yang peserta dapatkan dari permainan ini?

Permainan tersebut berusaha untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa kita memiliki privilese tertentu yang pada akhirnya menentukan apakah kita dapat menikmati fasilitas dengan baik, atau justru terhambat atas keadaan tertentu yang melekat pada diri kita. Hal tersebut juga menyadarkan pada diri kita bahwa ada status atau keadaan tertentu yang akhirnya membuat suatu kelompok sulit mengakses beberapa fasilitas jika fasilitas tersebut tidak ramah akan akses yang inklusif, contohnya: kantor atau gedung yang hanya memiliki tangga tanpa jalur khusus kursi roda akan menyulitkan bagi kelompok dengan disabilitas fisik, syarat bekerja yang harus menyertakan surat sehat atau syarat “sehat jasmani dan rohani” akan menjadi hambatan bagi orang dengan HIV dan AIDS atau kelompok disabilitas untuk dapat melamar pekerjaan tersebut. Padahal, akses terhadap pekerjaan, akses terhadap hak politik, dan akses lainnya merupakan bagian dari hak setiap manusia yang seharusnya dipenuhi tanpa harus memandang status identitas orang tertentu.

Keadaan menguntungkan yang kita miliki disebut sebagai privilese, yang didefinisikan sebagai keuntungan yang hanya dimiliki oleh satu orang atau sekelompok orang, biasanya karena posisinya atau karena mereka kaya; keuntungan atau otoritas khusus yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu. Privilese ini menggambarkan kelebihan yang dimiliki orang, atau bahkan kita, yang tidak sering terpikirkan karena kita tidak pernah mengalami nasib sebagai kelompok “tertindas”. Kita perlu mengakui bahwa kita memiliki privilese tertentu dengan tingkat yang tertentu pula, sehingga kita dapat menyadari bahwa masih ada ketimpangan di sekitar kita yang merupakan buah dari kekerasan struktural. Hal ini menyebabkan orang lain dengan identitas tertentu tidak dapat menikmati akses yang berbeda dengan kita karena privilese yang kita miliki.



Studi Kasus



Foto: BBC News Indonesia

Seorang pekerja dengan disabilitas fisik menceritakan pengalamannya sulitnya mendapatkan pekerjaan karena status disabilitasnya. Ia mengaku hampir 50 lowongan pekerjaan ia daftar namun sayangnya semua nihil, hanya hingga dua dan tiga tahap saja namun setelah itu tidak ada kepastian. Kisah yang serupa juga dialami oleh banyak anak muda Tuli saat melamar pekerjaan. Keengganan pihak penyedia kerja (kantor) untuk menyediakan penerjemah bahasa isyarat bahkan dalam tahap wawancara menjadi salah satu alasan kelompok disabilitas tidak dapat mengakses pekerjaan formal. Menurut UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, badan pemerintah memiliki kewajiban untuk mempekerjakan setidaknya 2% orang dengan disabilitas dari jumlah total pegawai, dan badan swasta berkewajiban untuk mempekerjakan setidaknya 1%. Sayangnya, tidak ada sama sekali data yang disediakan oleh pemerintah berapa banyak pekerja dengan disabilitas yang sudah benar-benar dipekerjakan.



Sub Sesi 02

Ketidaksetaraan di Sekitar Kita

Waktu

45 Menit

- Konsep Kesetaraan Gender 10 menit
- Ketidaksetaraan di Sekitar Kita 15 menit
- Studi Kasus dan Diskusi 10 menit
- Temuan Ketimpangan di Tiga Provinsi 10 menit
- Diskusi 5 menit
- Diskriminasi terhadap Kelompok Transpuan 10 menit
- Studi Kasus dan Diskusi 10 menit

Metode

Presentasi dan Studi Kasus

Konsep Kesetaraan Gender



Fasilitator menyampaikan materi presentasi disertai dengan studi kasus di bagian ini. Sebelum memulai, ada baiknya melakukan penyegaran terlebih dahulu. Dalam penyampaian materi, sangat penting melakukan cek apakah terdapat pertanyaan dari peserta

Referensi Pembelajaran Tambahan

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنِّي بِبَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلَّزِينَ هَاجِرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخَلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Q.S. Ali Imran Ayat 195

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."

ויברא אלהים | את־האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם:

Kejadian 1:27

Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

Kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, hak, tanggung jawab, dan kesempatan setiap manusia tidak akan bergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender menyiratkan bahwa kepentingan, kebutuhan, dan prioritas perempuan dan laki-laki dipertimbangkan - mengakui keragaman situasi dan kondisi berbagai kelompok perempuan dan laki-laki dengan status tertentu. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dipandang sebagai hak asasi manusia dan sebagai prasyarat untuk memenuhi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia.

Konsep kesetaraan gender tidak lepas dari inklusi sosial yang didefinisikan sebagai proses meningkatkan partisipasi dalam masyarakat, terutama bagi orang-orang yang terpinggirkan, melalui peningkatan peluang, akses ke sumber daya, akses untuk menyatakan pendapat, dan penghormatan terhadap hak kelompok terpinggir tersebut. Konsep inilah yang kemudian akhirnya semacam "disatukan" menjadi sebuah konsep bernama Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial yang merupakan sebuah konsep membahas relasi kuasa yang tidak setara yang dialami oleh orang-orang atas dasar gender, ketidakmampuan (kemiskinan dan disabilitas), usia, lokasi, kasta atau etnis, bahasa, atau kombinasi dari dimensi-dimensi tersebut. Pemenuhan nilai kesetaraan gender dan inklusi sosial ini berfokus pada kebutuhan untuk tindakan menyeimbangkan kembali relasi kuasa ini, mengurangi kesenjangan, dan memastikan persamaan hak, peluang, akses dan menghormati semua individu tanpa memandang identitas sosial mereka. Hal inilah yang memunculkan sebuah respon atau aksi yang dinamakan aksi afirmatif. Aksi afirmatif adalah proses mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan representasi kelompok marginal tertentu, baik perempuan maupun kelompok minoritas lain dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan budaya yang secara historis telah meminggirkan kelompok tersebut. Beberapa contoh aksi afirmatif dalam kehidupan sehari-hari mencakup: mengutamakan perempuan untuk dipilih dalam rekrutmen pekerjaan, melakukan sesi pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi peserta yang semuanya adalah perempuan, menyelenggarakan kegiatan diskusi dengan pembicara yang semuanya adalah perempuan, dan kegiatan lain yang mengutamakan representasi kelompok marginal dan rentan untuk mengambil porsi lebih atau paling besar dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu perlu didasari dengan konteks atau keadaan tertentu yang memang pada akhirnya meminggirkan kelompok tersebut, baik secara jumlah maupun secara kuasa. Lantas, siapa saja kelompok marginal dan rentan yang ada di sekitar kita? Pemetaan sederhana kelompok marginal dan rentan dapat dilihat pada Tabel 1. Pemetaan ini tentu tidak serta merta dapat menjadi acuan bagi pemetaan kelompok marginal dan rentan di seluruh negara, melainkan sebagai acuan dasar yang mengikuti konteks masing-masing negara.

Tabel 2.
Permainan
Identifikasi Bias
Pribadi

| | |
|---|---|
| <p>Kelompok Tak Marginal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki (terutama mereka yang berasal dari status ekonomi tinggi) • Kelompok dominan atas etnis, tempat tinggal, kepercayaan, bahasa, dan pemilikan tanah • Heteroseksual • Warga negara tercatat • Orang tanpa disabilitas • Orang yang hidup di kota besar | <p>Kelompok Marginal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan • Orang miskin • Kelompok marginal atas etnis, tempat tinggal, kepercayaan, bahasa, dan pemilikan tanah • Kelompok LGBT • Warga negara tak tercatat • Orang dengan disabilitas • Orang yang hidup di daerah terpencil |
| <p>Kelompok Tak Rentan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang yang hidup di area tidak terdampak bencana alam • Orang tanpa HIV dan AIDS • Orang bukan pekerja seks • Orang dewasa | <p>Kelompok Rentan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang yang hidup di area terdampak bencana alam • Orang dengan HIV dan AIDS • Pekerja seks • Anak-anak, remaja, dan lansia |

Sayangnya, di negara Indonesia, kelompok dengan status tertentu yang termasuk dalam kelompok marginal serta kelompok rentan memiliki berbagai macam tantangan sehingga akses mereka terhadap hak sosial, ekonomi, dan politik menjadi terhambat. Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, tantangan bagi kelompok marginal ini disebabkan oleh kekerasan struktural dan kultural sehingga mereka tak dapat mengakses beberapa fasilitas. Sebagai contoh: warga negara tak tercatat atau mereka yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk pada akhirnya tidak dapat mengakses bantuan pemerintah, mengakses jaminan kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau bahkan melamar kerja, atau berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Ketidaksetaraan di Sekitar Kita



Fasilitator menyampaikan materi presentasi disertai dengan studi kasus di bagian ini. Sebelum memulai, ada baiknya melakukan penyegaran terlebih dahulu. Dalam penyampaian materi, sangat penting melakukan cek apakah terdapat pertanyaan dari peserta

Pada bagian ini, kita akan fokus membahas ketidaksetaraan yang terjadi pada kelompok perempuan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa secara historis dan struktural maupun kultural, kelompok perempuan menghadapi tantangan atau keterbatasan yang diberlakukan oleh kelompok dominan atau kelompok yang memiliki kuasa atas sumber daya. Apakah benar demikian?

Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian dari lembaga riset Value Champion dari Singapura menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan di Asia Pasifik setelah India dan Filipina. Permasalahan tentang kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, pemidanaan terhadap ekspresi perempuan, maupun minimnya pemenuhan hak perempuan secara umum termasuk baik segi sosial maupun ekonomi masih menjadi persoalan di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan banyaknya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang justru materinya mendiskriminasi perempuan. Keadaan tersebut juga diperparah pada absennya hukum perlindungan perempuan dari kekerasan karena Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tak kunjung sah.

Pembahasan RUU PKS yang lambat dan selalu ditunda bertolak belakang pada fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW*) pada tahun 1984. Hasil ratifikasi ini kemudian dimandatkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pada tataran yang lebih teknis, Indonesia juga sudah memiliki dan mengesahkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Namun, setelah usia CEDAW menginjak 35 tahun, persoalan terhadap kelompok perempuan di Indonesia masih terjadi. Hasil penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada tahun 2019 menyebutkan bahwa setidaknya ada empat aspek persoalan perempuan yang ada di Indonesia, tiga diantaranya yaitu:

- Indonesia masih memiliki sejumlah kebijakan internet diskriminatif yang menjadi sumber kekerasan berbasis gender. UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat pasal karet 27 (3) mengenai pencemaran nama baik sering kali menjadi alat untuk menjerat ekspresi perempuan, salah satunya mengkriminalisasi penyintas kekerasan seksual yang berusaha bersuara di dunia maya. Undang-Undang Anti Pornografi no. 44 tahun 2008 yang awalnya dianggap sebagai salah satu bentuk “upaya perlindungan hak perempuan dan anak” justru dengan terang

¹ Misoginis mengacu pada persepsi, sikap, perilaku, atau tindakan yang memperlihatkan kepercayaan bahwa kelompok laki-laki lebih baik dibanding kelompok perempuan. Cambridge Dictionary. (2020). Misogynist. Diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/misogynist> pada 17 Juni 2020. Cambridge University Press, 2020.

mengkriminalisasi perempuan. Pasal 34 memuat ancaman pidana bagi pihak yang menjadi objek dan model muatan pornografi. Penerapan pasal ini dengan pola pikir misoginis¹ justru mengkriminalisasi perempuan korban *revenge porn*, yakni penyebaran video hubungan seksual yang diwarnai dengan ancaman tanpa persetujuan (*consent*), biasanya dengan motif balas dendam, untuk disebar ke publik. Pasal ini menempatkan status perempuan yang menjadi korban dalam *revenge porn*, justru sebagai pelaku pornografi dan tidak jarang justru kelompok laki-laki yang menyebarkan video tersebut terbebas dari hukuman.

- Masih lemahnya perlindungan hak atas privasi perempuan di Indonesia dibuktikan dengan data dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, bahwa dari 1.330 korban pinjaman online di tahun 2018, 72% dari total angka tersebut adalah perempuan. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online mencakup akses tanpa izin data pribadi pengguna seperti foto dan daftar kontak di gawai korban. Apabila korban gagal bayar, maka perusahaan tersebut menyalahgunakan data pribadi yang dikumpulkan untuk mengintimidasi korban. Berbagai pelanggaran penyalahgunaan data pribadi tersebut mencakup pengancaman, fitnah, penipuan, hingga pelecehan seksual.
- Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia belum substansial sehingga menghasilkan berbagai kebijakan yang tidak berperspektif gender. Keberadaan perempuan dalam politik adalah hasil dari perjuangan gerakan feminisme pada gelombang pertama atas hak dipilih dan memilih. Meski demikian, posisi perempuan untuk terlibat aktif di dalam dunia politik, khususnya di Indonesia, masih kurang menyentuh aspek substansial. Hal ini terlihat dari penitikberatan partai politik hanya pada pemenuhan kuota untuk pemilihan umum legislatif (Pileg) yang sudah dimandatkan dalam dua perundang-undangan. Pertama, UU Nomor 2 Tahun 2008 yang mengisyaratkan jumlah keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen. Kedua, UU No. 10 Tahun 2008 yang mengharuskan sekurang-kurangnya 30% perempuan, pada saat pencalonan legislatif. Namun, keberadaan instrumen hukum ini belum menjamin partai politik untuk memberikan pemahaman kesetaraan gender kepada para kadernya. Salah satu buktinya adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang tak kunjung rampung. Di tahun 2018, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa terdapat 421 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia.

Selain permasalahan yang ditemukan oleh lembaga ELSAM di atas, permasalahan yang dialami oleh kelompok perempuan juga tercermin dalam Indeks Ketimpangan Gender yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya. Pada laporan tahun 2018, ditemukan bahwa tingkat ketimpangan gender Indonesia selama periode 2000 - 2017 terus mengalami penurunan, dari angka sebesar 0,563 hingga menjadi 0,453. Indonesia menempati peringkat 4 dari 10 negara di Asia tenggara terkait ketimpangan gender. Hasil pengukuran dalam indeks ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan peran perempuan dengan laki-laki yang cukup signifikan dalam pembangunan di Indonesia, yang diindikasikan oleh indikator kesehatan reproduksi, pemberdayaan pencapaian pendidikan dan keterwakilan dalam jabatan publik, serta partisipasi ekonomi.



Studi Kasus



Di Indonesia, kelompok perempuan merupakan garda terdepan sebagai tenaga kesehatan dalam menangani pasien COVID-19. Hingga 70% tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 adalah perempuan. Namun sayangnya, perempuan masih dibayang-bayangi peran ganda karena tidak hanya melakukan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan, mereka juga dianggap memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu potret bahwa ketimpangan dan ketidaksetaraan gender masih terjadi di tanah air. Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia, partisipasi politik perempuan di tanah air masih rendah, kita dapat melihat bahwa hanya 5 dari 34 Menteri di era Joko Widodo adalah perempuan, dan hanya 20,87% dari keseluruhan anggota legislatif adalah perempuan, di bawah standar minimal partisipasi sebesar 30%. Jumlah tersebut termasuk di antara negara-negara yang memiliki keterwakilan perempuan yang rendah di Asia Tenggara. Ketimpangan lainnya tercermin dalam aspek pendidikan dan ketenagakerjaan. Partisipasi perempuan dalam pendidikan hanya 44,47% sedangkan laki-laki sebesar 53,21%, kemudian mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan sebesar 50,7% sedangkan laki-laki mencapai 81,8%. Norma yang melanggengkan laki-laki lebih berhak atas pendidikan dan pekerjaan, karena mereka akan menjadi pemimpin keluarga, masih berlaku di banyak daerah di Indonesia. Dalam konteks COVID-19 juga, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pew Research Center, 70% orang Indonesia percaya bahwa laki-laki harus memiliki hak lebih untuk pekerjaan dibandingkan dengan perempuan dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Berefleksi terhadap hal ini, apakah terdapat ketimpangan representasi posisi yang diamati oleh peserta?



Panduan Pertanyaan bagi Fasilitator

1. Apakah ada pengalaman peserta melihat atau mengalami sendiri ketimpangan atau ketidaksetaraan di lingkungan tempat tinggal, pergaulan, maupun tempat kerja?
2. Bagaimana situasi pemenuhan hak guru di Indonesia, apakah menurut peserta sudah ideal?
3. Menurut peserta, faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia?

Temuan Ketimpangan di Tiga Provinsi



Fasilitator menyampaikan materi presentasi disertai dengan studi kasus di bagian ini. Sebelum memulai, ada baiknya melakukan penyegaran terlebih dahulu. Dalam penyampaian materi, sangat penting melakukan cek apakah terdapat pertanyaan dari peserta. Pengalaman pribadi peserta yang berkaitan dengan bagian ini juga sangat penting untuk diobservasi dan dicatat

Pada periode Juni - Oktober 2020, tim Creative Youth for Tolerance (CREATE) mengadakan analisis gender beserta studi baseline untuk melihat gambaran detail situasi intoleransi di masing-masing provinsi. Analisis gender sendiri dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang mencakup studi literatur dan seri Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion - FGD) melibatkan pihak pemerintah nasional dan provinsi serta organisasi masyarakat sipil dan aktivis. Analisis memperlihatkan adanya perbedaan situasi yang dialami oleh kelompok perempuan dan transpuan mencakup diskriminasi dalam aspek regulasi, akses, partisipasi hingga kesempatan sehingga menambah kerentanan mereka menjadi korban intoleransi. Temuan general tiap provinsi dalam analisis gender yang berjudul "*Women in the Vortex of Intolerance and Discrimination in Indonesia*" (Perempuan dalam Pusaran Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia) dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Temuan di Tiap
Provinsi Seputar
Perempuan dalam
Pusaran Intoleransi
dan Diskriminasi di
Indonesia

| No | Provinsi | Temuan |
|----|------------------|--|
| 1 | Jawa Barat | <p>Setidaknya ada 90 peraturan tentang pakaian yang menyasar sebagian besar siswa perempuan. Peraturan tersebut secara tidak langsung mengesahkan segregasi sosial bagi siswa yang memiliki keyakinan berbeda. Meski peraturan tersebut hanya menyasar siswa dengan keyakinan atau agama tertentu, namun tekanan yang datang dari siswa dan guru lain membuat siswa muslim perempuan yang tidak mau berhijab merasa tertekan.</p> <p>Pembelajaran jarak jauh masih bias gender: sekolah berasumsi bahwa akan ada satu orang tua di rumah, dalam hal ini orang tua perempuan, akan membantu siswa untuk belajar. Orang tua perempuan kemudian memiliki beban ganda, tidak hanya untuk bekerja secara profesional, tetapi juga harus membantu anak-anaknya dalam pembelajaran jarak jauh. Beberapa kasus menunjukkan bahwa orang tua perempuan memiliki beban tiga kali lipat bahwa dalam sebuah keluarga, perempuan juga harus melakukan pekerjaan rumah tangga.</p> |
| 2 | Jawa Timur | <p>Siswa perempuan menghadapi beban yang lebih besar dan waktu serta kesempatan yang terbatas dibandingkan siswa laki-laki. Ini terkait dengan pekerjaan rumah tangga yang dibebankan kepada siswa perempuan karena masyarakat masih menganggap pekerjaan rumah tangga adalah "tugas perempuan". Beberapa siswa perempuan juga harus mengepel dan menyapu lantai, merawat adik-adiknya, dan membantu orang tua berjualan sambil belajar daring.</p> |
| 3 | Sulawesi Selatan | <p>Pada tahun 2017, Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan terkait pelarangan kegiatan kelompok Syiah. Peraturan yang berbentuk surat edaran ini menjadi dasar bagi kelompok konservatif untuk membubarkan pertemuan-pertemuan publik yang secara subjektif dianggap "Syiah". Ada juga peraturan daerah, seperti di Barru, Soppeng, dan Enrekang yang mengatur tentang busana muslim yang menekankan perempuan muslim untuk berhijab. Peraturan tersebut juga berlaku di sekolah yang mewajibkan siswa muslim perempuan berhijab.</p> <p>Guru perempuan menghadapi tantangan yang lebih besar selama pandemi. Di rumah mereka, mereka harus membantu anak-anak mereka dalam pembelajaran jarak jauh serta melakukan pekerjaan mereka sebagai guru (untuk memberikan pembelajaran jarak jauh). Mereka menghadapi jadwal yang ketat ketika mereka juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Hal ini mengakibatkan guru perempuan tidak memiliki waktu untuk merencanakan sesi pembelajaran mereka agar lebih kreatif dan efisien.</p> |

Di level nasional, kelompok perempuan di Indonesia merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan, baik terhadap kekerasan yang dilakukan langsung oleh pelaku individu, maupun kekerasan struktural yang dilakukan oleh institusi, termasuk negara. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2018, sejak tahun 2009 terdapat 421 kebijakan diskriminatif di Indonesia. 56% dari total kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah, selebihnya merupakan surat edaran keputusan kepala daerah dari tingkat kecamatan hingga desa. Dari ratusan kebijakan yang diskriminatif, 333 di antaranya merupakan kebijakan yang menysasar perempuan, seperti pengaturan sandang (berpakaian), jam malam, dan pelarangan kegiatan prostitusi dengan standar yang tidak jelas.

Pembatasan jam malam dan larangan prostitusi dimaksudkan untuk membatasi aktivitas pekerja seks, yang justru membuka peluang kriminalisasi terhadap perempuan yang bekerja hingga larut malam. Lebih lanjut lagi, aturan pembatasan jam malam ini bisa membatasi akses kesehatan bagi kelompok perempuan yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan saat itu. Selain itu, Ismail Hasani² menambahkan ada 71 produk hukum daerah intoleran, data tahun 2019 menunjukkan ada 24 produk hukum daerah intoleran di Yogyakarta dan 91 produk hukum daerah intoleran di Jawa Barat. SETARA Institute juga mengungkapkan bahwa tindakan intoleransi ditargetkan pada individu, sebanyak 136 kasus.

Lalu, bagaimana peran kelompok perempuan dalam usaha perdamaian? Pada tahun 2015, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 2242 yang bertujuan untuk mendorong negara-negara anggota PBB memastikan partisipasi aktif perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan di setiap negara sebagai tindak lanjut dari Resolusi Nomor 1325. Hal ini dipastikan dengan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam upaya perdamaian, meningkatkan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan, meningkatkan kemitraan dengan berbagai aktor perempuan, dan berinvestasi dalam peningkatan keterampilan perempuan. Hal ini juga diadaptasi dalam Resolusi 2250 yang berisi seruan kepada negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan partisipasi kelompok muda dalam upaya perdamaian melalui strategi serupa. Sayangnya, penerapannya di Indonesia belum dikatakan cukup berarti.

Keterlibatan perempuan dalam perdamaian, baik dalam *peacekeeping*, *peacemaking*, maupun *peacebuilding* di Indonesia dinilai sangat terbatas. Sejak tahun 1957, Indonesia telah mengirimkan 3.080 pasukan penjaga perdamaian ke misi penjaga perdamaian PBB, tetapi hanya 106 di antaranya adalah perempuan. Secara global, hanya 2% mediator perempuan yang berpartisipasi dalam pengembangan 1.187 perjanjian perdamaian dari tahun 1990 hingga 2017, dan hanya 5,46% penjaga perdamaian perempuan dari total 89.681 orang. Komitmen Indonesia untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam menjaga perdamaian disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam Dialog Tingkat Menteri ASEAN tentang Penguatan Peran Perempuan untuk Perdamaian dan Keamanan Berkelanjutan. Namun, peningkatan partisipasi perempuan di negaranya sendiri untuk membangun perdamaian dalam konflik yang terjadi di berbagai daerah belum terlihat.

² Dosen Hukum Konstitusi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Eksekutif SETARA Institute

Inisiatif kelompok masyarakat sipil, termasuk inisiatif yang dikembangkan oleh perempuan dan orang muda, dalam masalah perdamaian dan resolusi konflik di Indonesia sebagian besar berada di “luar ruangan” (inisiatif independen), dan sedikit di “sekitar ruangan” (inisiatif untuk berkolaborasi dengan pemerintah). Peran masyarakat sipil, khususnya perempuan dan orang muda di “dalam ruangan” (bersama pemerintah) untuk pembangunan perdamaian masih perlu ditingkatkan. Perbaikan sangat diperlukan mengingat kelompok perempuan masih dalam posisi rentan dan dianggap tidak berdaya untuk memutuskan.



Panduan Pertanyaan bagi Fasilitator

1. Apakah terdapat peserta guru perempuan yang mengalami atau menyaksikan hal yang sama dari temuan di tiga provinsi?
2. Keadaan seperti apa yang menurut peserta adalah keadaan ideal bagi guru perempuan dan laki-laki?
3. Bagaimana pengalaman guru untuk menciptakan ruang kelas atau sesi pembelajaran daring yang setara bagi kelompok siswa laki-laki dan perempuan?

Diskriminasi terhadap Kelompok Transpuan



Fasilitator menyampaikan materi presentasi disertai dengan studi kasus di bagian ini. Sebelum memulai, ada baiknya melakukan penyegaran terlebih dahulu. Dalam penyampaian materi, sangat penting melakukan cek apakah terdapat pertanyaan dari peserta. Pengalaman pribadi peserta yang berkaitan dengan bagian ini juga sangat penting untuk diobservasi dan dicatat

Ketiadaan pengakuan atas keberadaan dan hak-hak transgender perempuan atau transpuan di Indonesia telah menimbulkan kerentanan ganda. Hingga tahun 2019, terdapat 45 peraturan daerah yang diskriminatif terhadap transgender. Bahkan, Indonesia merupakan salah satu dari 57 negara di dunia yang melanggengkan praktik kriminalisasi dan persekusi terhadap kelompok transgender. Kelompok transgender dianggap tidak berarti dalam masyarakat, atas dasar hukum yang tidak mengakui dan melindungi, dan dengan akumulasi heteronormativitas dalam masyarakat yang menganggap bahwa setiap orang harus cisgender (peran gender dan gender dalam masyarakat sejalan), ketidaktahuan di masyarakat, dan adanya patologi yang menganggap bahwa transgender adalah penyakit dan harus disembuhkan.

Peminggiran kelompok transpuan menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan terhadap kelompok ini, yang beberapa di antaranya telah mencapai titik ekstrem yang dibenarkan oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa heteronormativitas dalam



Studi Kasus 01

masyarakat juga dirasakan oleh kelompok transpuan di Jawa Timur yang mengakibatkan mereka mendapatkan tindakan intoleransi dan diskriminasi, termasuk stigma, pengusiran, hingga kekerasan verbal dan fisik dari masyarakat atau pemerintah. Pada tahun 2018, 12 transpuan ditangkap oleh polisi Aceh Utara, yang kemudian mencukur habis rambut mereka dan memaksa mereka untuk memakai pakaian laki-laki. Pada tahun yang sama, tiga transpuan ditangkap kemudian disemprot air selokan dari mobil pemadam kebakaran dan dipermalukan di depan umum, dan dua transpuan dikejar sekelompok orang di Bekasi. Intoleransi terus terjadi terhadap kelompok transgender di tahun 2020 ketika seorang *vlogger* Indonesia membuat video prank memberi paket berisi sampah kepada kelompok transgender di Bandung, Jawa Barat, atau tindakan kekerasan yang berujung pada kematian dalam kasus pembunuhan Mira di Jakarta Utara yang dibakar hidup-hidup. Dalam laporan #TransLivesMatter: Trans Murder Report in Indonesia tahun 2019, disebutkan jumlah kasus pembunuhan transgender di Indonesia meningkat sejak 2016, dari 3 kasus menjadi 6 kasus pada 2019.



Jaringan Transgender Indonesia menyebutkan bahwa pandemi layaknya menyiram alkohol pada luka terbuka. Saat peraturan pembatasan sosial diberlakukan sejak Maret 2020, kelompok transgender terpaksa terjerumus dalam kejatuhan ekonomi hampir hanya dalam satu malam. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Jaringan, proporsi transgender yang memiliki pendapatan tetap turun dari 95% menjadi 70% selama pandemi COVID-19. Rata-rata pendapatan juga turun 58% dari 4.3 juta rupiah sebulan menjadi hanya 1.8 juta rupiah sebulan. Banyak kelompok transgender yang tidak memiliki kartu identitas sehingga mereka dieksklusi dari program bantuan pemerintah selama pandemi COVID-19. Kebanyakan dari kelompok transgender mengandalkan bantuan dari komunitas hingga inisiatif yang diusung oleh kelompok lain untuk membantu keberlangsungan hidup transgender. Melihat situasi yang dihadapi oleh kelompok transpuan, apakah peserta dapat mengidentifikasi kelompok tertentu yang mungkin mengalami tantangan yang sama?



Studi Kasus 02



Foto: Suara.com

Setelah puluhan tahun menunggu, akhirnya pada 2 Juni 2021, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) memberikan layanan administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga bagi kelompok transpuan. Dari 350 transpuan yang menjalani proses ini, terdapat satu orang transpuan yang bahkan telah menunggu lebih dari 30 tahun untuk mendapatkan KTP. Kelengkapan KTP bagi transpuan dinilai sangat penting, karena selama ini mereka tidak dapat mengakses jaminan kesehatan yang disediakan BPJS, tidak dapat membuka rekening, dan tidak dapat mengakses bantuan pemerintah saat pandemi COVID-19. Kelompok transpuan biasanya hanya mengandalkan obat warung saja jika mengalami sakit, seperti yang diutarakan oleh salah satu transpuan. Melihat situasi ini, bagaimana pandangan peserta? Apakah ini salah satu langkah yang dapat menjamin pemenuhan hak kelompok transpuan di masa mendatang?



Sub Sesi 03

Ketidaksetaraan Pendidikan di Indonesia

Waktu

40Menit

- Ketidaksetaraan Pendidikan di Indonesia 15 menit
- Studi Kasus dan Diskusi 15 menit
- Menonton Video dan Diskusi 10 menit

Metode

Permainan dan Studi Kasus

Ketidaksetaraan Pendidikan di Indonesia



Fasilitator menyampaikan materi presentasi disertai dengan studi kasus di bagian ini. Sebelum memulai, ada baiknya melakukan penyegaran terlebih dahulu. Dalam penyampaian materi, sangat penting melakukan cek apakah terdapat pertanyaan dari peserta. Pengalaman pribadi peserta yang berkaitan dengan bagian ini juga sangat penting untuk diobservasi dan dicatat

³ Angka Partisipasi Sekolah usia 16 - 18 tahun pada tahun 2009 adalah sebesar 64.49% pada laki-laki dan 61.15% pada perempuan di perkotaan, sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar 73,81% pada laki-laki dan 74,65% pada perempuan di perkotaan. Disadur dari data Badan Pusat Statistik (2020) yang dapat diakses di: <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/25/1613/angka-partisipasi-sekolah-aps-penduduk-usia-7-18-tahun-menurut-tipe-daerah-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-2009-2020.html>.

Meski tren Angka Partisipasi Sekolah anak usia 16 - 18 tahun di Indonesia cenderung meningkat sejak tahun 2009 hingga tahun 2020, dan tidak ditemukan kesenjangan berarti antara kelompok perempuan dan laki-laki³, sayangnya ketimpangan akses, ekonomi, serta kesempatan masih membayangi kelompok perempuan dalam dunia pendidikan pada tingkat subnasional. Perbedaan lokasi geografis sangat terlihat signifikansinya terhadap akses pendidikan, ditunjukkan dengan perbedaan yang cukup besar antara Angka Partisipasi Sekolah perkotaan dengan Angka Partisipasi Sekolah pedesaan⁴. Hal ini dibuktikan melalui studi yang diterbitkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) pada tahun 2020 yang berjudul "*Inclusion in Indonesia's Education Sector*" (Inklusi dalam Sektor Pendidikan di Indonesia). Beberapa temuan yang menggambarkan ketimpangan akses pendidikan di Indonesia mencakup:

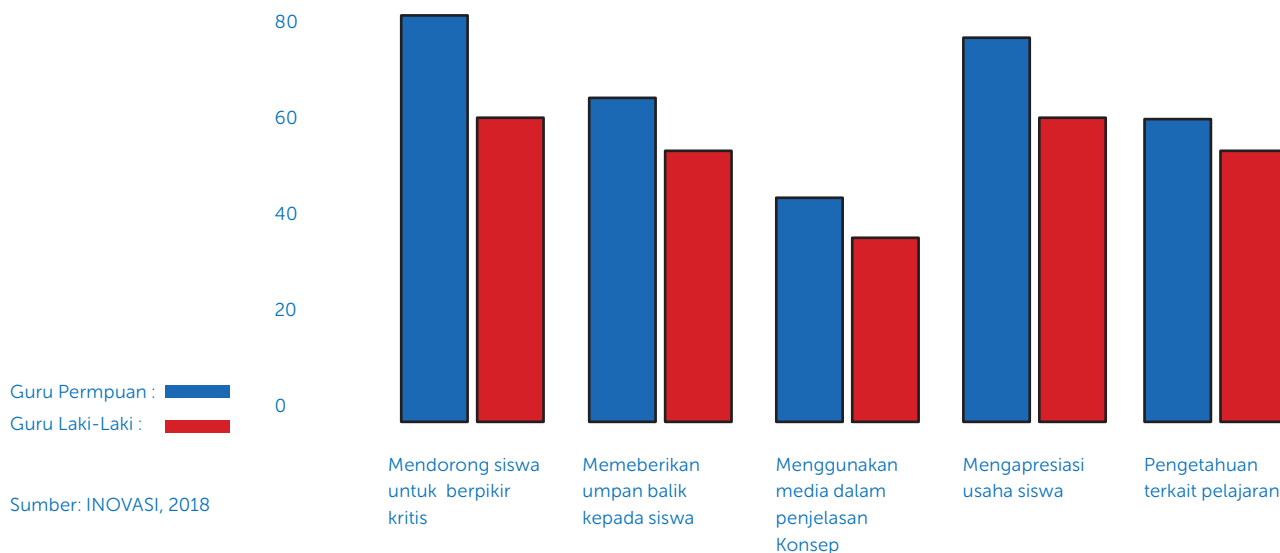
- Kelompok remaja yang tidak sekolah atau keluar dari sekolah didominasi oleh mereka yang merupakan anak dengan disabilitas, anak yang bekerja, anak yang sudah menikah, anak dari keluarga miskin, dan anak yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil. Perbedaan status ekonomi keluarga dan faktor geografis tempat tinggal tampak berperan untuk menentukan apakah seseorang dapat menyelesaikan sekolah. Remaja usia sekolah menengah pertama dari keluarga termiskin menghadapi kemungkinan empat kali lebih besar untuk putus sekolah dibanding remaja yang berasal dari rumah tangga terkaya. Jika dilihat dari temuan tersebut, kondisi terkait status ekonomi, serta mereka yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis tertentu (pedesaan dan terpencil) menjadi alasan utama bagi remaja putus sekolah. Hal yang perlu disoroti juga adalah isu perkawinan anak (pernikahan di bawah 18 tahun) yang menjadi salah satu alasan besar remaja putus sekolah. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di Asia Tenggara dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Terdapat setidaknya 22 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.

- Meski anak perempuan lebih berprestasi dibanding anak laki-laki di sekolah secara nasional, namun jumlah perempuan yang pada akhirnya dapat mengakses pekerjaan lebih sedikit dibanding laki-laki dengan penghasilan yang lebih rendah serta kesempatan promosi yang lebih sedikit. Survei yang dilakukan pada 56.000 siswa kelas 8 di Sumatra dan Jawa oleh Bank Dunia memperlihatkan bahwa nilai yang diperoleh oleh siswa laki-laki lebih rendah 2-3 persen dibanding perempuan di tujuh subjek pelajaran. Sayangnya hal ini tidak menjamin masa depan yang pasti bagi kelompok perempuan, bahkan di beberapa daerah masih dipercayai bahwa peran perempuan adalah di rumah saja sedangkan laki-laki akan menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kesempatan sekolah akan diberikan kepada anak laki-laki dibanding anak perempuan. Pada tingkatan yang lebih tinggi, pekerja perempuan pada akhirnya memiliki kesempatan bekerja yang lebih sedikit dibanding laki-laki dengan perbandingan sekitar 3:4 pada lowongan pekerjaan dan sekitar 2:3 pada penempatan tenaga kerja. Ketimpangan gaji pun dirasakan oleh kelompok pekerja perempuan yang harus menerima gaji Rp600.000,00 lebih sedikit dibanding kelompok pekerja laki-laki dengan status pekerjaan yang sama.

Temuan lanjutan dari studi ini pun membahas kesenjangan yang terjadi dalam karir di bidang pendidikan. Sebagian besar posisi manajemen di bidang ini didominasi oleh laki-laki ketimbang perempuan, baik dalam sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama (madrasah) maupun sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meski perempuan mewakili lebih dari separuh tenaga kependidikan di tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas, pengelolaan dan kepemimpinan sekolah tetap didominasi oleh kelompok laki-laki. Di tingkat sekolah dasar, perempuan hanya mewakili 31% dari jumlah kepala sekolah di bawah pengelolaan Kementerian Agama dan hanya 43% di sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Angka representasi ini menurun seiring kenaikan jenjang sekolah hingga sekolah menengah atas. Hanya terdapat 19% perempuan yang menempati posisi kepala sekolah di sekolah menengah atas yang dikelola Kementerian Agama dan hanya 22% perempuan yang menempati posisi kepala sekolah di sekolah menengah atas di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal menarik yang perlu diperhatikan adalah hasil studi awal yang dilakukan oleh The Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI), sebuah program kemitraan antara pemerintah Australia dengan Indonesia, pada tahun 2018. Sejalan dengan temuan Bank Dunia yang menemukan rendahnya representasi perempuan untuk menempati posisi kepala sekolah, studi ini juga mengemukakan bahwa ternyata tenaga pendidik perempuan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, dan kepala sekolah perempuan cenderung memiliki manajemen sekolah yang lebih baik serta membangun lingkungan belajar yang kondusif. Secara spesifik, survei memperlihatkan bahwa tenaga pendidik perempuan memiliki kemampuan lebih baik dibanding tenaga pendidik laki-laki dalam bidang: (1) mendorong siswa untuk berpikir kritis, (2) memberikan umpan balik kepada siswa, (3) menggunakan media yang relevan untuk menjelaskan konsep materi pembelajaran, (4) mengapresiasi usaha siswa, dan (5) pengetahuan terkait pelajaran yang mereka ajar. Hasil temuan ini sayangnnya tidak dibarengi dengan kesempatan yang terbuka bagi tenaga pendidik perempuan untuk mendapatkan promosi karir yang lebih baik.

Gambar 3.
Kinerja Tenaga Pendidik
Perempuan dan Laki-laki



Perbedaan letak geografis semakin memperparah ketimpangan akses pendidikan baik dirasakan oleh kelompok siswa maupun guru. Survei yang dilakukan oleh SMERU Research Institute menunjukkan bahwa guru yang berada di kota besar di Pulau Jawa memiliki fasilitas yang lebih baik dalam menjangkau siswa secara daring (*online*), sedangkan guru yang berada di daerah pedesaan khususnya di luar Pulau Jawa harus menjangkau siswa mereka di rumah untuk mengumpulkan hasil Pekerjaan Rumah karena minimnya akses terhadap Internet dan gawai digital. Keluarga dengan status ekonomi rendah sangat terdampak akan situasi ini dengan ketersediaan gawai yang terbatas, tidak jarang ditemui satu keluarga hanya memiliki satu seluler pintar (*smartphone*) untuk mendukung seluruh keperluan komunikasi keluarga, termasuk pembelajaran daring yang perlu dilakukan siswa. Kesenjangan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pun menjadi sorotan sehingga menjadi faktor pendukung semakin timpangnya akses pendidikan bagi siswa.



Studi Kasus



Foto: Antara Foto/Irsan Mulyadi

Mengutip berita dari BBC Indonesia pada 19 April 2020, dua guru di Jawa Barat (guru Bimbingan Konseling) dan Jakarta (guru Agama) berbagi pengalaman mereka terkait beban ganda yang akhirnya mereka harus jalani selama pandemi. Tantangan yang dihadapi mencakup jam mengajar yang harus dilakukan, memantau anak mereka yang juga sedang melakukan pembelajaran daring, hingga mengurus anak yang masih bayi. Fenomena yang sama juga ditemukan oleh pelaksana program Creative Youth for Tolerance di provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, di mana guru perempuan mengakui beban ganda yang harus mereka lakukan, bahkan beberapa di antaranya justru mengaku bebannya menjadi tiga kali lipat: mengajar, mengawasi anak belajar, dan mengurus rumah. Lalu, apakah ada pengalaman serupa yang dialami oleh peserta?



Panduan Pertanyaan bagi Fasilitator

1. Setelah mendapatkan wawasan baru terkait ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia, bagaimana pendapat peserta guru terkait kondisi pendidikan di negara ini? Apakah sudah ideal? Mengapa demikian?
2. Adakah situasi ketimpangan serupa yang peserta guru amati di daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten?
3. Apakah terdapat praktik kesetaraan pembagian tugas maupun representasi posisi dalam sekolah tempat peserta guru bekerja yang bisa dibagikan dalam forum?

Referensi Pembelajaran Tambahan



Sumber: Kok Bisa?

Judul: Kenapa Pendidikan Indonesia Belum Maju?

Tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=CmcjO4SWrgQ>

Video berdurasi 3 menit 31 detik ini menjadi bahan yang baik untuk menerangkan secara umum keadaan pendidikan di Indonesia, pentingnya pendidikan, dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Dalam video ini bisa menjadi pemantik diskusi peserta guru untuk memetakan permasalahan sistemik pendidikan di Indonesia dan apa saja resolusi atau rekomendasi guru yang dapat diberikan kepada pihak pemerintah untuk perbaikan pendidikan. Tidak hanya itu, video juga menekankan bagaimana tidak hanya siswa yang belajar dari guru, namun guru yang juga dapat belajar dari siswa.



Sub Sesi 04

Jurnal dan Gagasan

Waktu

40Menit

Metode

Pengisian Lembar Kerja

Jurnal

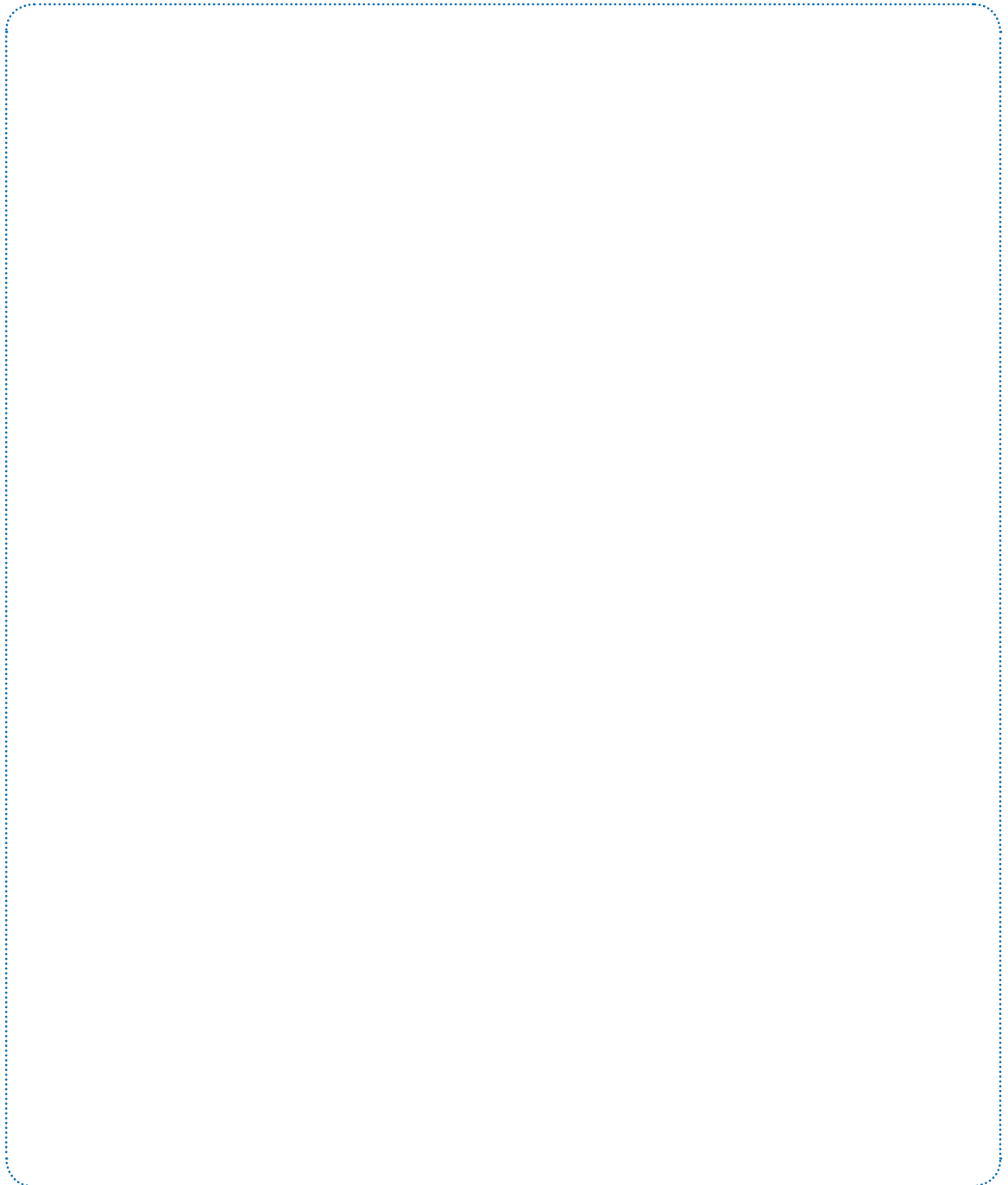
Setelah seluruh sesi pembelajaran, permainan, serta studi kasus dipelajari, Anda diharapkan melakukan kegiatan penulisan jurnal (journaling) untuk merekam pengalaman Anda yang berkaitan pada topik di sesi Ke(tidak)setaraan Pendidikan di Indonesia. Terdapat tiga bagian yang diharapkan dilengkapi, mencakup:

- **Apa yang Saya Lihat**
Anda diminta menceritakan pengalaman yang pernah Anda lihat, amati, atau alami terkait topik yang dibicarakan.
- **Apa Perasaan Saya**
Anda diminta mengungkapkan perasaan Anda terkait peristiwa tersebut.
- **Apa Pendapat Saya**
Anda diminta untuk memberikan pendapat terkait peristiwa yang terjadi, dapat mencakup kritik atau saran demi perbaikan situasi tertentu.

| Apa yang Saya Lihat? | Apa Perasaan Saya? | Apa Pendapat Saya? |
|---|---|--|
| Contoh: saya melihat siswa perempuan yang saya ajar selalu telat untuk hadir di jam pelajaran pagi hari | Contoh: saya sedih menghadapi hal tersebut karena merasa bahwa ia tidak tertarik terhadap pelajaran yang saya ajar. Seharusnya orang tua dia mengawasi anak tersebut untuk ikut sekolah daring. Kira-kira apa yang ia dan keluarganya lakukan di pagi hari? | Contoh: setelah mengetahui potret kesetaraan di Indonesia, saya jadi berpikir mungkin saja siswa perempuan tersebut mengalami beban ganda di rumah, harus ikut pembelajaran daring, namun harus pula membantu pekerjaan di rumah. Seperti apa keadaan keluarganya ya? Apakah akses terhadap Internet maupun gadget terbatas? Apakah ia tinggal bersama keluarga besar? Kira-kira apa yang bisa dilakukan sekolah untuk memberikan pengertian kepada keluarga atau membantu siswa agar tetap mendapatkan pelajaran? |

Gagasan

Tentu kita menyadari bersama bahwa modul ini bukanlah modul yang sempurna dan telah mencakup semua pembelajaran yang dibutuhkan oleh Anda. Untuk menengahi hal tersebut, Anda dapat menambahkan ide, gagasan, informasi penting, fakta baru, pertanyaan, saran, kritik, maupun yang lainnya terkait pembelajaran Ke(tidak)setaraan Pendidikan di Indonesia. Partisipasi Anda untuk menyempurnakan modul ini sungguh sangat berarti! Silakan tulis gagasan Anda di kolom di bawah ini!





Kuis Akhir

Setelah pembelajaran mengenai Konflik dan Kekerasan selesai, Anda diharapkan mengisi kuis akhir berikut ini.

Nama : _____

Gender : _____

Usia : _____

Provinsi : _____

Tempat tinggal : _____

Silakan beri tanda silang (X) pada kolom "Benar" atau "Salah" terhadap setiap pernyataan sesuai dengan apa yang Anda ketahui.

| No | Pernyataan | Benar | Salah |
|----|---|-------|-------|
| 1 | Perempuan harus memiliki hak dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki | | |
| 2 | Laki-laki memiliki kemampuan yang lebih dalam memimpin dari pada perempuan sehingga layak menjadi pemimpin politik | | |
| 3 | Perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan seperti laki-laki | | |
| 4 | Laki-laki merupakan tulang punggung keluarga sehingga lumrah memiliki hak lebih besar dibanding perempuan dalam pekerjaan | | |
| 5 | Perempuan lebih cocok mengerjakan pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki | | |



Asesmen Akhir

.....

Nama :

.....

Gender :

.....

Usia :

.....

Provinsi :

.....

Tempat tinggal :

.....

Sebelum memulai pembelajaran yang menyeluruh, peserta diharapkan mengisi lembar asesmen dengan lengkap. Mohon isi semua pertanyaan yang diberikan. Silakan beri tanda silang (X) pada kolom pilihan yang mencerminkan persetujuan atau ketidaksetujuan Anda terhadap setiap pernyataan yang diberikan

| No | Pernyataan | STS | TS | B | S | SS |
|----|---|-----|----|---|---|----|
| 1a | Saya tidak memiliki masalah bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja yang memeluk agama lain atau penghayat kepercayaan. | | | | | |
| 1b | Jika saya memiliki rekan kerja yang memeluk agama lain atau penghayat kepercayaan, saya menghargai haknya untuk berpendapat dan merasa pendapatnya penting untuk didengarkan. | | | | | |
| 1c | Saya merasa senang dan perlu memiliki rekan kerja yang memeluk agama lain atau penghayat kepercayaan karena saya bisa mempelajari banyak hal darinya. | | | | | |
| 2a | Saya tidak memiliki masalah bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja yang keturunan Tionghoa atau Papua. | | | | | |
| 2b | Jika saya memiliki rekan kerja keturunan Tionghoa atau Papua, saya menghargai haknya untuk berpendapat dan merasa pendapatnya penting untuk didengarkan. | | | | | |
| 2c | Saya merasa senang dan perlu memiliki rekan kerja keturunan Tionghoa dan Papua karena saya bisa mempelajari banyak hal darinya. | | | | | |
| 3a | Saya tidak memiliki masalah untuk bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja perempuan. | | | | | |
| 3b | Saya menghargai hak rekan kerja perempuan saya untuk berpendapat dan merasa pendapatnya penting untuk didengarkan. | | | | | |
| 3c | Saya merasa senang dan perlu memiliki rekan kerja perempuan karena saya bisa mempelajari banyak hal darinya. | | | | | |

STS: Sangat Tidak Setuju,

TS: Tidak Setuju,

B: Biasa Saja,

S: Setuju,

SS: Sangat Setuju

| No | Pernyataan | STS | TS | B | S | SS |
|----|--|-----|----|---|---|----|
| 4a | Saya tidak memiliki masalah untuk bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja yang menyandang disabilitas. | | | | | |
| 4b | Jika saya memiliki rekan kerja dengan disabilitas, saya menghargai haknya untuk berpendapat dan merasa pendapatnya penting untuk didengarkan. | | | | | |
| 4c | Saya merasa senang dan perlu memiliki rekan kerja dengan disabilitas karena saya bisa mempelajari banyak hal darinya. | | | | | |
| 5a | Saya tidak memiliki masalah jika ada rekan kerja saya yang memeluk agama lain atau penghayat kepercayaan dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah, termasuk Kepala Sekolah. | | | | | |
| 5b | Jika Kepala Sekolah di tempat saya bekerja memeluk agama lain atau penghayat kepercayaan, saya akan tetap menghargai kepemimpinannya karena saya yakin baik tidaknya kepemimpinan seseorang tidak ada hubungannya dengan latar belakang agamanya. | | | | | |
| 5c | Saya mendukung rekan kerja yang beragama lain atau penghayat kepercayaan untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah demi keberagaman. | | | | | |
| 6a | Saya tidak memiliki masalah jika ada rekan kerja saya yang keturunan Tionghoa atau Papua dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah, termasuk Kepala Sekolah. | | | | | |
| 6b | Jika Kepala Sekolah di tempat saya bekerja adalah keturunan Tionghoa atau Papua, saya akan tetap menghargai kepemimpinannya karena saya yakin baik tidaknya kepemimpinan seseorang tidak ada hubungannya dengan identitas suku, ras, atau etnisnya | | | | | |
| 6c | Saya mendukung rekan kerja yang keturunan Tionghoa atau Papua untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah demi keberagaman. | | | | | |
| 7a | Saya tidak memiliki masalah jika ada rekan kerja perempuan saya yang dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah, termasuk Kepala Sekolah | | | | | |
| 7b | wJika Kepala Sekolah di tempat saya bekerja adalah seorang perempuan, saya akan tetap menghargai kepemimpinannya karena saya yakin baik-tidaknya kepemimpinan seseorang tidak ada hubungannya dengan identitas gendernya | | | | | |

STS: Sangat Tidak Setuju,

TS: Tidak Setuju,

B: Biasa Saja,

S: Setuju,

SS: Sangat Setuju

| No | Pernyataan | STS | TS | B | S | SS |
|-----|---|-----|----|---|---|----|
| 7c | Saya mendukung rekan kerja perempuan saya untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah demi keberagaman | | | | | |
| 8a | Saya tidak memiliki masalah jika ada rekan kerja dengan disabilitas yang dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah, termasuk Kepala Sekolah | | | | | |
| 8b | Jika Kepala Sekolah di tempat saya bekerja adalah seorang penyandang disabilitas, saya akan tetap menghargai kepemimpinannya karena saya yakin baik tidaknya kepemimpinan seseorang tidak ada hubungannya dengan kondisi tubuhnya | | | | | |
| 8c | Saya mendukung rekan kerja dengan disabilitas untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan tertentu di sekolah demi keberagaman | | | | | |
| 9a | Saya mendukung teman perempuan saya untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi | | | | | |
| 9b | Saya percaya perempuan lebih cocok mengerjakan pekerjaan rumah tangga dibanding laki-laki | | | | | |
| 9c | Saya percaya laki-laki merupakan tulang punggung keluarga sehingga lumrah memiliki hak lebih besar dibanding perempuan dalam pekerjaan | | | | | |
| 9d | Saya akan memilih kandidat pemimpin laki-laki dibanding perempuan saat ada pemilihan karena laki-laki memiliki kemampuan lebih baik dalam memimpin | | | | | |
| 9e | Saya percaya perempuan harus memiliki hak dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki | | | | | |
| 9f | Saya memiliki komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dan inklusivitas di lingkungan sekitar saya, khususnya di tempat kerja | | | | | |
| 10a | Saya memiliki komitmen untuk mendukung terbentuknya suasana sekolah yang toleran dan pluralis | | | | | |
| 10b | Saya memiliki komitmen untuk mendengarkan dengan baik dan menggunakan empati dalam menyelesaikan konflik yang saya temui, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah | | | | | |

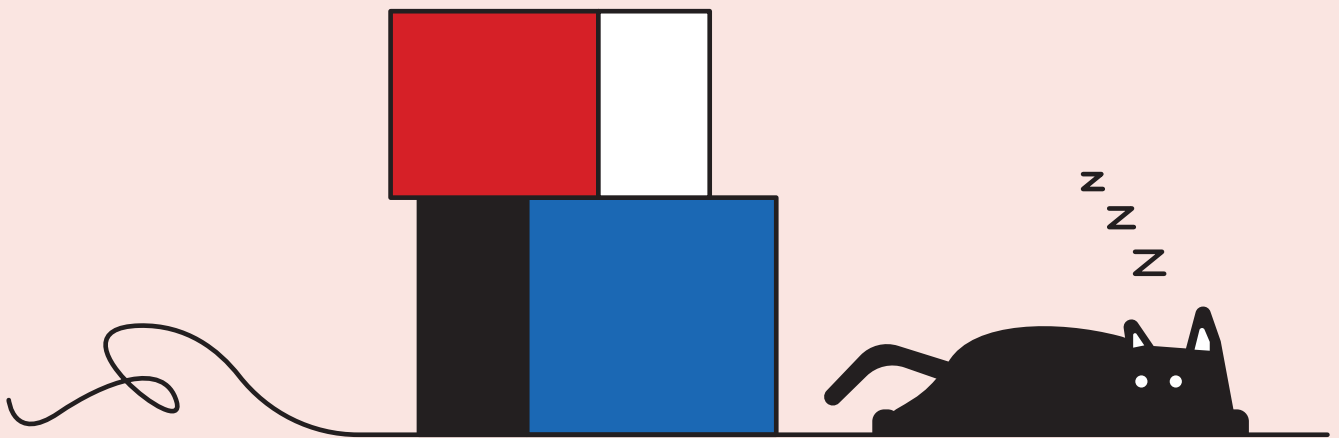
STS: Sangat Tidak Setuju,

TS: Tidak Setuju,

B: Biasa Saja,

S: Setuju,

SS: Sangat Setuju



Daftar Referensi

- Abdi, A. P. (2021). Kisah Transgender Bisa Punya E-KTP: Terkendala Stigma dan Birokrasi. Diakses pada 26 Juni 2021 dari <https://tirto.id/kisah-transgender-bisa-punya-e-ktp-terkendala-stigma-birokrasi-ggCi>
- Aditya, R. (2021). Puluhan Transpuan di Jabodetabek Dapat KTP, Ada yang menanti Lebih dari 30 Tahun. Diakses pada 26 Juni 2021 dari <https://www.suara.com/news/2021/06/05/182511/puluhan-transpuan-di-jabodetabek-dapat-ktp-ada-yang-menanti-lebih-dari-30-tahun?page=all>
- Advocates for Youth. (2009). Building Effective Youth-Adult Partnerships. Diakses pada 25 Juni 2021 dari <https://www.advocatesforyouth.org/resources/fact-sheets/building-effective-youth-adult-partnerships/>
- Afkar, R., Yarrow, N., Surbakti, S., dan Cooper, R.. (2020). Inclusion in Indonesia's Education Sector: A Subnational Review of Gender Gaps and Children with Disabilities. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33943/Inclusion-in-Indonesias-Education-Sector-A-Subnational-Review-of-Gender-Gaps-and-Children-with-Disabilities.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ahnaf, M. I. (2016). Modul Sekolah Pengelolaan Keragaman. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Alifia, U. (2020). COVID-19 is Widening Indonesia's Education Gap. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://rise.smeru.or.id/en/blog/covid-19-widening-indonesia%E2%80%99s-education-gap>
- Alvara Research Center. (2017). Potensi Radikalisme di Kalangan Profesional Indonesia. Jakarta: Alvara Research Center.
- Arigi, F. dan Amirullah. (2018). Komnas Perempuan: Ratusan Perda Diskriminatif terhadap Perempuan. Diakses pada 11 Juni 2021 dari <https://nasional.tempo.co/read/1147997/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan/full&view=ok>
- Arsendy, S., Sukoco, G. A., dan Purba, R. E. (2020). Kepala Sekolah Perempuan di Indonesia: Saat Ini Masih Sedikit dan Kita Butuh Lebih Banyak. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://theconversation.com/kepala-sekolah-perempuan-di-indonesia-saat-ini-masih-sedikit-dan-kita-butuh-lebih-banyak-137622>
- Aurelia, J. (2020). Ekspektasi Tinggi Membuat Milenial Kerap Dilanda Burnout. Diakses pada 12 Juni 2021 dari <https://tirto.id/ekspektasi-tinggi-membuat-milenial-kerap-dilanda-burnout-ehPR>
- Badan Pusat Statistik. (2018a). Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018. Diakses pada 30 Agustus 2020 dari <https://www.bps.go.id/publication/download>.
- Badan Pusat Statistik. (2018b). Statistik Indonesia 2018. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://www.bps.go.id/publication/download>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur. Diakses pada 12 Juni 2021 dari <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2018/05/17/1322/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-kelompok-umur-2015---2016.html>

- Balasooriya, A. S. (2001). *Learning the Way of Peace: A Teachers' Guide to Peace Education*. New Delhi: UNESCO. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000125228>
- BBC Indonesia. (2017). Putusan MK 'Angin Segar' dan 'Memulihkan Martabat' Penghayat Kepercayaan. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935>
- Briantika, A. (2020). Prank Ferdian Paleka ke Transpuan Melecehkan HAM dan Diburu Polisi. Diakses pada 22 September 2020 dari <https://tirto.id/prank-ferdian-paleka-ke-transpuan-melecehkan-ham-diburu-polisi-fjCK>
- Cahya, G. H.. (2020). Distance Learning Threatens to Exacerbate Education Inequality in Indonesia. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/19/distance-learning-threatens-to-exacerbate-education-inequality-in-indonesia.html>
- Cambridge Dictionary. (2020a). Bias. Cambridge University Press. Diakses pada 22 Juni 2020 dari: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bias>
- Cambridge Dictionary. (2020b). Privilege. Cambridge University Press. Diakses pada 5 Agustus 2020 dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/privilege>
- Carter, C. (2008). Voluntary Standards for Peace Education. *Journal of Peace Education*, 5(2).
- Centre for Strategic and International Studies (CSIS). (2017), *Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Charis, A. (2017). *Studi Strategi Kontra Radikalisme*. Jakarta: Kemenko PMK.
- CLIMB Professional Development and Training. (2020). What Are the Five Conflict Resolution Strategies? Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://climb.pcc.edu/blog/what-are-the-five-conflict-resolution-strategies>
- Direktorat KSKK Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. (2019). *Membangun Karakter Moderat: Modul Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada MTs dan MA*. Diakses pada 25 Juni 2021 dari https://docs.google.com/file/d/1rS5rieP9_UzcLoK7cFgk5MOpoGQHLLXu/view
- Fullinwider, R. (2018). *The Stanford Encyclopedia of Philosophy: Affirmative Action*. Diakses pada 22 Juni 2020 dari: <https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/>
- Halim, K. (2019). *#HidupTransBermakna: Laporan Pembunuhan Transpuan di Indonesia*. Jakarta: GWL Indonesia.
- Hart, R. (1992). *Children's Participation from Tokenism to Citizenship*. Diakses pada 26 Juni 2021 dari www.freechild.org/ladder.htm
- Hastanto, I. (2020). Transpuan Dibakar Hidup-Hidup di Jakarta Utara Usai Dituduh Mencuri. Diakses pada 22 September 2020 dari https://www.vice.com/id_id/article/wxe99q/transpuan-dibakar-hidup-hidup-di-jakarta-utara-usai-dituduh-mencuri
- Ibrahim, R. (2021). Alcohol on an Open Wound: Transgender Indonesians Struggle through Pandemic. Diakses pada 3 Juni 2021 dari https://www.thejakartapost.com/life/2021/02/10/alcohol-on-an-open-wound-transgender-indonesians-struggle-through-pandemic.html?utm_campaign=os&utm_source=mobile&utm_medium=ios
- International Development Partners Group Nepal. (2017). *A Common Framework for Gender Equality and Social Inclusion*. Diakses pada 2 Juni 2020 dari https://www.undp.org/content/dam/nepal/docs/generic/GESI%20framework%20Report_Final_2017.pdf

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). Peran Krusial Penjaga Perdamaian Perempuan sebagai Agen Perdamaian, Toleransi, dan Kemakmuran. Diakses pada 21 September 2020 dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/343/berita/peran-krusial-penjaga-perdamaian-perempuan-sebagai-agen-perdamaian-toleransi-dan-kemakmuran>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Diakses pada 30 Agustus 2020 dari <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/44ac0-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2019.pdf>
- Komnas Perempuan. (2020a). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan. Diakses pada 22 September 2020 dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>
- Komnas Perempuan. (2020b). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Diakses pada 22 September 2020 dari [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf)
- Komnas Perempuan. (2020c). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Diakses pada 22 September 2020 dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-terhadap-transpuan-jakarta-6-mei-2020>
- Kompas. (2020). Timpangnya Pendapatan, Jadi Salah Satu Bentuk Kesenjangan Antargender di Indonesia. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://www.kompas.tv/article/93113/timpangnya-pendapatan-jadi-salah-satu-bentuk-kesenjangan-antargender-di-indonesia>
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., dan Lozano, R. (ed). (2020). World Report on Violence and Health. World Health Organization. Diakses pada 24 Juni 2021 dari https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf
- Kusuma, E., dan Arum, N. S. (2019). Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. SAFEnet. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- LBH Jakarta. (2018). Terjerat Pinjaman Online, 1330 Korban Mengadu ke LBH Jakarta. Diakses pada 11 Juni 2020 dari <https://bisnis.tempo.co/read/1153689/lbh-25-aplikasi-pinjaman-online-resmi-diduga-melanggar-aturan/full&view=ok>
- Lumbanrau, R. E. (2019). Kisah Penyandang Disabilitas Mencari Kerja: Hampir 50 Kali Lamar Lowongan Tapi Hasilnya Nihil. Diakses pada 25 Juni 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50512664>
- Merdeka. (2021). 60 Persen Guru di Indonesia Terbatas Kuasai Teknologi Informasi dan Komunikasi. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/60-persen-guru-di-indonesia-terbatas-kuasai-teknologi-informasi-dan-komunikasi.html>
- Miqdad, M. (2012). Modul Pelembagaan CEWERS: Conflict Early Warning and Early Response System. Jakarta: Institut Titian Perdamaian.
- Munip, A. (2012). Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah. Jurnal Pendidikan Islam, 1(2).

- Navlakha, M. (2019). Berikut Daftar Negara Paling Aman Bagi Perempuan di Asia Pasifik. Diakses pada 11 Juni 2020 dari https://www.vice.com/id_id/article/43jm3j/berikut-daftar-negara-paling-aman-bagi-perempuan-di-asia-pasifik
- Paramaesti, C. dan Cahyani, D. R. (2018). LBH: 25 Aplikasi Pinjaman Online Resmi Diduga Melanggar Aturan. Diakses pada 11 Juni 2020 dari <https://bisnis.tempo.co/read/1153689/lbh-25-aplikasi-pinjaman-online-resmi-diduga-melanggar-aturan/full&view=ok>
- Park, M. (2018). What Starbucks Incident Tells Us About Implicit Bias. Diakses pada 5 Agustus 2020 dari <https://edition.cnn.com/2018/04/17/health/implicit-bias-philadelphia-starbucks/index.html>
- PPIM UIN Jakarta. (2017). Api Dalam Sekam: Keberagaman Gen Z, Survei Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- Pranita, E. (2021). Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>
- Project for Public Spaces. (2018). Placemaking Methodology. Diakses pada 25 Juni 2021 dari https://uploads-ssl.webflow.com/5810e16f876cec6bcbd86e/5b71f88ec6f4726edfe3857d_2018%20placemaking%20booklet.pdf
- Ridhoj, A. (2019). Sekolah Penjaga Kebhinekaan: Cerita Baik Program Sekolah Damai Wahid Foundation. Diakses pada 25 Juni 2021 dari <https://drive.google.com/file/d/1iQFbyPKNSMSreSGMWJIEzxGVOF6GP-ao/view>
- S., L. H. (2020). Nestapa Seorang Waria. Diakses pada 22 September 2020 dari <https://tirto.id/nestapa-seorang-waria-ePZu>
- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). (2017). NKRI dan ISIS: Penilaian Massa Publik Nasional, Temuan Survei Mei 2017. Jakarta: Saiful Mujani Research and Consulting.
- Saputri, M. (2018). Puluhan Waria Ditangkap Pihak Kepolisian Aceh Utara. Diakses pada 22 September 2020 dari <https://tirto.id/puluhan-waria-ditangkap-pihak-kepolisian-aceh-utara-cDXd>
- Swarniati, K. (2020). Pandemi dan Pertaruhan Angkatan Muda. Diakses pada 25 Juni 2021 dari <https://news.detik.com/kolom/d-5259542/pandemi-dan-pertaruhan-angkatan-kerja-muda>
- Tambunan, L. (2020). Dampak Sosial Virus Corona: Beban 'Berlipat Ganda' bagi Perempuan di Masa Pandemi COVID-19. Diakses pada 25 Juni 2021 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52323527>
- Transgender Europe. (2020). Map of Criminalisation and Prosecution of Transpeople. Diakses pada 22 September 2020 dari <https://transrespect.org/en/map/criminalization-and-prosecution-of-trans-people/>
- UNFPA, UNDP, DPPA/PBSO, and FBA. (2021). Youth, Peace and Security: A Programming Handbook. Diakses pada 25 Juni 2021 dari https://www.youth4peace.info/system/files/2021-02/YPS%20Programming%20Handbook_0.pdf

- UNHCR. (2001). Gender-Based Violence. Diakses pada 26 Juni 2021 dari <https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html>
- UNICEF Learning for Peace. (2015). The Role of Teachers in Peacebuilding: Main Findings. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://www.peace-ed-campaign.org/the-role-of-teachers-in-peacebuilding/>
- United Nations. (2001). Gender Mainstreaming, Strategy for Promoting Gender Equality. Diakses pada 3 Juli 2020 dari <https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet1.pdf>
- United Nations. (2016). Identifying Social Inclusion and Exclusion. Diakses dari pada 3 Juli 2020 dari <https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf>
- United Nations Security Council. (2015a). Resolution 2242 on Women, Peace, and Security. Diakses pada 21 September 2021 dari https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf
- United Nations Security Council. (2015b). Resolution 2250 on Youth, Peace, and Security. Diakses pada 21 September 2021 dari <https://www.un.org/press/en/2015/sc12149.doc.htm>
- Velasco, S. M. R. (2015). The Role of Education in Peacebuilding: An Application of the 4Rs Framework in Colombia during 2010 – 2014. Diakses pada 24 Juni 2021 dari https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container2143/files/going-global/dissertations/sorayamilena_rozovelasco_s_ua_N0035000_3.pdf
- Wagiman, W. (2019). Ragam Tantangan Aktual Pemenuhan Hak Perempuan di Indonesia. Diakses pada 11 Juni 2020 dari <https://elsam.or.id/ragam-tantangan-aktual-pemenuhan-hak-perempuan-di-indonesia/>
- Wahib, A. (2012). Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib. Jakarta: Democracy Project.
- Wahid Foundation. (2016). Laporan Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivistis Rohani Islam (ROHIS) Sekolah-Sekolah Negeri. Jakarta: The Wahid Foundation.
- Wibowo, D., Rahmawati, A. D., Kurniasari, M., dan Alexis, G. L. (2020). Creative Youth for Tolerance: Konsep Inti Dan Glosarium Baseline Study. Jakarta: Yayasan Hivos.
- Wibowo, D., Rahmawati, A. D., Kurniasari, M., dan Alexis, G. L. (2021). Baseline Study Creative Youth for Tolerance (CREATE). Jakarta: Yayasan Hivos.
- Yarrow, N. dan Afkar, R. (2020). Gender dan Pendidikan di Indonesia: Kemajuan yang Masih Membutuhkan Kerja Keras. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/gender-dan-pendidikan-di-indonesia-kemajuan-yang-masih-membutuhkan-kerja-keras>
- Yusar. (2015). Perlawanan Kaum Muda terhadap Hegemoni Radikalisme Agama dalam Bentuk-Bentuk Budaya Populer. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 2(1).
- Yusuf, S. (2011). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

